

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan. Data dalam penelitian ini diambil dari kata, kelompok kata, dan kalimat-kalimat yang menunjukkan penggunaan ejaan dalam jurnalistik, diksi dalam jurnalistik, kalimat dalam jurnalistik, dan paragraf dalam jurnalistik, yang terdapat dalam teks pada kanal politik ROL (selanjutnya akan disebut tekaporol) pada tanggal 1-30 Juni 2013.

Berikut ini adalah daftar judul tekaporol (30 teks) yang menjadi sumber data penelitian.

Tabel 1. Daftar Judul Tekaporol

Nomor Kode Teks	Tanggal/Bulan	Judul Berita
1.	1 Juni 2013	Efendi Simbolon: jadi Capres Muda, Jokowi Masih Perlu Diuji
2.	2 Juni 2013	Jeffrie: 2014, Indonesia Akan Dipimpin oleh Generasi Baru
3.	3 Juni 2013	Perintah Wiranto, Hanura Lakukan Rotasi di DPR
4.	4 Juni 2013	'Konvensi Demokrat Kebutuhan Nyata untuk Cari Capres'
5.	5 Juni 2013	PKB Sebut Mahfud MD Layak jadi Capres
6.	6 Juni 2013	Muhammadiyah Larang Kadernya Golput
7.	7 Juni 2013	Hindari Perpecahan, Parpol Dianjurkan Bentuk Koalisi Sebelum Pilpres
8.	8 Juni 2013	Wiranto: Hanura Berjuang Menjadi Partai Papan Atas
9.	9 Juni 2013	Rhoma Irama Tetap Pede Maju sebagai Capres

10.	10 Juni 2013	Dahlan dan Gita Diperkirakan Sulit jadi Capres
11.	11 Juni 2013	Soal Syarat Caleg, Parpol Dianggap Masih Main-Main
12.	12 Juni 2013	Televisi Efektif Gaet Pemilih Pemula
13.	13 Juni 2013	Pengamat: Politik Uang Tak Bisa Dihindari
14.	14 Juni 2013	KPU masih buka peluang koreksi hasil DCS
15.	15 Juni 2013	Pengamat: Keluar dari Koalisi Akan Tingkatkan Elektabilitas PKS
16.	16 Juni 2013	Pengamat: Politik Dua Muka PKS Hanya untuk Strategi
17.	17 Juni 2013	Suara PKS Diprediksi Tak Sampai 3,5 Persen
18.	18 Juni 2013	Pemuda Hanura Serukan Mahasiswa Jangan Golput
19.	19 Juni 2013	Surya Paloh: Nasdem Oposisi jika Gagal Dua Besar
20.	20 Juni 2013	KPU Terima 20 Laporan Masyarakat Tentang DCS
21.	21 Juni 2013	Sejumlah Warga Jakarta Dukung Jokowi Maju di Pilpres 2014
22.	22 Juni 2013	Ical Ajak Caleg Golkar Ambil Simpati Masyarakat
23.	23 Juni 2013	KPU Tetap Coret Seluruh Caleg di Dapil
24.	24 Juni 2013	Jokowi Berpeluang Gandeng Cawapres Golkar
25.	25 Juni 2013	Soal Pencoretan Dapil, KPU Siap Buka Diri
26.	26 Juni 2013	Mahfud MD: Mundur Terus, Konvensi Partai Demokrat Belum Jelas
27.	27 Juni 2013	Survei LIPI: Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo dan Megawati
28.	28 Juni 2013	Wiranto: Hanura Tak Terpengaruh Survei
29.	29 Juni 2013	'Pramono Edhie Darah Segar bagi Demokrat'
30.	30 Juni 2013	Gabung ke Demokrat, Sinyal Pencapresan Pramono Edhie Wibowo

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan data penelitian berupa 30 teks berita media *online* ROL pada tanggal 1-30 Juni 2013, dapat ditemukan karakteristik dari penggunaan ejaan dan diksi pada tekaporol. Penggunaan variasi-variasi kalimat dan paragraf sebagai pembentuk karakteristik juga diterapkan dalam tekaporol.

Pada ejaan, terdapat temuan penggunaan tanda petik (“...”), tanda petik tunggal (‘...’) dan cetak miring yang keliru, dan penggunaannya sering terbalik dan tumpang tindih. Kata yang biasa mengalami kekeliruan dalam menggunakan tanda petik, tanda petik tunggal dan cetak miring adalah kata asing, istilah yang belum begitu dikenal masyarakat, dan kata tidak formal.

Pada tekaporol juga ditemukan beberapa kalimat yang semestinya dibubuhi tanda koma pada beberapa tempat. Dalam penelitian ini, ditemukan konjungsi antar kalimat pada beberapa kalimat yang tidak dibubuhi tanda koma setelahnya. Kalimat-kalimat dalam tekaporol banyak ditemukan menggunakan frasa atributif, berupa nama jabatan atau profesi seseorang yang diiringi oleh nama pelaku, yang merujuk pada satu orang. Peranannya sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya tanda koma digunakan setelah nama jabatan dan setelah nama aslinya itu, untuk memberikan efek penegasan kepada pembaca, namun pada tekaporol ada beberapa kalimat yang tidak ditemukan tanda koma setelah nama jabatan dan atau setelah nama asli itu. Ditemukan juga penggunaan tanda koma (,) yang sebaiknya diubah menjadi tanda titik (.), penggunaan tanda titik (.) yang sebaiknya diganti dengan tanda koma (,), dan tidak adanya tanda titik setelah nama gelar.

Selain itu, ditemukan juga penulisan yang kurang tepat dari beberapa kata dari unsur serapan. Kesalahan pengetikan pada beberapa kata juga ditemukan. Kekeliruan dalam penggabungan kata ditemukan beberapa pada

tekaporol. Kekurangtepatan penulisan huruf kapital juga ditemukan pada beberapa kata.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak banyak ditemukan penggunaan ejaan yang kurang tepat pada tekaporol. Yang menjadi khas pada penggunaan ejaan pada tekaporol adalah tidak adanya pemenggalan kata pada akhir baris, seperti biasa ditemukan pada penulisan media cetak.

Mengenai diksi, ditemukan kalimat yang rancu dan pemborosan kata pada beberapa kalimat tekaporol, meski relatif tidak banyak. Bahasa jurnalistik yang digunakan tekaporol juga memainkan peran kata bersinonim dan berkonotasi dan menggunakan diksi ungkapan asing dan istilah yang tidak umum. Penggunaan kata tidak baku ditemukan pada penulisan tuturan langsung.

Tekaporol menerapkan variasi-variasi pola penulisan kalimat. Untuk mempermudah pembaca menarik kesimpulan, penulisan subjek di awal kalimat diterapkan lebih sering dibandingkan variasi-variasi pola penulisan dengan predikat, kata modal, konjungsi dan keterangan di awal kalimat. Kalimat dengan pola predikat di awal kalimat (inversi) juga ditemukan, baik itu kalimat langsung maupun tidak langsung. Untuk kata modal, penggunaannya di dalam tekaporol dan penempatannya di awal kalimat ditemukan dengan jumlah sedikit. Hal ini dianggap wajar, karena apabila penggunaan kata modal tersebut terlalu sering, maka akan mengaburkan makna. Variasi pola kalimat dengan meletakkan kata, frasa, atau klausa keterangan di awal kalimat dapat saja dilakukan pada kalimat jurnalistik.

Seperti pada tekaporol, ditemukan beberapa kalimat yang menggunakan kata, frasa, atau klausa keterangan di awal kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian, tekaporol terlihat menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung secara berselang-seling. Dari data yang diteliti, diketahui setiap teks pada tekaporol terdiri dari kalimat-kalimat tidak langsung yang disertai kalimat-kalimat langsung. Penggunaan kalimat pasif sebagai bentuk variasi kalimat pengganti kalimat aktif yang dianggap konvensional juga diterapkan pada beberapa kalimat. Kata negasi juga digunakan dalam tekaporol. Kata-kata negasi yang ditemukan adalah kata *tidak*, *tak*, *tidaklah*, *bukan*, dan *belum*. Kata konjungsi di awal kalimat, namun bukan termasuk konjungsi penghubung antar kalimat, ditemukan pada tekaporol.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui penggunaan paragraf deduktif banyak ditemukan pada tiap teks tekaporol. Meski lebih sedikit ditemukan dibandingkan penggunaan paragraf deduktif, paragraf induktif juga digunakan dalam tekaporol. Variasi-variasi paragraf lain, seperti paragraf campuran, sebab-akibat, paragraf pertentangan, paragraf klimaks, antiklimaks, contoh, definisi, dan klasifikasi turut mewarnai tekaporol.

Hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini terkait penggunaan paragraf ialah terdapat paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat. Paragraf tersebut dianggap merupakan hasil pemisahan dari paragraf sebelum atau sesudahnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penggunaan Ejaan pada Pemberitaan Politik di ROL 1-30 Juni 2013

Penulisan bahasa jurnalistik berpedoman pada EYD. Untuk itu, wartawan atau penulis berita harus dibekali dengan kemampuan dalam menggunakan EYD dengan tepat. Pada tekaporol, kekeliruan dalam menggunakan ejaan tidak banyak ditemukan.

Secara umum EYD mengatur penggunaan huruf, penggunaan angka, penulisan kata, pemenggalan kata, penulisan kalimat dan penggunaan tanda baca, dan pedoman penyesuaian unsur/ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia (Chaer, 2010: 97).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kekurangtepatan penggunaan ejaan dalam tekaporol, yaitu pada penggunaan tanda petik (“...”), tanda petik tunggal (‘...’), tanda koma (,), dan tanda titik (.). Kekeliruan dalam menggunakan tanda petik dan tanda petik tunggal ditemukan berhubungan dengan kekeliruan penggunaan huruf cetak miring pada beberapa kalimat. ditemukan juga penulisan unsur serapan yang keliru, kesalahan dalam pengetikkan, kekeliruan dalam penggabungan kata, dan kekeliruan penggunaan huruf kapital.

a. Kekeliruan Penggunaan Ejaan berupa tanda petik (“...”), Tanda Petik Tunggal, dan Cetak Miring pada Tekaporol

Berikut ini adalah contoh temuan penggunaan tanda petik, tanda petik tunggal, dan penulisan huruf cetak miring yang kurang tepat pada tekaporol.

- (1) Konvensi itu, kata Mubarak, merupakan '**pintu**' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun tidak memiliki partai dan tidak memiliki peluang. (T. 4, P. 3, K. 3).
- (2) Kalau tidak mencapai "**electoral threshold**" mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8, K. 3).
- (3) "Karena ini merupakan pekerjaan manual, bukan kerjaan mesin, jadi sangat mungkin saja itu ada faktor '**human error**' kurang cermatan dan kealpaan," ujar Ida Budhiati di Jakarta, Jumat (14/6). (T. 14, P. 2, K. 1).
- (4) "**Gak** disiapkan untuk itu (konvensi capres Demokrat)," kata Syarif Hasan, Sabtu (29/6). (T. 29, P. 2, K. 2)

Tanda petik tunggal biasa digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Dapat pula digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing (Sugono, 2002:47; Sungguh, 2006:45). Kata *pintu* pada kalimat nomor (1) di atas merupakan suatu istilah, bukan merupakan makna dari suatu kata atau ungkapan asing. Kata *pintu* juga tidak berada dalam suatu petikan, sehingga tidak ada dasar yang membenarkan penggunaan tanda petik tunggal pada kata *pintu*.

Begitu pula halnya dengan kata *human error* pada kalimat nomor (3). Kata tersebut merupakan ungkapan asing, bukan makna ungkapan asing. Penulisan huruf miring pada kata tersebut sudah benar, karena huruf miring dipakai salah satunya untuk menuliskan ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (Sugono, 2002:10-11). Namun, sebaiknya tidak perlu menggunakan tanda petik tunggal pada kata tersebut.

Pada contoh nomor (2), ditemukan penggunaan tanda petik pada ungkapan asing *electoral threshold*. Padahal, ungkapan asing semestinya ditulis dengan huruf miring, bukan dengan tanda petik.

Penulisan bahasa non formal yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari, namun belum diserap menjadi bahasa Indonesia sama perlakuannya dengan bahasa asing, yaitu ditulis dalam huruf miring. Ada beberapa penggunaan bahasa daerah di tekaporol, yang umumnya terdapat pada kalimat langsung. Namun, ditemukan beberapa bahasa non formal yang tidak ditulis dengan cetak miring. Salah satu contohnya adalah kata *gak* pada contoh nomor (4). Dapat dilihat bahwa kata *gak* tidak ditulis dengan cetak miring pada kalimat tersebut.

Hasil klasifikasi dan interpretasi penggunaan ejaan berupa tanda petik (“...”), tanda petik tunggal, dan cetak miring pada tekaporol dapat dilihat secara lengkap pada lamp. 6, Tabel 6.1 dan 6.2.

b. Penambahan Tanda koma (,) pada Tekaporol

Penggunaan tanda koma (,) juga cukup banyak ditemukan kekeliruan. Berikut beberapa contoh kalimat yang akan dibahas.

- (5) **Tetapi** tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg. (T. 1, P. 4, K. 2).
- (6) “**Untuk itu** sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Megawati dan SBY.” (T. 2, P. 7, K. 2).
- (7) "Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah **Gita Wiryawan, Marzuki Ali dan Mahfud MD**. (T. 2, P. 4, K. 2).
- (8) **Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando** menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula. (T. 12, P. 1, K. 1).
- (9) **Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD** masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, P. 1, K. 1).

Pada contoh nomor (5), kata konjungsi *tetapi* kurang tepat dijadikan konjungsi antar kalimat. Kata konjungsi yang benar untuk menggantikannya adalah *akan tetapi*. Namun, dengan alasan kehematan kata di dalam jurnalistik, hal ini diperbolehkan, dengan catatan penulisan kata *tetapi* diiringi dengan tanda koma (,), sebagaimana karakteristik penulisan konjungsi antar kalimat lainnya. Jadi, penulisan yang lebih tepatnya adalah sebagai berikut.

(Akan) tetapi, tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg.

Kata-kata konjungsi antar kalimat lainnya pada kalimat di tekaporol juga ditemukan beberapa yang tidak diiringi oleh tanda koma (,). Pada contoh (6), konjungsi antar kalimat *untuk itu* tidak diiringi oleh tanda koma. Berikut ejaan yang tepat dari contoh (6).

“Untuk itu, sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Megawati dan SBY.”

Hasil klasifikasi dan interpretasi tentang konjungsi antar kalimat yang tidak diiringi oleh tanda koma pada tekaporol dapat dilihat secara lengkap pada lamp. 6, tabel 6.3 dan 6.4.

Terdapat beberapa penggunaan tanda koma yang kurang tepat pada kalimat-kalimat yang mengandung unsur rincian di dalamnya. Contoh nomor (7), diketahui belum tepat dalam menggunakan tanda baca, karena unsur-unsur suatu perincian pada kalimat tersebut kurang tepat dalam pembubuhan tanda koma. Seharusnya, ada pembubuhan tanda koma setelah *Marzuki Ali*, sehingga kalimat tersebut menjadi sebagai berikut.

"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali, dan Mahfud MD."

Kalimat-kalimat dalam tekaporol banyak ditemukan menggunakan nama jabatan atau profesi seseorang yang diiringi oleh nama pelaku, yang merujuk pada satu orang. Peranannya sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya tanda koma digunakan setelah nama jabatan dan setelah nama aslinya itu, untuk memberikan efek penegasan kepada pembaca. Salah satu contohnya adalah pada contoh kalimat (8) dan (9) di atas. Sebaiknya, ejaan pada kalimat tersebut diubah menjadi sebagai berikut.

Pakar komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat.

c. Penggunaan Tanda koma (,) yang sebaiknya diubah menjadi tanda titik (.) pada Tekaporol

Penulis berita diperbolehkan memecah kalimat bila diperlukan untuk membuat berita nyaman dilihat. Pada tekaporol ditemukan beberapa kalimat yang diberikan pemberhentian dengan pembubuhan tanda koma. Padahal, kalimat tersebut sangat berpotensi dipecah menjadi lebih dari satu kalimat dengan cara mengubah tanda koma pada tempat tertentu menjadi tanda titik. Berikut beberapa contohnya.

- (10)"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu, seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga kordinasi dengan Bawaslu," kata Ida. (T. 14, P. 3, K. 1).
- (11)"Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. (T. 21, P. 3, K. 1).

Contoh (10) dan (11) sebaiknya diubah menjadi sebagai berikut.

"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi, kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu. Seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga koordinasi dengan Bawaslu," kata Ida.

"Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden. Setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got. Berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486.

d. Penggunaan Tanda Titik (.) yang Sebaiknya Diganti dengan Tanda Koma (,) pada Tekaporol

Kunjungsi yang dipakai penulis berita tekaporol untuk menghubungkan antar kalimat banyak yang kurang tepat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Konjungsi tersebut biasanya berupa satu klausa, yang berpotensi untuk digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan ejaan tanda titik (.) pada kasus seperti ini, sebaiknya diganti dengan tanda koma (,). Berikut beberapa contoh temuannya.

- (12) Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai. Karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan. (T. 11, P. 3, K. 1-2).
- (13) Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. Karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi. (T. 26, P. 3, K. 3).

Contoh (12) dan (13) tersebut lebih baik diubah menjadi sebagai berikut.

Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai, karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan.

Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi, karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi.

e. Penambahan Tanda Titik (.) pada Tekaporol

- (14) Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, **Dr Kadri**. (T. 13, P. 1, K. 1).
- (15) Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas **Dr Soetomo** Surabaya, Jumat (28/6). (T. 28, P. 3, K. 1).

Pada singkatan nama gelar, seharusnya dibubuhi tanda titik setelahnya. Namun, ditemukan singkatan nama gelar yang tidak dibubuhi tanda titik setelahnya pada tekaporol, seperti contoh (14) dan (15). Berikut pembedarannya.

*Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, **Dr. Kadri**.*

Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jumat (28/6).

f. Penulisan Unsur Serapan

Ditemukan beberapa penulisan unsur serapan yang kurang tepat pada tekaporol. kata *mengiklaskan* seharusnya ditulis *mengikhlaskan*. Kata *khittah* seharusnya ditulis *khitah*. Penulisan kata *koordinasi* juga ditemukan kesalahan, karena ditulis *kordinasi*. Kata *jagat* juga mengalami kesalahan penulisan karena ditulis *jagad*. Lebih rinci lagi dapat dilihat pada hasil klasifikasi dan interpretasi di lamp. 6, tabel 6.11 dan 6.12.

g. Kesalahan Pengetikan pada Tekaporol

Meskipun media online, khususnya ROL, mengalami proses penyajian berita yang lebih singkat dibanding media cetak, tidak banyak kesalahan pengetikan yang ditemukan di tekaporol. Contohnya, pada sebuah kalimat, kata *kompensasi* salah ketik menjadi *kompesasi*. Kata *udah* pada lamp. 6, tabel 6.13, no. 2, jika melihat konteks kalimatnya bukan merujuk pada kata non formal. Jadi, ada kemungkinan terjadinya salah ketik. Padahal, maksud penulis berita sebenarnya adalah *sudah*. Lalu, kata *mendapat* ditulis menjadi *mendapau*. Kata *konstitusi* juga ada yang mengalami salah ketik, yaitu menjadi *konsttusi*. Lebih rinci lagi dapat dilihat pada lamp. 6, tabel 6.13 dan 6.14.

h. Penggabungan Kata pada Tekaporol

- (16)"Saat ini Ketua Fraksi Hanura di DPR **di jabat** oleh Syarifudin Sudding," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin melalui pesan singkat ke wartawan, Senin (3/6). (T. 3, P. 2, K. 1).
- (17)Seorang karyawan, Inda (29), menyatakan menyetujui Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden karena gubernur DKI Jakarta tersebut mau turun langsung membantu warga menengah **kebawah**. (T. 21, P. 8, K. 1).
- (18)"Kalau itu terjadi maka partai penguasa **pasca2014** adalah PDIP didukung Golkar dengan partai penyeimbang pemerintahan yang dipimpin Demokrat. (T. 24, P. 9, K. 1).

Kata yang diberi cetak tebal pada contoh nomor (16) sebaiknya tidak dipisah, karena *di* pada kata tersebut bukan merupakan kata depan, melainkan afiks. Penulisan kata *kebawah* pada contoh (17) justru harus dipisah menjadi *ke bawah*, karena *ke* berstatus sebagai kata depan. Untuk kasus nomor (18), kekeliruan penempatan tanda spasi dimungkinkan terjadi karena kesalahan dalam pengetikkan. Semestinya *pasca2014* ditulis *pasca 2014*.

i. Penulisan Huruf Kapital pada Tekaporol

Ditemukan beberapa kekeliruan dalam penulisan huruf kapital pada tekaporol. Berikut contohnya.

- (19)Jeffrie menambahkan keenam nama tokoh muda itulah yang berpeluang menjadi **Presiden** RI berikutnya. (T. 2, P. 5, K. 1).
- (20)Partai Hanura menambah daftar parpol yang kehilangan daerah pemilihan (dapil) untuk **Pemilu** legislatif DPR karena terganjal sistem "zipper" atau penempatan perempuan di setiap tiga calon. (T. 14, P. 4, K. 1).

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama

orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Akan tetapi, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Jadi, huruf pertama pada kata *Presiden* pada contoh (19) seharusnya ditulis bukan dengan huruf kapital, menjadi *presiden*.

Menurut buku *Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Jadi, Huruf pertama pada kata bercetak tebal pada contoh (22) seharusnya juga ditulis bukan dengan huruf kapital, sehingga lebih tepatnya adalah *pemilu*.

j. Pemenggalan Kata pada Tekaporol

Pada teks media cetak, sering dijumpai pemenggalan kata di akhir baris. Tujuannya adalah untuk memadatkan penggunaan ruang. Akan tetapi, hal seperti itu tidak akan ditemui pada teks berita media online, khususnya pada ROL.

Pada tekaporol, tidak ditemukan pemenggalan kata di akhir baris. tekaporol menggunakan format rata kiri, sehingga bagian kanan tidak beraturan dan tidak ada upaya memadatkan akhir baris atau bagian kanan ini dengan kata.

4.2.2 Analisis Penggunaan Diksi pada Pemberitaan Politik di ROL 1-30

Juni 2013

a. Kalimat yang Rancu pada Tekaporol

Menurut Keraf (dalam Sumandiria, 2006:29), pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat diterima atau tidak. Sumandiria (2006:34) juga mengatakan bahwa penerapan hemat kata pada ragam bahasa jurnalistik tentunya tidak merubah makna, bahkan menjadi ambigu. Dalam bahasa jurnalistik, setiap kata harus memiliki makna.

Dalam tekaporol, ditemukan kalimat-kalimat dengan pilihan konjungsi yang kurang tepat. Kalimat tersebut menjadi membingungkan dan aneh bila dibaca dengan hati-hati, meskipun pembaca bisa tetap memahami maksud yang ingin disampaikan penulis berita. Berikut disajikan beberapa contoh temuan.

- (1) Ia menuturkan, konsep utama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pencalonan, **yakni** memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendasar buat seluruh bangsa **adalah** masalah perut. (T. 9, P. 7, K.1).
- (2) Heri mengusulkan, **jika** benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, **sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan** salah satu cara yang paling ampuh. (T. 15, P. 4, K. 1).
- (3) Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, **tapi** bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. (T. 30, P. 3, K.2).

Konjungsi *yakni*, *yaitu*, dan *adalah* merupakan konjungsi yang bersinonim. Namun, menurut Sumandiria (2006:30). tidak semua kata yang bersinonim itu dapat saling menggantikan. Pada contoh nomor (1), dapat dilihat bahwa menggunakan konjungsi *yakni* dan *adalah* membuat kalimat

tersebut menjadi rancu. Akan lebih baik jika penggunaan kedua konjungsi tersebut bertukar posisi, sehingga kalimat tersebut menjadi sesuai dengan makna yang dimaksud. Berikut perubahannya.

Ia menuturkan, konsep utama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pencalonan adalah memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendasar buat seluruh bangsa yakni masalah perut.

kalimat pada contoh nomor (2) juga mengalami kerancuan makna akibat kesalahan pemilihan konjungsi. Penempatan susunan kata juga berperan dalam menciptakan kerancuan kalimat ini. Kalimat tersebut sebaiknya ditulis diantaranya sebagai berikut.

Heri mengusulkan, jika PKS benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, maka keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh.

Contoh nomor (3) memperlihatkan penggunaan konjungsi tapi yang kurang sesuai. Tapi atau tetapi digunakan untuk menunjukkan pertentangan antar klausa. Padahal, klausa yang diikuti oleh konjungsi tapi merupakan klausa yang berisi keterangan tujuan dari klausa sebelumnya, sehingga tapi lebih cocok bila diganti dengan agar. Berikut saran perbaikannya.

Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, agar bisa berkompetisi tanpa melanggar konstitusi.

Temuan kalimat-kalimat yang rancu pada tekaporol dapat dilihat secara lengkap pada hasil klasifikasi dan interpretasi pada lamp. 8, tabel 8.1 dan 8.2.

b. Pemborosan Kata pada Tekaporol

Kehematan kata juga merupakan salah satu ciri bahasa jurnalistik. Hal ini sejalan dengan penuturan Chaer (2010:49), bahwa kalimat jurnalistik memiliki beberapa prinsip yang mengarah pada kehematan penggunaan kata, yaitu ringkas, padat, dan sederhana. Ringkas, berarti kalimat-kalimat yang dibuat tidak banyak menggunakan kata-kata. Padat, berarti kata-kata yang digunakan dalam kalimat tidak merupakan hal yang sia-sia atau tidak berarti. Lalu, dengan prinsip sederhana berarti kalimat yang digunakan kalimat yang memiliki pola sederhana.

Ditemukan beberapa kalimat yang dapat dipadatkan dengan menghilangkan kata-kata yang diulang atau kata yang bersinonim. Berikut akan dibahas beberapa contohnya.

- (4) Kedepannya, kata dia, ada baiknya koalisi **yang** dibentuk dengan lebih sedikit partai, sehingga memudahkan dalam melakukan kebijakan dan kontrol. (T. 26, P. 14, K. 1).
- (5) Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem **sebagus apapun** dan undang-undang **sebaik apapun** sulit untuk diimplementasikan. (T. 9, P. 8, K. 1).

Pada nomor (4), Konjungsi *yang* menimbulkan kerancuan dalam kalimat tersebut. kalimat tersebut menjadi tidak memiliki predikat. Ada baiknya bila konjungsi *yang* pada kalimat tersebut dihilangkan, sehingga menjadi kalimat sebagai berikut.

Kedepannya, kata dia, ada baiknya koalisi dibentuk dengan lebih sedikit partai, sehingga memudahkan dalam melakukan kebijakan dan kontrol.

Pada Contoh (5), terdapat kata yang penulis beri cetak tebal. Kata *sebagus apapun* dan *sebaik apapun* merupakan kata yang bersinonim. Meringkas kalimat ini dengan menghilangkan satu penggunaan kata tersebut akan membuat kalimat ini menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip penggunaan bahasa jurnalistik. Berikut usulan pergantiannya.

Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan.

c. Diksi yang Berkaitan dengan Kata Bersinonim dan Bernilai Rasa

Bahasa jurnalistik juga kerap bersinggungan dengan kata bersinonim dan bernilai rasa (konotasi). Tidak terkecuali bahasa jurnalistik yang digunakan tekaporol. Berikut ditampilkan beberapa contoh dari hasil penelitian mengenai kata-kata bersinonim dan bernilai rasa pada tekaporol.

- (6) Menurut Jeffrie, kedua negarawan itu layak mendapat apresiasi karena telah **mengiklaskan** partainya melahirkan generasi baru untuk suksesi 2014 yang akan datang. (T. 2, P. 8, K. 1).
- (7) “Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki **kendaraan** serta tidak ada peluang.” (T. 4, P. 4, K. 2).
- (8) Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan **berkah** dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2, K. 2).
- (9) Pasalnya, rakyat sudah semakin cerdas menilai **sepak terjang** partai dan politisi di jagad politik. (T. 16, P. 9, K. 2).

Nomor (6), kata *mengikhlaskan* adalah diksi yang cenderung lebih religius dibandingkan kata dengan makna yang sama, yaitu *merelakan*. Kata ini memberikan kesan bahwa tindakan SBY dan megawati ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan semua orang yang berada di posisi seperti mereka.

Sebagai penggambaran bahwa hal tersebut bukan hal yang biasa, maka penulis berita tidak menggunakan kata *merelakan* untuk mengganti kata *mengikhlaskan*. Hal ini sesuai dengan penuturan Dewabrata (2006:163), bahwa kata-kata bersinonim itu masing-masing akan membawa kesan yang berbeda. Dalam konteks jurnalisme, misi yang dibawa tiap kata itu berbeda.

Pada contoh nomor (7), kata *kendaraan* bukan bermakna sebagaimana umumnya, yaitu alat transportasi untuk membawa atau mengantarkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. *Kendaraan* disitu juga menjadi alat untuk membawa orang, tapi dalam makna yang abstrak. *Kendaraan* yang dimaksud dapat membawa dan mengantarkan orang untuk dapat mengikuti pencalonan presiden dengan masuk ke dalamnya. *Kendaraan* yang dimaksud adalah *partai politik*. Ada makna kias di dalam makna *kendaraan*, sehingga kata *kendaraan* dan *partai politik* menjadi bersinonim.

Contoh (8) ini sama hampir sama seperti nomor (6), yaitu, sama-sama menggunakan kata dengan konotasi ke arah religi. Bedanya, kata *berkah* pada kalimat tersebut justru terkesan “mengejek”, bukan memberikan nuansa yang lebih tinggi. Jika penulis berita memilih kata yang berkonotasi netral, maka nuansa “mengejek” tersebut tidak akan muncul.

Makna dari kata *berkah* adalah karunia atau pemberian dari Tuhan. Penggunaan kata *berkah* pada kalimat tersebut bermakna “keuntungan yang didapat PKS”. Akan tetapi, “keuntungan” itu dirasa tidak pantas untuk didapat, sebagai akibat dari perbuatan PKS yang menyalahi komitmen

berkoalisi. Kata *berkah* mengesankan “ketidaktahudirian” PKS, sebagai misi yang dibawa oleh penulis berita.

Kata *sepak terjang* pada kalimat (9) biasa dipakai sebagai konotasi dari “aksi dan perbuatan” kelompok penjahat, seperti perampok, mavia, atau teroris. Akan tetapi, kata *sepak terjang* justru digunakan penulis berita sebagai konotasi dari “aksi dan perbuatan” partai dan politisi. Itu artinya, ada kesan ketidakberpihakan penulis berita kepada perbuatan-perbuatan partai dan politisi secara umum.

d. Diksi Ungkapan Asing dan Istilah yang Tidak Umum

Dalam bahasa jurnalistik, kata asing dan istilah ilmiah yang terlalu teknis tidak digunakan. Kalau terpaksa digunakan, maka harus dijelaskan (Chaer, 2010:4). Pada tekaporol, teori ini telah diterapkan. Kata-kata asing dan istilah yang belum umum beredar di masyarakat akan diberikan penjelasan. Akan tetapi tidak semua kata asing tersebut disertai penjelasan di dalam teks tersbut, sehingga akan menyulitkan pembaca memahami makna dari kata tersebut. namun, kata asing tanpa keterangan penjelasan tersebut hanya sedikit ditemukan. Dari hasil penelitian, sebagian besar kata asing pada tekaporol disertai dengan keterangan penjelasannya.

Contoh hasil temuan dari penggunaan kata asing yang disertai keterangan penjelasan dan contoh kata asing yang tidak disertai penjelasan adalah sebagai berikut.

- (10) Ia menyebut harus ada perjanjian yang lebih *rigid* (keras), di samping aturan main untuk membentuk kesepakatan, sehingga perselisihan pun bisa dihindari. (T. 7, P. 3, K. 2).
- (11) Kalau tidak mencapai "electoral threshold" mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8, K. 3).

Pada contoh nomor (10) di atas, terdapat penggunaan kata asing *rigid*. Kata tersebut disertai dengan penjelasan sesudahnya di dalam tanda kurung, yaitu "keras". Ada juga beberapa kalimat yang mendapatkan penjelasan dengan variasi berbeda. Ada yang diberikan penjelasan berupa satu kalimat atau lebih, ada juga yang langsung dijelaskan dengan pembubuhan kata atau setelah kata asing. Variasi-variasi keterangan penjelasan untuk kata-kata asing pada tekaporol dapat secara lengkap dilihat di lamp. 8, tabel 8.7 dan 8.8.

Dari 30 teks berita yang dijadikan sampel penelitian, hanya ditemukan satu contoh penggunaan kata asing yang tidak disertai keterangan penjelasan, yaitu pada contoh nomor (11) di atas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum teks tekaporol sudah menerapkan teori penambahan keterangan penjas untuk setiap kata-kata asing yang dipakai.

e. Diksi Ungkapan Asing dan Istilah yang Tidak Umum

Bahasa jurnalistik tunduk pada bahasa baku atau bahasa formal (Sumandiria, 2006:7). Pada kalimat-kalimat tidak langsung, tidak ditemukan kata-kata yang tidak baku. Akan tetapi, pada tekaporol masih ditemukan kata tidak baku pada kalimat langsung. Hal ini wajar, sebagai upaya pengukuhan karakter dari narasumber dan menjaga keutuhan dari kali tuturan langsung

yang disampaikan narasumber. Berikut satu contoh kalimat tidak baku atau tidak formal yang ditemukan pada tekaporol.

(12) “**Gak** disiapkan untuk itu (konvensi capres Demokrat),” kata Syarief Hasan, Sabtu (29/6). (T. 29, P. 2, K. 2).

Kata *gak* tidak ditemukan pada tata bahasa baku. Kata *gak* merupakan bahasa daerah dialek Jakarta. Meskipun penggunaannya telah memasyarakat, namun kata tersebut digolongkan ke dalam kata bahasa tidak formal atau tidak baku.

Tuturan langsung juga rentan terhadap kesalahan tafsir atau kerancuan makna, apabila dijadikan tulisan berupa kalimat langsung. Konteks yang mengiringi penuturan tersebut harus dijelaskan oleh wartawan kepada pembaca. Pada lamp. 8, tabel 8.9, dapat dilihat penambahan keterangan pada kalimat langsung, untuk membantu pembaca memahami konteks kalimat tersebut.

4.2.3 Analisis Penggunaan Kalimat pada Pemberitaan Politik di ROL 1-30 Juni 2013

Munculnya variasi-variasi kalimat jurnalistik dipakai untuk meningkatkan daya tarik tulisan. Hal ini dikarenakan bahasa jurnalistik merupakan proses kreatif, begitu sarat dengan diksi dan unsur kreasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kejemuhan pembaca dan menarik perhatian pembaca.

Berdasarkan hasil interpretasi diketahui bahwa variasi kalimat dengan penempatan subjek di awal kalimat lebih banyak digunakan daripada variasi predikat, kata modal, dan keterangan di awal kalimat. Penggunaan kalimat langsung banyak ditemukan dalam tekaporol dan penggunaannya berselang-seling dengan kalimat tidak langsung. Penggunaan kalimat aktif lebih banyak digunakan daripada kalimat pasif. Berikut pembahasannya.

a. Penggunaan Subjek di Awal Kalimat

Penempatan subjek di awal kalimat paling banyak ditemui pada kalimat-kalimat di tekaporol dibandingkan penempatan predikat, kata modal, dan keterangan di awal kalimat. Penempatan subjek di awal kalimat ini dapat berupa kata, dapat juga berupa frasa. Pola penempatan subjek di awal kalimat merupakan pola penulisan kalimat yang konvensional. Menurut Sumandiria (2006:63), dengan menempatkan subjek pada awal kalimat, maka pembaca akan mudah menangkap pengertian dan menarik kesimpulan.

Berikut akan ditampilkan contoh-contoh variasi penulisan kalimat dengan menempatkan subjek di awal kalimat.

- (1) Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan meski banyak diunggulkan, sosok Joko Widodo masih perlu diuji. (T. 1, P. 1, K. 1).
- (2) Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengungkapkan, dorongan untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi memang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (T. 1, P. 4, K. 1).

Dari contoh (1) dan (2) dapat kita lihat bahwa penempatan subjek pada awal kalimat dianggap penting untuk memberikan informasi kepada pembaca di awal kalimat mengenai tokoh yang dibicarakan. Pasalnya, kedua

contoh tersebut menampilkan subjek berupa nama dan dan atau jabatan tokoh, yaitu *Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu*. Hal ini dianggap penting dilakukan wartawan untuk menarik perhatian pembaca melalui penempatan nama dan jabatan narasumber atau tokoh yang dibicarakan. Wartawan memberikan skemata dan konteks pembicaraan melalui informasi siapa tokoh yang menjadi narasumber atau yang dibicarakan, sebelum membaca isi bacaan selanjutnya. Hal ini juga diperkirakan dapat menambah ketertarikan tersendiri bagi pembacanya untuk ingin melanjutkan bacaan atau tidak. Penempatan nama tokoh dan atau jabatan tokoh sebagai subjek banyak ditemukan pada kalimat tekaporol.

Selain itu, terdapat juga beberapa contoh penempatan subjek di awal kalimat seperti berikut.

- (3) ***Hal itu*** dibuktikan dengan pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengatakan bahwa Megawati menginginkan capres muda untuk 2014. (T. 2, P. 3, K. 1).

Subjek seperti nomor (3) berperan sebagai kata ganti hal yang dibicarakan sebelumnya. Untuk membuat kalimat menjadi efektif, maka penghematan kata seperti ini dilakukan oleh wartawan.

- (4) ***Konvensi itu***, kata Mubarak, merupakan 'pintu' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun tidak memiliki partai dan tidak memiliki peluang. (T. 4, P. 3, K. 3).
- (5) ***Yang jelas***, kata Imam, persoalan kepada figur yang mana nanti dukungan PKB akan diarahkan, baru diputuskan setelah pemilihan anggota legislatif. (T. 5, P. 6, K. 1).
- (6) ***Jawa Timur***, kata dia, merupakan provinsi terpenting di Tanah Air. (T. 6, P. 5, K. 1).

Pada contoh (4), (5), dan (6), subjek di awal kalimat merupakan sesuatu yang ditekankan, namun selain orang. Nomor (4) menekankan kata *konvensi*, yaitu suatu kebijakan Partai Demokrat dalam merekrut bakal calon presiden. Subjek pada contoh nomor (5) memberikan penegasan pada kata-kata selanjutnya. Sementara contoh subjek pada contoh nomor (6) memberikan penekanan pada *Jawa Timur*, sebagai sorotan atau yang ditekankan.

Kalimat-kalimat pada tekaporol dengan pola penempatan subjek di awal kalimat dapat dilihat secara lengkap di lamp. 10, tabel 10.1.

b. Penggunaan Predikat di Awal Kalimat

Penempatan predikat di awal kalimat adalah pola yang tidak konvensional. Namun, bahasa jurnalistik memperbolehkan penyusun berita untuk menempuh cara nonkonvensional sejauh tidak bertentangan dengan kaidah bahasa baku. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan, karena bahasa jurnalistik bukan bahasa yang monoton dan kaku. Salah satu pilihan adalah menempatkan predikat pada awal kalimat (Sumandiria, 2006:64).

Pada tekaporol, ditemukan cukup banyak kalimat dengan pola inversi atau predikat di awal kalimat. Berikut diuraikan beberapa contoh yang mewakili variasi kalimat berupa penggunaan predikat di awal kalimat pada Tekaporol.

- (7) ***Terbukti*** dengan gugurnya empat partai di tujuh daerah pemilihan. (T. 11, P. 1, K. 1).

- (8) **Dikatakan**, partai politik yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat di beberapa dapil, bisa mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu. (T. 25, P. 5, K. 2).

Kalimat nomor (7) dan (8) merupakan kalimat inversi yang subjeknya dilesapkan, sehingga, predikat menjadi berada di awal kalimat. Hal ini bertujuan untuk menghemat kata dan menghilangkan kata, dan subjek pada kalimat-kalimat tersebut dianggap tidak penting untuk ditampilkan.

Kalimat langsung merupakan kutipan dari tuturan langsung narasumber. Artinya, penulis berita tidak dapat seenaknya membolak-balik pernyataan dari narasumber, agar dapat memaparkan keaslian informasi kepada pembaca. Akan tetapi, penggunaan kalimat inversi yang ditemukan pada kalimat langsung cukup memberi kontribusi variasi pola penyusunan kalimat tekaporol. berikut contoh dari kalimat langsung yang menggunakan pola inversi.

- (9) "**Seolah-olah menolak** tapi dalam praktik lanjutannya PKS akan saling mengakomodasi," katanya. (T. 16, P. 8, K. 2).
(10) "**Sangat berbahaya** jika para mahasiswa bersikap apatis dalam pemilu sebab masa depan bangsa ditentukan oleh pemilu," katanya di Jakarta, Selasa, (18/6). (T. 18, P. 2, K. 1).

Kalimat (9) dan (10) masing-masing memiliki predikat *seolah-olah menolak* dan *sangat berbahaya*. Penempatan predikat di awal kalimat menjadikan kalimat-kalimat tersebut sebagai kalimat inversi. Subjek pada kalimat-kalimat tersebut tidak ada.

c. Penggunaan Kata Modal di Awal Kalimat

Menurut sumandiria (2006:64), penulisan kata modal pada kalimat jurnalistik tidak boleh terlalu sering. Jika digunakan terlalu sering, dikhawatirkan akan melemahkan dan mengaburkan makna. Kata modal bisa menegaskan suatu hal, tetapi bisa juga membuatnya menjadi samar, tidak jelas, dan abu-abu.

Penempatan kata modal di awal kalimat pada tekaporol ditemukan dengan jumlah yang sedikit. Dari data yang diteliti, hanya 6 kalimat yang ditemukan menggunakan kata modal di awal kalimat. Berikut contoh penggunaan kata modal pada awal kalimat di tekaporol.

- (11) *Harusnya*, penghubung itu bisa memaksimalkan komunikasi dengan KPU. (T. 11, P. 5, K. 2).
- (12) *Memang*, sambungnya, jumlah caleg yang gugur secara nasional tidak terlalu banyak. (T. 11, P. 6, K. 1).
- (13) *Sebenarnya*, lanjut Mahfud, gagasan sistem *primary election* yang digagas Demokrat sangat brilian. (T. 26, P. 3, K. 1).

Keberadaan kata modal pada contoh (11), (12), dan (13), dapat memberikan tingkat penegasan pada kata-kata setelahnya.

d. Penggunaan Keterangan di Awal Kalimat

Variasi pola kalimat dengan meletakkan kata, frasa, atau klausa keterangan di awal kalimat dapat saja dilakukan pada kalimat jurnalistik, seperti pada tekaporol, ditemukan beberapa kalimat yang menggunakan kata, frasa, atau klausa keterangan di awal kalimat.

- (14) *Usai peresmian memorial HM Soeharto di Kemusuk, Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Wiranto mengatakan Partai Hanura tidak akan main-main menghadapi Pemilu 2014. (T. 8, P. 2, K.1).
- (15) *Bagi Nasdem*, kata dia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sangat menentukan perolehan suara dalam Pemilu 2014. (T. 19, P. 3, K. 1).
- (16) *Sejak lama* dia sudah membaca gambar-gambar PKS menolak kenaikan harga BBM hanya strategi pencitraan publik. (T. 16, P. 5, K. 2).
- (17) *Menurut dia*, selain melalui konvensi capres Partai Demokrat, capres dari generasi baru juga akan hadir dari lingkungan PDI Perjuangan. (T. 2, P. 3, K. 1).
- (18) *Menurut Jeffrie*, kedua negarawan itu layak mendapat apresiasi karena telah mengiklaskan partainya melahirkan generasi baru untuk suksesi 2014 yang akan datang. (T. 2, P. 8, K. 1).

Pada kalimat jurnalistik, untuk memberikan variasi, pola penyusunan kalimat seperti apapun bisa saja dilakukan, termasuk meletakkan kata atau frasa keterangan di awal kalimat. Pada contoh nomor (14), (15), dan (16), dapat dilihat penggunaan pola kalimat dengan keterangan di awal kalimat.

Kalimat (17) dan (18) merupakan contoh dari kalimat yang meletakkan frasa keterangan dengan preposisi *menurut*. Pada tekaporol, preposisi *menurut* cukup banyak ditemukan.

Penggunaan keterangan yang berbentuk klausa pun juga ditemukan pada kalimat tekaporol. Berikut beberapa contohnya.

- (19) Untuk mencapai perubahan ini, katanya, moral politik harus dikedepankan. (T. 19, P. 9, K. 1).
- (20) Menurut survei yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi menjadi kandidat presiden yang paling diminati oleh responden. (T. 21, P. 6, K. 1).

Penempatan kata tertentu di awal kalimat bertujuan untuk memberikan penegasan dan penekanan terhadap kata yang diletakkan di awal kalimat itu. Selain itu, dapat juga menjadi variasi penyusunan kalimat. Hal ini sesuai dengan karakteristik kalimat jurnalistik yang mempertimbangkan kemenarikan dan menghindari kebosanan pembaca, dengan memberikan variasi-variasi kalimat selain bentuk pola kalimat yang konvensional.

e. Penggunaan Kalimat Langsung dan Kalimat Tidak Langsung

Kalimat langsung dan tidak langsung hendaklah digunakan secara berselang seling, untuk menciptakan kemenarikan. Hal ini sejalan dengan penuturan Sumandiria (2006:67), bahwa jika banyak menyajikan kalimat petikan langsung, sebaiknya divariasikan dengan kalimat-kalimat langsung. Kalimat langsung dapat menjadi penguat mengenai apa yang dituliskan wartawan pada kalimat tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, tekaporol terlihat menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung secara berselang-seling. Dari data yang diteliti, diketahui setiap teks pada tekaporol terdiri dari kalimat-kalimat tidak langsung yang disertai kalimat-kalimat langsung.

Berikut adalah contoh penggunaan kalimat langsung yang selingi dengan kalimat tidak langsung pada T. 18.

- (21) Ketua PP Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) Muhammad Pradana Indraputra menyerukan agar mahasiswa tidak menjadi golongan putih alias golput dalam berbagai pemilu di Indonesia termasuk pilpres.

- (22) "Sangat berbahaya jika para mahasiswa bersikap apatis dalam pemilu sebab masa depan bangsa ditentukan oleh pemilu," katanya di Jakarta, Selasa, (18/6).
- (23) Menurutnya, saat ini mahasiswa sudah banyak yang tidak peduli dengan politik. Ini merupakan cerminan awal kerusakan generasi baru di Tanah Air.
- (24) "Siapa yang akan memimpin bangsa jika mahasiswa sudah tidak peduli dengan politik dan pemerintahan," ujar Dana.
- (25) Dana mengatakan memang benar bahwa saat ini banyak politisi yang busuk dan korupsi, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif.
- (26) Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membersihkan korupsi dari dalam dengan ikut pemilu dan tidak bersikap apatis.
- (27) "Kalau apatis, bahayanya malah yang terburuk terpilih di antara yang buruk, ini mengerikan," kata Dana.
- (28) Kesadaran berpolitik dan bernegara di kalangan mahasiswa harus digalakkan.
- (29) Misalnya, kampus-kampus melakukan kajian politik dan kebangsaan secara rutin.

Pada contoh di atas, kalimat-kalimat disusun dari kalimat tidak langsung pada nomor (24), (26), (28), (29), (31), dan (32), sedangkan kalimat langsung dapat dilihat pada nomor (25), (27), dan (30). Kalimat langsung digunakan untuk memperlihatkan ucapan asli dari narasumber agar meningkatkan daya yakin pembaca dan untuk kevariasian, agar pembaca terhindar dari kejenuhan saat membaca. Pada tekaporol menerapkan variasi selang seling kalimat tidak langsung pada teks-teks beritanya. Pada lampiran 10, 10.1, dapat ditinjau penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung yang berselang seling pada tekaporol.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui adanya penggunaan kalimat langsung yang porsinya dirasa lebih banyak dibandingkan penggunaannya pada teks berita yang biasa ditemui di media cetak. Maka diri

itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan tanda baca berupa tanda petik (“...”) sering terlihat pada tekaporol.

f. Penggunaan Kalimat Pasif

Bahasa jurnalistik lebih mendahulukan kalimat aktif. Akan tetapi, kalimat-kalimat pada paragraf jurnalistik akan terasa membosankan apabila semuanya menggunakan kalimat aktif. Dalam beberapa hal, kalimat pasif mampu memberi tekanan makna dan nuansa rasa yang lebih kuat dibandingkan dengan kalimat aktif (Sumandiria, 2006).

Berikut contoh kalimat pasif yang ditemukan pada tekaporol.

- (30) Hal itu *dibuktikan* dengan pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengatakan bahwa Megawati menginginkan capres muda untuk 2014. (T. 2, P. 3, K. 1).
- (31) "Semua capres dari partai politik yang ada *diragukan* dan tidak ada satu pun yang diunggulkan. (T. 4, P. 2, K. 1).
- (32) Sebelumnya, Bawaslu optimis sengketa pemilu terkait pencoretan dapil bisa *diselesaikan* dengan mediasi saja. (T. 25, P. 5, K. 1).

Pada kalimat diatas, dapat kita lihat variasi kalimat dengan menggunakan kalimat pasif. Di samping untuk memberikan bentuk variasi kalimat dan usaha menghindari kejenuhan pembaca, hal ini juga untuk memberikan penekanan terhadap bagian tataran sintaksis yang ditaruh di bagian depan akibat proses perubahan kalimat menjadi kalimat pasif ini.

Pemberian penekanan terhadap bagian informasi tertentu pada suatu kalimat tergantung pada selera wartawan masing-masing (Sarwoko, 2007). Pada contoh no (32), apabila kita ubah menjadi kalimat aktif, maka akan berbunyi seperti ini:

Sebelumnya, Bawaslu optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu terkait pencoretan dapil dengan mediasi saja.

Namun, diperkirakan wartawan mempunyai pertimbangan tertentu dengan mengubahnya menjadi kalimat pasif, yaitu untuk sekadar memberikan variasi, dan atau sebagai bentuk penekanan dan bagian informasi yang menjadi sorotan, yaitu *masalah sengketa pemilu terkait pencoretan dapil*.

g. Penggunaan Kata Negasi

Kata negasi adalah kata yang mengandung unsur penyangkalan atau penolakan. Kata negasi disebut juga kata negatif. Ciri utama kata negasi atau kata negatif pada kalimat jurnalistik ialah penggunaan kata *tak, tidak, bukan*. Sesuai dengan konteksnya, kata negatif dapat memberi penguatan makna serta nilai sosial yang terdapat dalam kalimat (Sumandiria, 2006:68).

Khusus kata *tidak*, supaya tidak menimbulkan kebingungan, sebaiknya ditaruh paling dekat dengan kata yang dinegasikan. Pada prinsipnya yang dinegasikan oleh kata *tidak* adalah kata terdekat di belakangnya.

Berikut contoh penggunaan kata negasi *tidak* pada kalimat di tekaporol.

- (33) Namun dia ***tidak menjelaskan*** lebih jauh perihal rotasi di MPR. (T. 1, P. 4, K. 2).
- (34) Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki kendaraan serta ***tidak ada*** peluang.” (T. 13, P. 2, K. 1).
- (35) "Dari awal, khittah Muhammadiyah sudah jelas dan ***tidak mau*** terjebak dalam kekuasaan politik tertentu.” (T. 6, P. 4, K. 3).
- (36) "Sampai saat ini ***tidak ada pendekatan*** ke partai lain dan belum saatnya untuk bicara soal pasangan," katanya. (T. 9, P. 9, K. 2).

Kata negasi pada contoh kalimat nomor (33) dan (34) terletak berdekatan dengan kata yang dinegasikan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya salah tafsir. Kata *tidak* pada contoh (33) menegaskan *perihal rotasi di MPR*, dan kata *tidak* pada nomor (34) menegaskan kata *peluang*.

Penggunaan kata negasi *tidak* pada kalimat langsung juga ditemukan pada tekaporol. contohnya dapat dilihat pada nomor (35) dan (36).

Sebagian besar kalimat dengan kata negasi *tidak* pada tekaporol terletak berdekatan pada kata yang dinegasikan. dengan demikian, kejadian salah tafsir terhadap hal yang dinegasikan menjadi berkurang. Akan tetapi, masih ada ditemukan satu contoh peletakkan kata tidak yang berpeluang menimbulkan salah tafsir. Berikut akan ditampilkan contoh kalimat tersebut.

(37) Menurut dia, kaum muda ***tidak hanya berorientasi pada hiburan saja*** tetapi mereka memikirkan masa depan mereka dan itu adalah aspirasi yang harus didengar kandidat. (T. 18, P. 1, K. 1).

Meskipun kalimat tersebut komunikatif, alangkah baiknya jika penempatan kata negasinya diubah menjadi seperti berikut ini.

Menurut dia, kaum muda berorientasi tidak hanya pada hiburan saja tetapi mereka memikirkan masa depan mereka dan itu adalah aspirasi yang harus didengar kandidat.

Kata negasi *tak* memiliki kesamaan makna dengan *tidak*. *Tak* adalah variasi dari kata *tidak*. Berbeda dengan kata negasi bukan dan belum. Meskipun sama-sama kata *negasi*, kata *bukan* dan *belum* memiliki makna yang berbeda dalam penggunaannya di dalam sebuah kalimat.

Kata negasi tak juga digunakan dalam tekaporol. Berikut contohnya.

- (38)Konvensi ***tidak diadakan*** untuk mencari figur pemimpin terbaik melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga. (T. 30, P. 4, K. 3).
- (39)Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika ***tak menggandeng Demokrat dan Gerindra***. (T. 24, P. 1, K. 1).

Kalimat pada contoh (38) dan (39) di atas memiliki letak kata negasi *tak* yang berdekatan dengan kata yang dinegasikan. pada nomor (38), kata *tak* digunakan untuk menegaskan *untuk mencari figur pemimpin terbaik*, sedangkan pada nomor (39), kata *tak* menegaskan *menggandeng Demokrat dan Gerindra*.

- (40)“Masak mengorbankan dapil, ***tak berkeadilan***,” ujarnya, Selasa (25/6). (T. 25, P. 14, K. 2).
- (41)“Kehendak SBY menjadi Pramono sebagai capres sudah ***tak terbendung***,” ujarnya. (T. 30, P. 4, K. 3).

Pada tekaporol, Kata *tak* juga terlihat pada kalimat langsung. Conohnya pada kalimat nomor (40) dan (41) di atas.

Selain kata negasi *tak*, kata negasi *tidaklah* juga merupakan variasi dari kata *tidak*. Ditemukan kalimat dengan menggunakan negasi ini pada tekaporol.

- (42)Peluang Marzuki mendapat restu SBY di konvensi capres Demokrat ***tidaklah*** sebesar Pramono. (T. 30, P. 3, K. 1).

Kata negasi *bukan* dan *belum* juga digunakan pada beberapa kalimat pada tekaporol. berikut akan ditampilkan beberapa contohnya.

(43) Kadri berkata, seharusnya parpol menawarkan program, *bukan* membeli suara. (T. 13, P. 4, K. 1).

(44) Pasalnya, *belum ada kejelasan waktu* dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. (T. 26, P. 2, K. 1).

Hasil klasifikasi dan interpretasi kalimat-kalimat pada tekaporol yang menggunakan kata negasi dapat dilihat secara lengkap pada lamp. 10, tabel 10.3 dan 10.4.

h. Penggunaan Konjungsi Antar Kalimat

Kata konjungsi yang terletak di awal kalimat banyak ditemukan pada tekaporol. Namun, beberapa kata konjungsi di awal kalimat tersebut dirasa kurang tepat. Dengan adanya konjungsi-konjungsi tersebut, kalimat-kalimat tersebut lebih tepat menjadi klausa yang digabung dengan kalimat sebelumnya.

Ditemukan beberapa kalimat semacam ini pada tekaporol. Berikut akan dibahas beberapa contohnya.

(45) Tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg. (T. 1, P. 4, K. 2).

Kata konjungsi *tetapi* pada kalimat tersebut kurang tepat. Apabila penulis berita ingin membuat konjungsi antar kalimat, akan lebih tepat jika diberi tanda koma (,) setelah kata *tetapi*. Lebih baik lagi jika di depan kata *tetapi* ditambah kata *akan*. Namun, ada alternatif lain yang juga dapat dilakukan untuk membuat struktur kalimat tersebut menjadi tepat, yaitu dengan menggabungkannya pada kalimat sebelumnya. Berikut saran perubahannya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengungkapkan, dorongan untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi memang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg.

Beberapa kalimat langsung pada tekaporol juga ditemukan kasus serupa. Berikut akan dibahas satu contoh.

(46) "Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 2, K. 2).

Akan lebih baik jika kalimat tersebut digabung dengan kalimat sebelumnya. Saran perbaikannya adalah sebagai berikut.

"Namun, tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6).

Klasifikasi dan interpretasi penggunaan konjungsi pada awal kalimat yang menjadikan kalimat tersebut sebaiknya digabung dengan kalimat sebelumnya dapat dilihat lebih lengkap pada lamp. 10, tabel 10.5 dan 10.6.

4.2.4 Analisis Penggunaan Paragraf pada Pemberitaan Politik di ROL 1-30 Juni 2013

a. Paragraf Deduktif

Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama disusul dengan penjelasan atau uraian secara lebih rinci dengan mengikuti pola urutan pesan dari umum ke khusus. Gagasan utama dalam paragraf tersebut diletakkan pada kalimat utama, sehingga dapat memberi gambaran bagi pembaca mengenai isi paragraf sebelum membaca secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, diketahui penggunaan paragraf deduktif lebih banyak ditemukan pada tiap teks Tekaporol dibandingkan jenis paragraf lainnya. Di bawah ini contoh paragraf deduktif yang terdapat dalam Tekaporol.

- (1) Menurut dia, selain melalui konvensi capres Partai Demokrat, capres dari generasi baru juga akan hadir dari lingkungan PDI Perjuangan. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengatakan bahwa Megawati menginginkan capres muda untuk 2014. (T. 2, P. 3).
- (2) Ia mengaku sangat optimis anak-anak muda dapat mengambil peran dan kesempatan itu. Menurut dia, hal itu sudah terlihat dari kepemimpinan di beberapa daerah yang dipimpin oleh anak-anak muda, baik itu di badan eksekutif, maupun legislatif. (T. 2, P. 11).

Kalimat pertama pada nomor (1) dan (2) merupakan gagasan utama dari paragraf tersebut, sehingga paragraf tersebut disebut paragraf deduktif.

b. Paragraf Induktif

Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan penjelas yang menekankan bagian-bagian atau unsur-unsur terkecil disusul dengan penjelasan bagian-bagian yang lebih besar sebelum kemudian diakhiri dengan kesimpulan atau kalimat penegas. Dengan kata lain, kalimat utama pada paragraf induktif berada pada kalimat di akhir paragraf.

Penulis menemukan temuan menarik pada paragraf Tekaporol sebagai berikut.

- (3) "Kampanye itu (tatap muka) tidak semua publik tahu. Karena itu peran media (televisi) bisa menyampaikan kandidat secara jujur mengenai calon tersebut," kata Ade Armando usai diskusi The

Indonesian Institute bertajuk "Kiprah Media Massa Jelang 2014" di Jakarta, Rabu (12/6). (T. 12, P. 2).

Penulisan tuturan langsung menjadi satu paragraf khusus cukup banyak ditemui pada Tekaporol. Penulis tidak memberikan pertimbangan khusus untuk menentukan posisi gagasan utama. Maksudnya, gagasan utama dapat saja masih berupa tuturan langsung. Untuk paragraf di atas, kalimat terakhir dalam tuturan langsung tersebut dianggap penentu untuk mengklasifikasikan paragraf ini ke dalam paragraf induktif.

Paragraf induktif juga ditemukan paragraf-paragraf lain, seperti berikut.

- (4) Partai, lanjut Masykurudin, juga telah menyediakan petugas penghubung dengan KPU. Harusnya, penghubung itu bisa memaksimalkan komunikasi dengan KPU. (T. 11, P. 5).

Paragraf nomor (4) di atas memiliki kalimat utama di akhir paragraf, yaitu *harusnya, penghubung itu bisa memaksimalkan komunikasi dengan KPU*. Jadi, paragraf tersebut digolongkan ke dalam paragraf induktif.

c. Paragraf Campuran

Bahasa jurnalistik kurang menyukai paragraf campuran karena cenderung menyulitkan pembacanya untuk cepat mengambil kesimpulan mengenai pokok pikiran yang terdapat dalam suatu paragraf (Sumandiria, 2006:90). Namun, terdapat beberapa paragraf dalam Tekaporol yang ditemukan menggunakan paragraf Campuran. Berikut beberapa contohnya.

- (5) PKS, kata Firman, menilai komitmen yang dibangun mereka bersama Setgab hanya mengacu pada hal-hal khusus. Sementara, Demokrat menganggap koalisi yang dibentuk mencakup secara umum atau keseluruhannya. (T. 7, P. 2)
- (6) Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem sebagus apapun dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan. Menyinggung selain PKB apa ada partai lain yang telah mendekatinya, dia mengatakan, dalam konteks pilpres tidak perlu banyak partai, cukup satu partai. Kalau tidak mencapai "electoral threshold" mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8)
- (7) Sebelumnya survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2 persen dan PDI Perjuangan 12,7 persen. Di bawah dua parpol itu, berurutan Partai Gerindra 7,3 persen, Partai Demokrat 7,1 persen, Partai Amanat Nasional 4 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 3,5 persen. (T. 17, P. 9)

Contoh (5) memperlihatkan pertentangan antara kalimat 1 dan kalimat 2, sehingga ide pokok berada di dalam kalimat 1 dan 2. Maka, paragraf ini digolongkan ke dalam paragraf campuran.

Perbedaan topik pembicaraan yang ada pada kalimat 1, dengan kalimat 2 dan 3 pada contoh (6) membuat paragraf ini dapat digolongkan ke dalam paragraf campuran. Kalimat 1 berisi ide pokoknya adalah *sistem sebagus apapun dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan*, sedangkan kalimat 2 dan 3 berisi ide pokok *apa ada partai lain yang telah mendekati Rhoma Irama*.

Paragraf pada contoh (7) memaparkan persentase elektabilitas dari beberapa partai berdasarkan survei Centre for Strategic and Internasional Studies. Tidak ada penarikan kesimpulan, baik di kalimat 1 maupun di kalimat 2, sehingga pembaca harus menarik kesimpulan sendiri. Oleh karena itu, paragraf ini digolongkan ke dalam paragraf campuran.

d. Paragraf Sebab-Akibat

Paragraf sebab-akibat adalah paragraf yang disusun berdasarkan urutan logis. Dalam hal ini, *sebab* bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan *akibat* sebagai perincian pengembangannya. Tetapi, hal ini dapat juga terbalik: *akibat* dijadikan gagasan utama, sedangkan untuk memahami sepenuhnya *akibat* itu perlu dikemukakan sejumlah *sebab* sebagai perinciannya.

Berikut contoh paragraf sebab akibat yang ditemukan pada Tekaporol.

- (8) Karena, lanjut Effendi, pemilihan presiden berbeda dengan pilkada. Ekspektasi masyarakat terhadap presiden pun berbeda dibanding harapan bagi gubernur. Walaupun elektabilitasnya tinggi, Jokowi juga harus menguji dirinya sendiri. Apakah memang mampu mengemban tanggung jawab memimpin negara. (T. 1, P. 3).

Pada contoh (6), kalimat pertama dan kedua, yaitu berisikan mengenai sebab-sebab dari kalimat ketiga dan keempat. Pemilihan presiden yang berbeda dengan pilkada, serta ekspektasi masyarakat terhadap presiden yang berbeda dibanding harapan bagi gubernur, menjadi alasan atau sebab dari perlunya Jokowi menguji kelayakan dirinya sendiri menjadi presiden.

e. Paragraf Pertentangan

Paragraf pertentangan adalah paragraf yang berisikan perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dari hasil penelitian, paragraf pertentangan juga digunakan dalam Tekaporol. Meskipun tidak banyak, penggunaan paragraf pertentangan cukup mewarnai

variasi penggunaan paragraf pada Tekaporol. Berikut contoh paragraf pertentangan yang terdapat pada Tekaporol.

- (9) PKS, kata Firman, menilai komitmen yang dibangun mereka bersama Setgab hanya mengacu pada hal-hal khusus. Sementara, Demokrat menganggap koalisi yang dibentuk mencakup secara umum atau keseluruhannya. (T. 1, P. 2).

Pada paragraf di atas dapat kita lihat ada hal yang dipertentangkan. Pendapat PKS dan Demokrat berbeda dalam memandang makna koalisi yang mereka jalankan. Contoh-contoh paragraf pertentangan yang lain dapat dilihat pada lamp. 12, 12.1, no. 128-141.

f. Paragraf klimaks, Antiklimaks, Contoh, Definisi, dan Klasifikasi

Paragraf klimaks adalah paragraf yang gagasan utamanya mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, berangsur-angsur dengan gagasan-gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Paragraf antiklimaks merupakan variasi dari paragraf klimaks. Paragraf antiklimaks adalah paragraf yang dimulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya.

Paragraf klasifikasi adalah paragraf yang berisi proses untuk mengelompokkan barang-barang yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Kemudian, definisi paragraf contoh adalah paragraf yang disusun dengan menunjukkan banyak contoh pada kalimat utama, kalimat pengembang, dan kalimat penjelas. Fungsi utama paragraf contoh tidak

dimaksudkan untuk menekan suatu gagasan atau konsep, tetapi justru memberikan gambaran sesuatu hal secara konkret kepada khalayak pembaca.

Paragraf klimaks, antiklimaks, contoh, definisi, dan klasifikasi tidak banyak muncul pada Tekaporol, sebagaimana jenis-jenis paragraf yang sudah dibahas sebelumnya. Akan tetapi, jenis-jenis paragraf ini cukup mewarnai penggunaan variasi jenis paragraf pada Tekaporol, meskipun tidak sering digunakan.

Variasi-variasi paragraf pada Tekaporol yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat secara lengkap pada Lamp. 12, 12.1.

g. Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat

Penulis menemukan hal yang menarik dari hasil penelitian pada Tekaporol, khususnya mengenai paragraf. Ada cukup banyak paragraf yang dibuat dengan satu kalimat. Paragraf seperti ini tidak dapat digolongkan berdasarkan penempatan ide pokok, yaitu paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Padahal, semua paragraf berpola salah satu dari tiga pola tersebut.

Wartawan perlu memecah kesatuan visual ini demi menambah kenyamanan membaca serta membuat berita menarik dari segi tampilan. Namun, penulisan paragraf dalam jurnalistik tetap mempertimbangkan dasar penulisan paragraf secara umum, yaitu logis, urut/sistematis, dan berisi satu pokok pikiran. Apabila paragraf suatu paragraf memang diperlukan untuk dipotong demi kenyamanan pembaca, maka hal tersebut dapat saja dilakukan. Namun, apabila pemotongan tersebut terkesan “terpaksa”, maka akan lebih baik jika dikembalikan lagi ke penerapan penulisan paragraf secara umum.

Chaer (2010:34-35) mengatakan, paragraf dibangun oleh dua kalimat atau lebih yang saling berkaitan, dan memiliki sebuah gagasan. Artinya, penerapan paragraf yang berisi satu kalimat ini, tergolong tidak biasa dalam penulisan paragraf pada umumnya.

Paragraf-paragraf yang berisi satu kalimat pada Tekaporol dilakukan agar mudah dibaca dan dipahami pembaca. Pemotongan tersebut ada yang memang sesuai tujuannya, namun ada yang justru menciptakan kekurangpaduan isi paragraf. Namun, semua paragraf-paragraf ini sebenarnya dapat digabung dengan paragraf sebelum atau sesudahnya. Ini membenarkan bahwa kalimat tersebut merupakan pemecahan dari paragraf sebelum atau sesudahnya.

Berikut akan ditampilkan contoh-contoh paragraf yang terdiri dari 1 kalimat pada Tekaporol.

- (10) Saleh menyatakan Hanura berharap rotasi jabatan yang mereka lakukan bisa membuat kerja politik Hanura lebih dinamis. (T. 3, P. 5).
- (11) Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. (T. 15, P. 4).
- (12) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, P. 1).

Contoh nomor (8), (9), (10), merupakan paragraf yang memiliki keterikatan yang koheren, logis, dan akan mempunyai satu pokok pikiran dengan kalimat-kalimat penjelas jika digabung dengan paragraf sebelum atau sesudahnya. Berikut penggabungannya.

- (13) Saleh menyatakan Hanura berharap rotasi jabatan yang mereka lakukan bisa membuat kerja politik Hanura lebih dinamis. Terlebih, tahun ini merupakan tahun politik menuju 2014. "Kita harapkan fraksi akan lebih bergerak dinamis dalam menyikapi situasi politik ke depan dan bekerja lebih taktis lagi," ujarnya. (T. 3, P. 5-6).
- (14) Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. Sikap itu memang akan sangat dilematis, tetapi bila PKS betul-betul berpihak pada rakyat maka keluar dari koalisi disebut Heri sebagai langkah paling baik. (T. 15, P. 4-5).
- (15) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Pasalnya, belum ada kejelasan waktu dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. (T. 26, P. 1-2).

Klasifikasi dan interpretasi Paragraf-paragraf yang terdiri dari satu kalimat dapat dilihat secara lengkap pada lamp. 12, 12.3 dan 12.4. Klasifikasi dan interpretasi paragraf satu kalimat jika digabungkan dengan paragraf sebelumnya atau setelahnya, dapat dilihat secara lengkap pada lamp. 12, 12.5 dan 12. 6.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, diketahui karakteristik penggunaan bahasa Indonesia pada tekaporol dari segi ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf, yaitu sebagai berikut.

Pada tekaporol, tidak ditemukan bentuk pemenggalan kata di ujung baris. Inilah salah satu karakteristik dari penggunaan ejaan jurnalistik media *online* yang tidak ditemukan pada media cetak. Dari segi ketepatan penggunaan ejaan, tidak banyak ditemukan penggunaan ejaan yang kurang tepat.

Tekaporol menggunakan diksi kata bersinonim dan berkonotasi pada beberapa kalimat, tidak hanya menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif dan netral saja. Hal ini sesuai dengan sifat bahasa jurnalistik, yaitu menarik. Dengan demikian, bahasa jurnalistik pada Tekaporol menjadi tidak kaku. Tidak banyak kata-kata rancu dalam suatu kata dan pemborosan kata yang ditemukan, sehingga diksi yang digunakan tekaporol secara keseluruhan tidak merusak kekomunikatifan isi berita.

Variasi-variasi kalimat dan variasi-variasi paragraf telah diterapkan dalam Tekaporol. Variasi-variasi yang diterapkan dalam Tekaporol adalah variasi pola penyusunan kalimat, yaitu keberadaan subjek di awal kalimat, predikat di awal kalimat (inversi), kata modal di awal kalimat, keterangan di

awal kalimat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung secara berselang seling, dan tidak hanya menggunakan kalimat aktif saja sebagai variasi pengembangan kalimat, tetapi juga menggunakan kalimat pasif.

Penggunaan kalimat langsung pada tekaporol lebih banyak dibandingkan penggunaannya di media cetak. Hal ini membuat penggunaan ejaan tanda petik dua (“...”) kerap digunakan.

Tekaporol menggunakan beberapa variasi paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf klimaks, paragraf antiklimaks, paragraf pertentangan, paragraf sebab-akibat, paragraf contoh, paragraf definisi, dan paragraf klasifikasi. Paragraf deduktif lebih dominan digunakan pada tekaporol. Selain itu, cukup banyak ditemukan paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian tentang penggunaan bahasa Indonesia ragam jurnalistik pada Tekaporol ini masih belum lengkap dan masih terbuka untuk diadakan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik diksi, kalimat, ataupun paragraf secara mendalam, serta berbagai temuan lain yang dapat diungkap dari teks media *online* ROL, misanya gaya bahasa, dan sudut pandang pengarang dalam berita. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat menginspirasi dan memotivasi peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik teks media *online* ROL ataupun media *online* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aslinda dan Leni Syafyahya, M.Hum. 2007. *Pengantar Sociolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Astuti. 2005. *Analisis Diksi dan gaya Bahasa Kolom Editorial Harian Umum Media Indonesia Edisi 15 Juni-15 Juli 2004*. Bengkulu: Unib.
- Chaer, Abdul. 2002. *Pengantar Semantik bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2006. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2010. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sociolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewabrata, A.M. 2004. *Kalimat Jurnalistik: Panduan Mencermati Penulisan Berita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Djajasudarma, Fatimah. 2010. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: Refika Aditama.
- Hariwijaya, M. dan Triton. 2011. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Oryza.
- Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Keraf, Gorys. 1994. *Komposisi*. Ende: Penerbit Nusa Indah.

- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2009. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ohoiwutun, Paul. 2007. *Sosiolinguistik: Memahami Bahasa dalam Konteks Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia. 2002. *Pendoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO, dan Metode Kerja Citizen Journalism)*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sarwoko, Tri Adi. 2007. *Inilah Bahasa Indonesia Jurnalistik*. Yogyakarta: ANDI.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik: Bagian Pertama ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik: Bagian Kedua Metode dan Aneka Metode dan Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukino. 2004. *Memahami Wacana Bahasa Indonesia*. Bengkulu: Perpustakaan Unib Press.
- Sumandiria, Haris. 2006. *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sungguh, As'ad (peny.). 2006. *Ejaan yang Disempurnakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran 5: Indikator Klasifikasi Ejaan pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

5.1 Indikator Klasifikasi Kekeliruan Penggunaan Ejaan berupa Tanda Petik (“...”), Tanda Petik Tunggal (‘...’), dan Cetak Miring pada Tekaporol

1. Tanda petik mengapit istilah yang kurang ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus (PPBI, 2002:46).
2. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di petikan lain (PPBI, 2002:47).
3. Tanda petik dan tanda petik tunggal tidak digunakan untuk mengapit kata dari bahasa asing. Kata dari bahasa asing ditulis dengan cetak miring, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (PPBI, 2002:10-11).

5.2 Indikator Klasifikasi Penambahan Tanda koma (,) pada Tekaporol

1. Tanda koma (,) digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya (Chaer, 2010:117)
2. Tanda koma (,) digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan (Chaer, 2010:116).
3. Tanda koma (,) digunakan untuk mengapit keterangan tambahan (aposisi) yang sifatnya tidak membatasi (Chaer, 2010:118).
4. Tanda koma (,) digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti *tetapi* dan *melainkan* (Chaer, 2010:116).

5.3 Indikator Klasifikasi Penggunaan Tanda Koma (,) yang Sebaiknya Diubah Menjadi Tanda Titik (.) pada Tekaporol

Pada ragam jurnalistik, kalimat dan alineanya pendek-pendek. Kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan dan mengandung satu ide pokok. (Dewabrata, 2006:39)

5.4 Indikator Klasifikasi Penggunaan Tanda Titik (.) yang Sebaiknya Diganti dengan Tanda Koma (,) pada Tekaporol

Kalimat tunggal tidak boleh diawali dengan sebuah konjungsi. Apabila kalimat itu punya hubungan dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat itu tidak perlu berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, melainkan harus menjadi bagian (klausa) dari klausa sebelumnya sebagai sebuah kalimat majemuk (Chaer, 2010:75-76). Penggabungan kedua kalimat ini dapat dilakukan dengan mengubah tanda titik (.) sebagai pemisah antara dua kalimat dengan tanda koma (,).

5.5 Indikator Klasifikasi Penambahan Tanda Titik (.) pada Tekaporol

Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik (PPBI, 2002:16).

5.6 Indikator Klasifikasi Kesalahan Penulisan Unsur Serapan pada Tekaporol

Indikator kesalahan penulisan unsur serapan pada tekaporol merujuk pada penulisan kata yang digunakan pada KBBI.

5.7 Indikator Klasifikasi Kesalahan Pengetikan Kata pada Tekaporol

Indikator kesalahan pengetikkan kata pada tekaporol merujuk pada penulisan kata yang digunakan pada KBBI.

5.8 Indikator Klasifikasi Kesalahan penggabungan Kata pada Tekaporol

1. Kata depan *di*, *ke*, dan *dari* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti *kepada* dan *daripada* (PPBI, 2002:14).
2. Afiks dan prefiks ditulis tanpa spasi pada kata yang diikutinya (Alwi, 2003)

5.9 Kesalahan Penulisan Huruf Kapital pada Tekaporol

1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat (PPBI, 2002:7).
2. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil (PPBI, 2002:18-19).

Lampiran 6: Klasifikasi dan Interpretasi Data Penggunaan Ejaan pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

6.1 Tabel Klasifikasi Kekeliruan Penggunaan Ejaan berupa Tanda Petik (“...”), Tanda Petik Tunggal (‘...’), dan Cetak Miring pada Tekaporol

No.	Kalimat	Kata dengan Ejaan yang Kurang Tepat	Yang Tepat
1	Konvensi itu, kata Mubarak, merupakan ' pintu ' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun tidak memiliki partai dan tidak memiliki peluang. (T. 4, P. 3, K. 3).	'pintu'	“pintu”
2	Meski demikian, kata Wiranto untuk mencegah jeratan kasus korupsi tidak mudah, namun pihaknya berupaya tetap bisa mempertahankan predikat partai yang masih ' bersih '. (T. 8, K. 1, P. 4).	'bersih'	“bersih”
3	“Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki kendaraan serta tidak ada peluang.” (T. 4, P. 4, K. 2).	kendaraan	‘kendaraan’
4	Kalau tidak mencapai " electoral threshold " mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8, K. 3).	"electoral threshold"	<i>electoral threshold</i>
5	"Karena ini merupakan pekerjaan manual, bukan kerja mesin, jadi sangat mungkin saja itu ada faktor ' human error ' kurang cermatan dan kealpaan," ujar Ida Budhiati di Jakarta, Jumat (14/6). (T. 14, P. 2, K. 1)	'human error'	<i>human error</i>
6	Partai Hanura menambah daftar parpol yang kehilangan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu legislatif DPR karena terganjal sistem " zipper " atau penempatan perempuan di setiap tiga calon. (T. 14, P. 4, K. 1).	"zipper"	<i>zipper</i>
7	Penempatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan " zipper system " yang menuntut parpol menempatkan bacaleg perempuan di nomor urut kecil, misalnya 1, 2, 4, 5, 7, atau 8. (T. 14, P. 5, K. 1).	"zipper system"	<i>zipper system</i>
8	"Dan dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan " strong leadership " kepemimpinan yang kuat dan tegas." (T. 24, P. 13, K. 1).	"strong leadership"	<i>strong leadership</i>
9	Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika tak menggandeng Demokrat dan Gerindra. (T. 24, P. 1, K. 1).	Board of Advisor	<i>Board of Advisor</i>
10	Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan PKS tidak akan lolos " parliamentary threshold " (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2014 karena perolehan suaranya di bawah 3,5 persen. (T. 17, P. 1, K. 1).	"parliamentary threshold"	<i>parliamentary threshold</i>
11	“Akan tetapi, kalau partai politik udah kehilangan arah artinya demokrasi terancam.” (k. 2, p. 7).	udah	<i>udah</i>
12	" Ngurusin KJS sama rusun saja saya sudah loncat-loncat begini," kata Jokowi. (T. 21, P. 10, K. 1).	ngurusin	<i>ngurusin</i>
13	" Gak disiapkan untuk itu (konvensi capres Demokrat)," kata Syarief Hasan, Sabtu (29/6). (T. 29, P. 2, K. 2).	gak	<i>gak</i>
14	“Betul nggak dia sudah sesuai dengan konsumsi sebagai presiden," kata Effendi dalam diskusi di Universitas Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/6). (T. 1, P. 2, K. 2).	nggak	<i>nggak</i>

6.2 Tabel Interpretasi Temuan Kekeliruan Penggunaan Ejaan berupa Tanda Petik (“...”), Tanda Petik Tunggal (‘...’), dan Cetak Miring pada Tekaporol

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 1	Tanda petik tunggal (‘...’) digunakan untuk mengapit kata <i>pintu</i> . Kata <i>pintu</i> pada kalimat tersebut merupakan ungkapan yang mengacu pada makna tertentu atau mempunyai arti khusus. Seharusnya kata <i>pintu</i> diapit oleh tanda petik (“...”), bukan tanda petik tunggal (‘...’).	Tanda petik mengapit istilah yang kurang ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus (PPBI, 2002:46).
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 2	Tanda petik tunggal pada kata <i>bersih</i> yang terlihat pada data tersebut hanya ada kutip pembuka tanpa diikuti kutip penutup. Lagipula, tanda kutip tunggal (‘...’) tidak tepat digunakan pada kata itu. Seharusnya diapit oleh tanda kutip (“...”).	Tanda petik mengapit istilah yang kurang ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus (PPBI, 2002:46).
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 3	Kata kendaraan pada kalimat pada data tersebut mempunyai arti khusus. Jadi, kata tersebut sebaiknya diapit oleh tanda petik (“...”). Namun, karena kata kendaraan telah berada di dalam kata tuturan yang diapit tanda petik (“...”), maka kata kendaraan dapat diapit dengan tanda petik tunggal (‘...’)	Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di petikan lain (PPBI, 2002:47).
4	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 4	Ungkapan asing <i>electoral threshold</i> pada data tersebut ditulis dengan cetak tebal dan diapit dengan tanda petik (“...”). Sebaiknya ungkapan asing ini cukup ditulis dengan cetak miring saja.	Tanda petik dan tanda petik tunggal tidak digunakan untuk mengapit kata dari bahasa asing. Kata dari bahasa asing ditulis dengan cetak miring, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (PBBI, 2002:10-11).
5	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 5	Kata dari bahasa asing <i>human error</i> ditulis dengan cetak miring dan diapit dengan tanda kutip tunggal (‘...’). Sebaiknya, kata tersebut cukup ditulis dengan cetak miring tanda adanya tanda petik tunggal (‘...’).	Tanda petik dan tanda petik tunggal tidak digunakan untuk mengapit kata dari bahasa asing. Kata dari bahasa asing ditulis dengan cetak miring, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (PBBI, 2002:10-11).
6	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 6, 7, 8, dan 10	Kata <i>zipper</i> , <i>zipper system</i> , <i>zipper system</i> , dan <i>parliamentary threshold</i> , ditulis dengan diapit oleh tanda petik (“...”). Sebaiknya penulisan kata bahasa asing ini cukup ditulis dengan cetak miring saja.	Tanda petik dan tanda petik tunggal tidak digunakan untuk mengapit kata dari bahasa asing. Kata dari bahasa asing ditulis dengan cetak miring, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (PBBI, 2002:10-11).
7	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1, no. 9	Kata <i>Board of Advisor</i> ditulis dengan cetak biasa. Sebaiknya kata dari bahasa asing ini ditulis dengan cetak miring.	Tanda petik dan tanda petik tunggal tidak digunakan untuk mengapit kata dari bahasa asing. Kata dari bahasa asing ditulis dengan cetak miring, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (PBBI, 2002:10-11).
8	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.1,	Kata <i>udah</i> , <i>ngurusin</i> , <i>gak</i> , dan <i>nggak</i> pada data tersebut sebaiknya ditulis dengan cetak miring, karena	Tanda petik dan tanda petik tunggal tidak digunakan untuk mengapit kata dari bahasa asing.

no. 11-14	merupakan kata dari bahasa sehari-hari. Dalam hal ini, dikategorikan sebagai bahasa asing, karena bukan merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia	Kata dari bahasa asing ditulis dengan cetak miring, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya (PBB, 2002:10-11).
-----------	--	--

6.3 Tabel Klasifikasi Penambahan Tanda koma (,) pada Tekaporol

No.	Kalimat di Tekaporol	Usulan pergantian Ejaan
1	Tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg. (T. 1, P. 4, K. 2).	(Akan) tetapi , tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg.
2	" Tapi wacana tokoh muda itu memang terus berkembang. Bu Mega juga mendengar," ujar dia. (T. 1, P. 6, K. 1).	" Tapi , wacana tokoh muda itu memang terus berkembang. Bu Mega juga mendengar," ujar dia.
3	" Untuk itu sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Megawati dan SBY." (T. 2, P. 7, K.2).	" Untuk itu , sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Megawati dan SBY."
4	Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh perihal rotasi di MPR. (t. 3, p. 4, k. 2).	Namun , dia tidak menjelaskan lebih jauh perihal rotasi di MPR.
5	" Namun saya tidak yakin bangsa sebesar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mumpuni," kata Ahmad Mubarak di Jakarta, Selasa (4/6). (T. 4, P. 2, K. 1).	" Namun , saya tidak yakin bangsa sebesar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mumpuni," kata Ahmad Mubarak di Jakarta, Selasa (4/6).
6	" Karena itu perjuangan Hanura untuk menjadi bagian dari proses perubahan bangsa akan bisa kami lakukan kalau kami punya kekuatan, dan itu harus diperjuangkan melalui Pemilu (pemilihan umum 2014)," katanya di Bantul, Sabtu (8/6). (T. 8, K. 2, P. 1).	" Karena itu , perjuangan Hanura untuk menjadi bagian dari proses perubahan bangsa akan bisa kami lakukan kalau kami punya kekuatan, dan itu harus diperjuangkan melalui Pemilu (pemilihan umum 2014)," katanya di Bantul, Sabtu (8/6).
7	" Jadi ada suatu kewajiban juga bagi saya untuk memperjuangkan PKB," katanya. (T. 9, P. 6, K. 3).	" Jadi , ada suatu kewajiban juga bagi saya untuk memperjuangkan PKB," katanya. (T. 9, P. 6, K. 3).
8	" Jadi siapa pun pemimpin bangsa ini harus memprioritaskan bagaimana ekonomi itu jauh lebih baik dan secara simultan baru membenahi akhlak bangsa ini yang saya lihat dalam dekadensi moral yang sangat parah," katanya. (T. 9, P. 7, K. 2).	" Jadi , siapa pun pemimpin bangsa ini harus memprioritaskan bagaimana ekonomi itu jauh lebih baik dan secara simultan baru membenahi akhlak bangsa ini yang saya lihat dalam dekadensi moral yang sangat parah," katanya. (T. 9, P. 7, K. 2).
9	" Artinya mereka (Dahlan dan Gita) tidak memiliki 'kendaraan', sementara jalur independen (untuk kepresidenan-red) pun belum diatur dalam konstitusi Indonesia," ujarnya. (T. 10, P. 4, K. 2).	" Artinya , mereka (Dahlan dan Gita) tidak memiliki 'kendaraan', sementara jalur independen (untuk kepresidenan-red) pun belum diatur dalam konstitusi Indonesia," ujarnya.
10	Tetapi gugurnya beberapa caleg tetap menandakan kurang tertibnya partai dalam menyiapkan kelengkapan administratif. (T. 11, P. 6, K. 2).	(Akan) tetapi , gugurnya beberapa caleg tetap menandakan kurang tertibnya partai dalam menyiapkan kelengkapan administratif.
11	" Karena itu peran media (televisi) bisa menyampaikan kandidat secara jujur mengenai calon tersebut," kata Ade Armando usai diskusi The Indonesian Institute bertajuk "Kiprah Media Massa Jelang 2014" di Jakarta, Rabu (12/6). (T. 12, P. 2, K. 2).	" Karena itu , peran media (televisi) bisa menyampaikan kandidat secara jujur mengenai calon tersebut," kata Ade Armando usai diskusi The Indonesian Institute bertajuk "Kiprah Media Massa Jelang 2014" di Jakarta, Rabu (12/6).
12	" Karena itu diskusi penting dilakukan dalam kaitan ini," ujar Ade. (T. 12, P. 4, K. 2).	" Karena itu , diskusi penting dilakukan dalam kaitan ini," ujar Ade.
13	" Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi	" Tapi , politik dua kaki ini sangat jelek. Bagi

	pendidikan politik tidak baik. Dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3, K. 3).	pendidikan politik tidak baik dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6).
14	Sebelumnya survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2 persen dan PDI Perjuangan 12,7 persen. (T. 17, P. 9, K. 1).	Sebelumnya , survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2 persen dan PDI Perjuangan 12,7 persen.
15	" Tapi saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya. (T. 22, P. 5, K. 1).	" Tapi , saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya.
16	" Kemudian Golkar pascamunas tersebut akan berkoalisi dengan PDIP," ungkapnya. (T. 24, P. 4, K. 1).	" Kemudian , Golkar pascamunas tersebut akan berkoalisi dengan PDIP," ungkapnya.
17	" Sehingga kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama." (T. 24, P. 11, K. 1).	" Sehingga , kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama."
18	" Namun tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. (T. 24, P. 2, K. 1).	" Namun , tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie."
19	" Namun sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa." (T. 24, P. 15, K. 1).	" Namun , sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa."
20	Tetapi Ferry cukup yakin proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap bacaleg telah dilakukan sesuai prosedur. (T. 25, K. 2, P. 2).	(Akan tetapi , Ferry cukup yakin proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap bacaleg telah dilakukan sesuai prosedur.
21	Lalu belum ditegaskan apakah peserta konvensi harus menjadi anggota partai terlebih dahulu atau tidak. (T. 26, P. 5, K. 2).	Lalu , belum ditegaskan apakah peserta konvensi harus menjadi anggota partai terlebih dahulu atau tidak.
22	" Jadi belum (akan ikut), karena itu tadi, kapan dibuka, kalau dibuka mau daftar kemana, aturan belum ada." (T. 26, P. 6, K. 1).	" Jadi , belum (akan ikut), karena itu tadi, kapan dibuka, kalau dibuka mau daftar kemana, aturan belum ada."
23	Indikasinya menurut Siti terlihat dari sikap politik SBY yang tidak merestui Marzuki menjadi ketua umum Demokrat saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu. (T. 30, P. 3, K. 2).	Indikasinya, menurut Siti , terlihat dari sikap politik SBY yang tidak merestui Marzuki menjadi ketua umum Demokrat saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu.
24	Pasalnya publik bisa menganggap konvensi capres Demokrat hanya sekadar akal-akalan belaka. (T. 30, P. 4, K. 2).	Pasalnya , publik bisa menganggap konvensi capres Demokrat hanya sekadar akal-akalan belaka.
25	"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali dan Mahfud MD. " (T. 2, P. 4, K. 2).	"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali, dan Mahfud MD. "
26	"Saya yakin calon legislatif di seluruh tigtatan dari kabupaten dan kota, provinsi serta pusat pasti ingin memenangkan pemilu legislatif tersebut." (T.22, P. 3, K. 1).	"Saya yakin calon legislatif di seluruh tigtatan dari kabupaten dan kota, provinsi, serta pusat pasti ingin memenangkan pemilu legislatif tersebut."
27	Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula. (T. 12, P. 1, K. 1)	Pakar komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando , menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula.
28	Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partai yang dipimpinnya bakal menjadi oposisi apabila dalam Pemilu 2014 gagal masuk dua besar dalam perolehan suara. (T. 19, P. 1, K. 1).	Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh , menyatakan partai yang dipimpinnya bakal menjadi oposisi apabila dalam Pemilu 2014 gagal masuk dua besar dalam perolehan suara.
29	Sejumlah warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon presiden 2014-2019 pada Pemilu	Sejumlah warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo , untuk maju sebagai bakal calon presiden

	2014. (T. 21, P. 1, K. 1).	2014-2019 pada Pemilu 2014.
30	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang. (T. 14, P. 1, K. 1).	Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ida Budhiati , mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang.
31	Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, jika memang kemudian diketahui melakukan kesalahan, maka bisa saja terjadi perubahan. (T. 25, P. 2, K. 1).	Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah , menjelaskan, jika memang kemudian diketahui melakukan kesalahan, maka bisa saja terjadi perubahan.
32	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, P. 1, K. 1).	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD , masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat.
33	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. (T. 28, P. 1, K. 1).	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto , mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya.
34	Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah jika mantan KSAD, Jenderal (purn) TNI, Pramono Edhie Wibowo disiapkan untuk menjadi capres pada konvensi Demokrat. (T. 29, P. 1, K. 1).	Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan , membantah jika mantan KSAD Jenderal (purn) TNI, Pramono Edhie Wibowo, disiapkan untuk menjadi capres pada konvensi Demokrat.
35	"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu , seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga kordinasi dengan Bawaslu," kata Ida. (T. 14, P. 3, K. 1).	"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi, kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu . Seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga koordinasi dengan Bawaslu," kata Ida.
36	Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM. (T. 16, P. 2, K. 1).	Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM , namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM.
37	Konvensi tidak diadakan untuk mencari figur pemimpin terbaik melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga. (T. 29, P. 4, K. 3).	Konvensi tidak diadakan untuk mencari figur pemimpin terbaik , melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga.
38	Hal ini karena menurutnya SBY memiliki otoritas yang besar baik sebagai ketua umum maupun ketua majelis tinggi. (T. 29, P. 5, K. 2).	Hal ini karena menurutnya SBY memiliki otoritas yang besar , baik sebagai ketua umum maupun ketua majelis tinggi. (k. 2, p. 5).

6.4 Tabel Interpretasi Temuan Penambahan Tanda koma (,) pada Tekaprol

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.3, no. 1-24	Kata hubung <i>tetapi, tapi, untuk itu, namun, karena itu, jadi, artinya, sebelumnya, kemudian, sehingga</i> , dan <i>pasalnya</i> , yang terletak di awal kalimat berfungsi untuk menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Kata hubung ini bukan merupakan kata hubung antar klausa. Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan tanda koma (,) setelah kata hubung tersebut. namun, pada data, tidak diterapkan penggunaan tanda koma (,) itu.	Sesuai dengan penjelasan di Chaer (2010:117), bahwa tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti: jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya.
2	Dapat dilihat pada	Di antara unsur-unsur dalam suatu	Tanda koma (,) digunakan di

	Tahap Klasifikasi di Lamp 6, Tabel 6.3, no. 25-26	pemerincian belum menggunakan tanda koma.	antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan (Chaer, 2010:116).
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.3, no. 27-34	Ditemukan aposisi atau keterangan tambahan yang tidak dibatasi oleh tanda koma, sebelum kata atau frasa aposisi ini, maupun setelahnya.	Tanda koma (,) digunakan untuk mengapit keterangan tambahan (aposisi) yang sifatnya tidak membatasi (Chaer, 2010:118).
4	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.3, no. 35-38	Ditemukan bagian kalimat setara yang satu dengan yang lainnya, yang diketahui dari adanya konjungsi penandanya, namun frasa-frasa dalam kalimat setara ini tidak dipisahkan dengan tanda koma, sehingga berpotensi membingungkan pembaca.	Tanda koma (,) digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti <i>tetapi</i> dan <i>melainkan</i> (Chaer, 2010:116).

6.5 Tabel Klasifikasi Penggunaan Tanda Koma (,) yang Sebaiknya Diubah Menjadi Tanda Titik (.) pada Tekaporol

No.	Kalimat di Tekaporol	Usulan pergantian Ejaan
1	"Ini semacam ada 'generasi yang hilang', dulu Republik ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang mampu memerdekakan bangsa dan menjadi duta-duta yang tangguh di mata internasional." (T. 2, P. 12, K. 2).	"Ini semacam ada 'generasi yang hilang'. Dulu Republik ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang mampu memerdekakan bangsa dan menjadi duta-duta yang tangguh di mata internasional."
2	"Di PKB kita terapkan musyawarah, konvensi itu tidak punya sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu. (T. 5, P. 2, K. 1).	"Di PKB kita terapkan musyawarah. Konvensi itu tidak punya sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu.
3	"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu, seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga kordinasi dengan Bawaslu," kata Ida. (T. 14, P. 3, K. 1).	"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi, kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu. Seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga koordinasi dengan Bawaslu," kata Ida.
4	"Masyarakat sekarang ini sudah cerdas, apabila dalam berpolitik itu mengedepankan moral yang baik pasti akan mendapat dukungan dari rakyat," ujar Surya Paloh. (T. 19, P. 9, K. 2).	"Masyarakat sekarang ini sudah cerdas. Apabila dalam berpolitik itu mengedepankan moral yang baik pasti akan mendapat dukungan dari rakyat," ujar Surya Paloh.
5	"Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. (T. 21, P. 3, K. 1).	"Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden. Setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got. Berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486.
6	Berikut elektabilitas tokoh-tokoh yang dipilih responden bila pemilihan presiden dilakukan, berdasarkan kajian P2P LIPI yang dipaparkan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6), (T. 27, P. 2, K. 2).	Berikut elektabilitas tokoh-tokoh yang dipilih responden bila pemilihan presiden dilakukan, berdasarkan kajian P2P LIPI yang dipaparkan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6).

6.6 Tabel Interpretasi Temuan Penggunaan Tanda Koma (,) yang Sebaiknya Diubah Menjadi Tanda Titik (.) pada Tekaporol

Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi	Sebaiknya kalimat-kalimat tersebut dipotong, karena terlalu panjang. Ini dimaksudkan agar	Pada ragam jurnalistik, kalimat dan alineanya pendek-pendek.

di Lamp. 6, Tabel 6.5, no. 1-6	memper memudahkan pembaca memahami pokok pembicaraan yang disampaikan. Oleh karena itu, akan ada perubahan penggunaan tanda koma (,) menjadi tanda titik (.).	Kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan dan mengandung satu ide pokok. (Dewabrata, 2006:39)
--------------------------------	---	---

6.7 Tabel Klasifikasi Penggunaan Tanda Titik (.) yang Sebaiknya Diganti dengan Tanda Koma (,) pada Tekaporol

No.	Kalimat di Tekaporol	Usulan pergantian Ejaan
1	"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali dan Mahfud MD. Sedangkan dari lingkungan PDI Perjuangan beredar nama-nama seperti Jokowi, Puan Maharani dan yang baru saja memenangkan pemilukada Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo," tutur Jeffrie. (T. 2, P. 4, K. 2).	"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali, dan Mahfud MD, sedangkan dari lingkungan PDI Perjuangan beredar nama-nama seperti Jokowi, Puan Maharani, dan yang baru saja memenangkan pemilukada Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo," tutur Jeffrie.
2	Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai. Karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan. (T. 11, p. 3, k. 1-2).	Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai, karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan.
3	KPU, tambahannya, harus tetap tegas dan tidak melunak. Karena yang diwajibkan kepada partai sudah tertera dalam UU Pemilu yang diturunkan dalam peraturan KPU. (T. 11, P. 7, K. 1-2).	KPU, tambahannya, harus tetap tegas dan tidak melunak, karena yang diwajibkan kepada partai sudah tertera dalam UU Pemilu yang diturunkan dalam peraturan KPU.
4	"Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi pendidikan politik tidak baik. Dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3, K. 3).	"Tapi, politik dua kaki ini sangat jelek. Bagi pendidikan politik tidak baik dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6).
5	"Namun tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 2, K. 1-2).	"Namun, tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6).
6	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. Karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi. (T. 26, P. 3, K. 3).	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konstitusi, karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi.
7	"Hasil survei itu berbeda-beda dari lembaga satu ke lembaga lain. Sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (T. 28, P. 2, K. 2).	"Hasil survei itu berbeda-beda dari lembaga satu ke lembaga lain, sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

6.8 Tabel Interpretasi Temuan Penggunaan Tanda Titik (.) yang Sebaiknya Diganti dengan Tanda Koma (,) pada Tekaporol

Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.7, no. 1-7	pada kalimat-kalimat tersebut, adanya penggunaan konjungsi yang berperan sebagai penghubung antar frasa, namun digunakan sebagai penghubung antar kalimat. ini bukti bahwa kalimat tersebut merupakan frasa dari kalimat sebelumnya yang dipotong menjadi sebuah kalimat. sebaiknya kalimat-kalimat tersebut	Kalimat tunggal tidak boleh diawali dengan sebuah konjungsi. Apabila kalimat itu punya hubungan dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat itu tidak perlu berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, melainkan harus menjadi bagian (klausa) dari klausa sebelumnya sebagai sebuah

	digabungkan kembali dengan kalimat sebelumnya, dengan membubuhi tanda koma (.). Konjungsi-konjungsi yang ditemukan adalah <i>sedangkan, karena, bagi, dan, tapi, karena, dan sehingga</i> .	kalimat majemuk (Chaer, 2010:75-76). Penggabungan kedua kalimat ini dapat dilakukan dengan mengubah tanda titik (.) sebagai pemisah antara dua kalimat dengan tanda koma (,).
--	---	---

6.9 Tabel Klasifikasi Penambahan Tanda Titik (.) pada Tekaporol

No.	Ejaan Pada Tekaporol	Sebaiknya
1.	Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, Dr Kadri . (T. 13, P. 1, K. 1).	Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, Dr. Kadri .
2.	Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Jumat (28/6). (T. 28, p. 3, k. 1).	Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jumat (28/6).

6.10 Tabel Interpretasi Temuan Penambahan Tanda Titik (.) pada Tekaporol

Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.9, no. 1-2	Pada data, ditemukan penulisan ejaan nama gelar yang kurang tepat. Gelar <i>Dr.</i> , tidak diikuti dengan tanda titik.	Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik (PPBI, 2002:16).

6.11 Tabel Klasifikasi Kesalahan Penulisan Unsur Serapan pada Tekaporol

No.	Kalimat	Penulisan Kata yang Kurang Tepat	Penulisan Kata yang Tepat
1	Menurut Jeffrie, kedua negarawan itu layak mendapat apresiasi karena telah mengiklaskan partainya melahirkan generasi baru untuk suksesi 2014 yang akan datang. (T. 2, P. 8, K.1).	Mengiklaskan	mengikhlaskan
2	"Dari awal, khittah Muhammadiyah sudah jelas dan tidak mau terjebak dalam kekuasaan politik tertentu." (T. 6, k. 3, p. 4).	Khittah	khitah
3	Hal ini sesuai khittah , bahwa Muhammadiyah netral dan membebaskan warganya memilih sesuai hati nurani. (T. 6, P. 4, K. 2).	Khittah	khitah
4	Ida mengatakan apabila terjadi kesalahan terhadap hasil DCS yang dilakukan penyelenggara pemilu, KPU akan memperbaikinya dan mengoordinasikan dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (T. 14, P. 2, K. 2).	Mengoordinasikan	mengkoordinasikan
5	"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu, seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga kordinasi dengan Bawaslu," kata Ida. (T. 14, P. 3, K. 1).	kordinasikan; kordinasi	Koordinasikan; koordinasi
6	Pasalnya, rakyat sudah semakin cerdas menilai sepak terjang partai dan politisi di jagad politik. (T. 16, P. 9, K. 2).	Jagad	jagat

6.12 Tabel Interpretasi Temuan Kesalahan Penulisan Unsur Serapan pada Tekaporol

Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.11, no. 1-6	Kata-kata yang tidak tepat yang ditemukan pada data tersebut adalah (1) <i>mengiklaskan</i> , seharusnya ditulis <i>mengikhlaskan</i> ; (2) <i>khittah</i> , seharusnya ditulis <i>khitah</i> ; (3) <i>mengoordinasikan</i> , seharusnya ditulis <i>menkoordinasikan</i> ; (4) <i>kordinasi</i> , seharusnya ditulis <i>koordinasi</i> ; (5) <i>jagad</i> , seharusnya ditulis <i>jagat</i> .	Indikator kesalahan penulisan unsur serapan pada tekaporol merujuk pada penulisan kata yang digunakan pada KBBI.

6.13 Tabel Klasifikasi Kesalahan Pengetikan Kata pada Tekaporol

No.	Kalimat	Penulisan kata yang kurang tepat	Yang tepat
1	Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM. (T. 16, P. 2, K. 1).	kompesasi	kompensasi
2	"Akan tetapi, kalau partai politik udah kehilangan arah artinya demokrasi terancam." (T. 19, P. 7, K. 2).	udah	sudah
3	"Masyarakat sekarang ini sudah cerdas, apabila dalam berpolitik itu mengedepankan moral yang baik pasti akan mendapau dukungan dari rakyat," ujar Surya Paloh. (T. 19, P. 9, K. 2).	mendapau	mendapat
4	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi . (T. 26, P. 3, K. 2).	konsttusi	konstitusi

6.14 Tabel Interpretasi Temuan Kesalahan Pengetikan Kata pada Tekaporol

Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.13, no. 1-4	Ada kata-kata yang salah ketik, yaitu: (1) kompesasi, ditulis kompesasi; (2) sudah, ditulis udah; (3) mendapau, ditulis mendapau; (4) konsttusi, ditulis konstitusi.	Indikator kesalahan pengetikkan kata pada tekaporol merujuk pada penulisan kata yang digunakan pada KBBI.

6.15 Tabel Klasifikasi Kesalahan penggabungan Kata pada Tekaporol

No.	Kalimat	Penulisan kata yang kurang tepat	Yang tepat
1	"Saat ini Ketua Fraksi Hanura di DPR di jabat oleh Syarifudin Sudding," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin melalui pesan singkat ke wartawan, Senin (3/6). (T. 3, P. 2, K. 1).	di jabat	dijabat
2	Seorang karyawan, Inda (29), menyatakan menyetujui Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden karena gubernur DKI Jakarta tersebut mau turun langsung membantu warga menengah kebawah . (T. 21, P. 8, K. 1).	kebawah	ke bawah
3	"Kalau itu terjadi maka partai penguasa pasca2014 adalah PDIP didukung Golkar dengan partai penyeimbang pemerintahan yang dipimpin Demokrat. (T. 24, P. 9, K. 1).	pasca2014	pasca 2014

6.16 Tabel Interpretasi Temuan Kesalahan penggabungan Kata pada Tekaporol

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.15, no. 1	morfem <i>di-</i> pada kata <i>dijabat</i> merupakan bentuk afiks. Jadi penempatannya harus digabung dengan <i>jabat</i> . Namun, pada data, penulisannya dipisah dengan tanda spasi.	Afiks dan prefiks ditulis tanpa spasi pada kata yang diikutinya (Alwi, 2003)
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.15, no. 2	<i>Ke</i> pada kata <i>ke bawah</i> merupakan bentuk kata depan, bukan afiks, sehingga penulisannya pun harus dipisah dengan tanda spasi. Namun, pada data, penulisannya ditulis tanpa spasi, yaitu <i>kebawah</i> .	Kata depan <i>di</i> , <i>ke</i> , dan <i>dari</i> ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti <i>kepada</i> dan <i>daripada</i> (PPBI, 2002:14).
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.15, no. 3	Ditemukan kata pasca2014. Padahal pasca dan 2014 seharusnya ditulis terpisah dengan penambahan spasi.	-

6.17 Tabel Klasifikasi Kesalahan Penulisan Huruf Kapital pada Tekaporol

No.	Kalimat	Penulisan Huruf Kapital yang kurang tepat	Yang tepat
1	Jeffrie menambahkan keenam nama tokoh muda itulah yang berpeluang menjadi Presiden RI berikutnya. (T. 2, P. 5, K. 1).	Presiden	presiden
2	"Akhirnya semakin nyata dan tampak jelas bahwa 2014 yang akan datang, satu tahun lagi, kita anak bangsa negeri ini akan memiliki Presiden baru, dari generasi baru," ujar Jeffrie, Ahad (6/2). (T. 2, P. 2, K.1).	Presiden	presiden
3	Partai Hanura menambah daftar parpol yang kehilangan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu legislatif DPR karena terganjal sistem "zipper" atau penempatan perempuan di setiap tiga calon. (T. 14, P. 4, K. 1).	Pemilu	pemilu

6.18 Tabel Interpretasi Temuan Kesalahan Penulisan Huruf Kapital pada Tekaporol

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.17, no. 1-2	Ditemukan kata <i>Presiden</i> , yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Kata <i>Presiden</i> pada kalimat-kalimat tersebut tidak diikuti nama orangnya, sehingga penulisan huruf kapital pada kata presiden tidak tepat	Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat (PPBI, 2002:7).
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 6.17, no. 3	Ditemukan kata pemilu, yang huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. sebaiknya, kata Pemilu ditulis pemilu.	Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil (PPBI, 2002:18-19).

Lampiran 7: Indikator Klasifikasi Penggunaan Diksi atau Pilihan Kata pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

7.1 Indikator Klasifikasi Kata-kata yang Rancu pada Tekaporol

1. Kata *adalah* sebaiknya digunakan jika unsur subjek atau predikat merupakan frase yang panjang (Chaer, 2010). Konjungsi *adalah* ini biasa digunakan di dalam konstruksi definisi.
2. Kata *yakni* dan *yaitu* digunakan untuk menghubungkan atau menyamakan dua bagian kalimat yang maujudnya sama, biasanya antara maujud subjek dengan aposisinya.
3. Konjungsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat atau klausa yang menyatakan tujuan atau peruntukkan adalah kata *untuk*, *guna*, dan *bagi* (Chaer, 2010:54). Jadi, konjungsi *tapi* yang digunakan pada T.30, P. 3, K.2 kurang tepat, karena pada kalimat tersebut ada hubungan yang menyatakan tujuan atau peruntukkan pada antar klausa.

7.2 Indikator Klasifikasi Diksi yang Berkaitan dengan Kata Bersinonim dan Berkonotasi

Wartawan dituntut memiliki sejumlah sinonim untuk kata-kata yang kerap digunakan supaya kalimat lebih variatif dan hidup (Sarwoko, 2007). Penggunaan kata yang berkonotasi adalah makna kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu disamping makna dasar yang umum. Kata berkonotasi dipilih untuk menimbulkan perasaan setuju atau tidak setuju dan senang atau tidak senang pada pembaca (Sumandiria, 2006:28).

7.3 Indikator Klasifikasi Diksi Ungkapan Asing dan Istilah yang Tidak Umum

Diksi ungkapan asing itu merupakan kata-kata dari bahasa asing yang digunakan untuk mewakili makna tertentu, dan istilah-istilah yang tidak umum merupakan istilah-istilah yang relatif baru beredar dimasyarakat. Jadi, wartawan harus memberikan gambaran mengenai arti dari ungkapan tersebut agar mudah dipahami setiap pembaca, karena masyarakat sebagai pembaca sangat heterogen.

7.4 Indikator Klasifikasi Kata Tidak Baku yang Ditemukan

Penggunaan kata tidak baku yang merupakan kata dari bahasa daerah yang populer digunakan masyarakat dapat mendekatkan emosi pembaca dengan teks yang kita tulis. Meski identik dengan penggunaan kata-kata yang populis, bahasa jurnalisitk tetap harus menggunakan kata baku (Sumandiria, 2006). Kata tidak baku ditentukan dengan ada atau tidaknya kata dengan makna yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut di dalam KBBI.

Lampiran 8: Klasifikasi dan Interpretasi Data Penggunaan Diksi atau Pilihan Kata pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

8.1 Tabel Klasifikasi Kata yang Rancu dalam Suatu Kalimat Pada Tekaporol

No.	Kata yang Rancu dalam Suatu Kalimat	Usulan Pembetulan
1	Ia menuturkan, konsep utama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pencalonan, yakni memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendasar buat seluruh bangsa adalah masalah perut. (T. 9, P. 7, K. 1).	Ia menuturkan, konsep utama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pencalonan adalah memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendasar buat seluruh bangsa yakni masalah perut.
2	Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. (T. 15, P. 4, K. 1).	Heri mengusulkan, jika PKS benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, maka keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh.
3	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. (T. 30, P. 3, K. 2).	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, agar bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. (T. 30, P. 3, K. 2).

8.2 Tabel Interpretasi Temuan Kata yang Rancu dalam Suatu Kalimat Rancu pada Tekaporol

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.1, no. 1	Pada data, dapat dilihat bahwa penggunaan konjungsi <i>adalah</i> dan <i>yakni</i> kurang tepat	Kata <i>adalah</i> sebaiknya digunakan jika unsur subjek atau predikat merupakan frase yang panjang (Chaer, 2010). Konjungsi <i>adalah</i> ini biasa digunakan di dalam konstruksi definisi. Kata <i>yakni</i> dan <i>yaitu</i> digunakan untuk digunakan untuk menghubungkan atau menyamakan dua bagian kalimat yang maujudnya sama, biasanya antara maujud subjek dengan aposisinya.
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.1, no. 2	Konjungsi <i>sebaiknya</i> tidak tepat digunakan pada kalimat tersebut. sebaiknya diganti dengan <i>maka</i> .	-
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.1, no. 3	konjungsi <i>tapi</i> yang digunakan pada T.30, P. 3, K.2 kurang tepat, karena pada kalimat tersebut ada hubungan yang menyatakan tujuan atau peruntukkan pada antar klausa.	Konjungsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat atau klausa yang menyatakan tujuan atau peruntukkan adalah kata <i>untuk</i> , <i>guna</i> , dan <i>bagi</i> (Chaer, 2010:54).

8.3 Tabel Klasifikasi Pemborosan Kata pada Tekaporol

No.	Kalimat	Usulan pembetulan
1	Kedepannya, kata dia, ada baiknya koalisi yang dibentuk dengan lebih sedikit partai, sehingga memudahkan dalam melakukan kebijakan dan kontrol. (T. 26, P. 14, K. 1).	Kedepannya, kata dia, ada baiknya koalisi dibentuk dengan lebih sedikit partai, sehingga memudahkan dalam melakukan kebijakan dan kontrol. (T. 26, P. 14, K. 1).
2	Menurutnya, kandidat yang sudah menyatakan diri maju dalam bursa bakal calon presiden	Menurutnya, kandidat yang sudah menyatakan diri maju dalam bursa bakal calon presiden

	(capres) maka orang tersebut harus sudah sosialisasi sejak saat ini. (T. 12, P. 5, K. 1).	(capres) harus sudah sosialisasi sejak saat ini. (T. 12, P. 5, K. 1).
3	KPU, tambahannya, harus tetap tegas dan tidak melunak . (T. 11, p. 7, k. 1).	1. KPU, tambahannya, harus tetap tegas. 2. KPU, tambahannya, seharusnya tidak melunak.
4	Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem sebagus apapun dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan. (T. 9, p. 8, k. 1).	Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan.
5	Menurut dia , pencitraan dan kinerja positif kedua orang tersebut di dalam pemerintahan hanya diperoleh dari hasil survei di masyarakat. Namun, menurut dia , partai-partai politik akan sangat kuat untuk mendukung bakal capres dari internalnya, sedangkan konvensi pun tidak akan benar-benar mencari kandidat yang diinginkan masyarakat. (T. 10, P. 3, K. 1-2).	Menurut dia, pencitraan dan kinerja positif kedua orang tersebut di dalam pemerintahan hanya diperoleh dari hasil survei di masyarakat. Namun, partai-partai politik akan sangat kuat untuk mendukung bakal capres dari internalnya, sedangkan konvensi pun tidak akan benar-benar mencari kandidat yang diinginkan masyarakat.

8.4 Tabel Interpretasi Temuan Pemborosan Kata pada Tekaporol

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.3, no. 1	Kata <i>yang</i> pada kalimat tersebut hanya membuat kalimat tersebut menjadi rancu. Sebaiknya kata <i>yang</i> itu dihilangkan.	Klimat dalam bahasa jurnalistik harus singkat, padat jelas. Kalimat jurnalistik cenderung pada kalimat yang pendek-pendek, dan menjaga efisiensi penggunaan kata-kata
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.3, no. 2	Kata <i>maka orang tersebut</i> merupakan pemborosan kata. Kata tersebut sudah ada rujukannya pada subjek di depannya, yaitu <i>kandidat yang sudah mencalonkan diri....</i>	
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.3, no. 3	Terdapat dua frasa yang mengacu pada maksud yang sama. Seharusnya salah satu dari frasa tersebut dihilangkan.	
4	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.3, no. 4	Kata <i>sebagus apapun</i> dan <i>sebaik apapun</i> merupakan pengulangan kata yang tidak efisien. Frasa yang mengiringi kata ini dapat diefisienkan dengan menghilangkan salah satu dari kata tersebut.	
5	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.3, no. 5	Kata menurut dia pada kalimat tersebut dapat dihilangkan salah satunya, agar kalimat ini lebih efektif.	

8.5 Tabel Klasifikasi Diksi yang Berkaitan dengan Kata Bersinonim dan Berkonotasi

No.	Kalimat	Kata	Makna denotasi	Makna konotasi sesuai konteks kalimat
1	Ia menilai jagoan dari partai lain akan semakin meredup karena partai-partai lain menampilkan tokoh-tokoh dari generasi lama yang tidak dikehendaki oleh mayoritas masyarakat di negeri ini. (T. 2, P. 6, K. 1).	Meredup	agak gelap	kalah jauh, kalah saing, kalah pamor.
2	Menurut Jeffrie, kedua negarawan itu layak mendapat apresiasi karena telah mengiklaskan partainya melahirkan generasi baru untuk suksesi 2014 yang akan	Mengiklaskan	tulus hati	memberi kesempatan, merelakan

	datang. (T. 2, P. 8, K.1).			
3	DPP Partai Hanura melakukan rotasi fraksi di DPR. (T. 3, P. 1, K. 1).	Rotasi	perputaran	pergantian posisi jabatan, bisa dinaikkan dan diturunkan
4	Konvensi itu, kata Mubarak, merupakan ' pintu ' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun tidak memiliki partai dan tidak memiliki peluang. (T. 4, K. 3, P. 3).	Pintu	tempat untuk masuk dan keluar	peluang
5	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. (T. 30, P. 3, K. 2).	Pintu	tempat untuk masuk dan keluar	peluang
6	"Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki kendaraan serta tidak ada peluang." (T. 4, P. 4, K. 2).	kendaraan	alat transportasi, untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.	partai politik sebagai pengusung
7	"Mereka (Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan) agak sulit karena tidak mempunyai ' kendaraan ' untuk maju sebagai bakal capres," kata Iberamsjah kepada Antara di Jakarta, Senin (10/6). (T. 10, P. 2, K. 1).	kendaraan	alat transportasi, untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.	partai politik sebagai pengusung
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tertarik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden tahun 2014. (T. 5, P. 1, K. 1).	Menjaring	menangkap atau mendapatkan ikan, atau sesuatu dengan jaring.	mendapatkan beberapa orang dari sekian banyak orang
9	Namun, mengenai mekanisme penjaringan sudah ada kesepakatan. (T. 5, P. 3, K. 2).	penjaringan	proses menjaring (ikan)	Proses penyeleksian orang
10	"Selama ' perang ' itu argumentatif, ya sah-sah saja." (T. 7, P. 4, K. 2).	Perang	pertempuran (antar dua wilayah atau kelompok besar)	Kisruh akibat perbedaan pendapat antara pks dan demokrat
11	Menanggapi pertanyaan seputar kasus korupsi yang menjerat kader partai-partai besar, Wiranto mengatakan menyerahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memproses hukum. (T. 8, P. 3, K. 1).	Menjerat	mengikat dengan tali	ditangkap karena terlibat korupsi
12	"Itu biar saja dan agar ' dibersihkan ', makanya justru itu, Hanura bersyukur sampai saat ini masih bisa untuk mencegah kader-kader partai terjebak masalah itu," ujarnya. (T. 8, P. 3, K. 2).	Dibersihkan	dibuat supaya bersih (dari kotoran)	Ditangkap
13	Meski demikian, kata Wiranto untuk mencegah jeratan kasus korupsi tidak mudah, namun pihaknya berupaya tetap bisa mempertahankan predikat partai yang masih ' bersih '. (T. 8, P. 4, K. 1).	Bersih	bebas dari kotoran	bebas dari tindak korupsi
14	Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari	Berkah	karunia tuhan;	Keuntungan

	tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2, K. 2).			
15	Pasalnya, rakyat sudah semakin cerdas menilai sepak terjang partai dan politisi di jagad politik. (T. 16, P. 9, K. 2)	sepak terjang	Tendang	perbuatan

8.6 Tabel Interpretasi Temuan Diksi yang Berkaitan dengan Kata Bersinonim dan Berkonotasi

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 1	Kata <i>meredup</i> pada kata tersebut mempunyai makna konotasi, yaitu <i>kalah saing, kalah pamor</i>	Kata <i>meredup</i> merupakan bentuk konotasi tinggi
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 2	<i>Mengikhlaskan</i> memiliki makna konotasi, yaitu <i>merelakan</i> .	Kata <i>mengikhlaskan</i> merupakan bentuk konotasi tinggi dari <i>merelakan</i> . Ada unsur religius pada kata tersebut. namun, sesuai konteks kalimat, kata <i>mengikhlaskan</i> justru bertujuan menyindir, sehingga terjadi pergeseran nilai kata.
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 3	Kata <i>rotasi</i> memiliki makna konotatif yaitu <i>pergantian posisi jabatan, yang disa saja dinaikkan atau diturunkan</i> .	Ada usaha penggeneralisasian pada kata <i>rotasi</i> ini.
4	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 6, Tabel 8.5, no. 4-5	Kata <i>pintu</i> pada data tersebut bermakna <i>peluang</i>	Ada makna polisemi pada kata <i>pintu</i>
5	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 6-75	Kata <i>kendaraan</i> bermakna <i>partai politik sebagai pengusung</i>	Kata <i>kendaraan</i> bermakna polisemi.
6	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 8-9	Kata <i>menjaring</i> dan <i>penjaringan</i> bermakna <i>mendapatkan banyak orang</i>	Kata <i>menjaring</i> dan <i>penjaringan</i> mendapat perluasan makna, dari <i>menangkap ikan</i> , sekarang juga untuk <i>menangkap manusia</i> dalam hal abstrak.
7	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 10	Kata <i>perang</i> pada data tersebut bermakna perselisihan atau perdebatan antar dua kelompok	Makna kata <i>perang</i> di sini mengalami perluasan makna. Tadinya kata <i>perang</i> hanya digunakan <i>untuk perselisihan yang dilakukan dengan pertempuran</i> , namun pada data tersebut juga menggunakan kata <i>perang</i> bahkan untuk menggambarkan <i>perdebatan</i> .
8	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 11	Kata <i>menjerat</i> di sini bermakna ditangkap karena korupsi	Kata <i>menjerat</i> mengalami perluasan makna.
9	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 12-13	Kata <i>dibersihkan</i> dan <i>bersih</i> pada data bermakna ditangkap	Kata <i>dibersihkan</i> dan <i>bersih</i> dipilih untuk menggantikan kata <i>ditangkap</i> yang terasa lebih kasar.
10	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 14	Kata <i>berkah</i> di sini bermakna mendapat <i>keuntungan</i>	Kata <i>berkah</i> berkonotasi lebih tinggi, namun pada data tersebut, terlihat bahwa fungsinya untuk mengejek.
11	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.5, no. 15	Kata <i>sepak terjang</i> bermakna perbuatan	Kata <i>sepak terjang</i> memiliki konotasi negatif. Biasanya ditujukan untuk pelaku kejahatan.

8.7 Tabel Klasifikasi Diksi Ungkapan Asing dan Istilah yang Tidak Umum

No.	Kalimat/paragraf	kata	Penjelasan Makna yang Diberikan Wartawan di Dalam Teks
1	Ia menyebut harus ada perjanjian yang lebih <i>rigid</i> (keras), di samping aturan main untuk membentuk kesepakatan, sehingga perselisihan pun bisa dihindari. (T. 7, P. 3, K. 2).	<i>Rigid</i>	Keras
2	Partai Hanura menambah daftar parpol yang kehilangan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu legislatif DPR karena terganjal sistem " zipper " atau penempatan perempuan di setiap tiga calon. (t. 14, P. 4, K. 1).	<i>Zipper</i>	Penempatan perempuan di setiap tiga calon
	Penempatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan " zipper system " yang menuntut parpol menempatkan bacaleg perempuan di nomor urut kecil, misalnya 1, 2, 4, 5, 7, atau 8. (T. 14, K. 1, P. 5).	<i>zipper system</i>	
3	Politik dua kaki yang dimainkan PKS saat ini, dinilai pakar komunikasi politik, Heri Budianto menguntungkan partai tarbiyah tersebut. (T. 15, K. 1, P.).	politik dua kaki	Bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY dan di sisi lain tetap menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat
4	Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gunung Heryanto mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah memainkan politik dua muka dalam isu kenaikan harga BBM bersubsidi. (T. 16, P. 1, K. 1).	politik dua muka	PKS menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM.
5	Sebenarnya, lanjut Mahfud, gagasan sistem <i>primary election</i> yang digagas Demokrat sangat brilian. (T. 26, P. 3, K. 1).	<i>primary election</i>	membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi
6	Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan PKS tidak akan lolos " parliamentary threshold " (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2014 karena perolehan suaranya di bawah 3,5 persen. (T. 17, P. 1, K. 1).	<i>parliamentary threshold</i>	ambang batas parlemen di Pemilu 2014
7	Kalau tidak mencapai " electoral threshold " mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8, K. 3).	<i>electoral threshold</i>	(tidak ditemukan)

8.8 Tabel Interpretasi Temuan Diksi Ungkapan Asing dan Istilah yang Tidak Umum

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket
1	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.7, no. 1-6	Kata <i>Rigid</i> , <i>zipper</i> , <i>zipper system</i> , <i>politik dua kaki</i> , <i>politik dua muka</i> , <i>primary election</i> , dan <i>parliamentary threshold</i> pada data tersebut diiringi oleh penjelasan yang diberikan	Diksi ungkapan asing itu merupakan kata-kata dari bahasa asing yang digunakan untuk mewakili makna tertentu, dan istilah-istilah yang tidak umum merupakan istilah-istilah yang relatif baru beredar dimasyarakat. Jadi,

		wartawan terhadap maksud dari kata-kata tersebut.	wartawan harus memberikan gambaran mengenai arti dari ungkapan tersebut agar mudah dipahami setiap pembaca, karena masyarakat sebagai pembaca sangat heterogen.
7	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.7, no. 7	Pada data, kata <i>electoral threshold</i> sebagai ungkapan asing tidak diiringi oleh penjelasan mengenai makna dari kata ini.	-

8.9 Tabel Klasifikasi Kata Tidak Baku yang Ditemukan

No.	Kalimat	Kata Tidak Baku
1	" Gak disiapkan untuk itu (konvensi capres Demokrat)," kata Syarief Hasan, Sabtu (29/6). (T. 29, P. 2, K. 2).	gak
2	"Kita kan siapapun yang mau gabung, kita sangat berterima kasih. Apalagi mantan KSAD ini kan luar biasa." (T. 29, P. 3, K. 1).	kan
3	"Kalau (gubernur) yang sebelumnya kan beda, dia menengah ke atas. Saya setuju Jokowi jadi presiden," kata Inda. (T. 29, P. 8, K. 2).	kan
4	"Ini semacam ada 'generasi yang hilang', dulu Republik ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang mampu memerdekakan bangsa dan menjadi duta-duta yang tangguh di mata internasional." (T. 2, P. 12, K. 2).	dulu
5	" Tapi wacana tokoh muda itu memang terus berkembang. Bu Mega juga mendengar," ujar dia. (T. 1, P. 6).	tapi
6	" Tapi saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya. (T. 22, P. 5, K. 1).	tapi
7	"SBY bukan sekadar ketua umum tapi juga presiden," ujarnya. (T. 30, P. 5, K. 4).	tapi
8	" Ngurusin KJS sama rusun saja saya sudah loncat-loncat begini," kata Jokowi. (T. 21, P. 10, K. 1).	ngurusin
9	"Betul nggak dia sudah sesuai dengan konsumsi sebagai presiden," kata Effendi dalam diskusi di Universitas Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/6). (P. 2, K. 2).	nggak

Catatan: Kata-kata tidak baku yang ditemukan merupakan kata yang terdapat pada kalimat langsung dari narasumber. Hal ini diperbolehkan dalam penulisan kalimat jurnalistik untuk menjaga kemurnian kalimat yang diucapkan narasumber dan juga dapat menggambarkan karakter dari narasumber.

8.10 Tabel Interpretasi Temuan Kata Tidak Baku

Data	Temuan	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 8, Tabel 8.9, no. 1-8	Kata <i>gak, kan, dulu, tapi, ngurusin</i> , merupakan kata-kata dalam bahasa sehari-hari yang tidak baku/formal. Kata-kata ini tidak ditulis dengan cetak miring, sebagaimana semestinya.	Penggunaan kata tidak baku yang merupakan kata dari bahasa daerah yang populer digunakan masyarakat dapat mendekatkan emosi pembaca dengan teks yang kita tulis. Meski identik dengan penggunaan kata-kata yang populis, bahasa jurnalistik tetap harus menggunakan kata baku (Sumandiria, 2006). Kata tidak baku ditentukan dengan ada atau tidaknya kata dengan makna yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut di dalam KBBI.

Lampiran 9: Indikator Klasifikasi Penggunaan Kalimat pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

9.1 Penggunaan Variasi Pola Kalimat (Subjek, Predikat, Kata Modal, dan Kata Keterangan di Awal Kalimat), Kalimat Langsung dan Tidak Langsung, serta Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif

1. Subjek adalah pelaku atau yang melakukan pekerjaan/perbuatan. Secara umum, subjek biasanya diletakkan pada awal kalimat, kecuali pada kalimat inversi.
2. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek (Sumandi, 2009:57). Pada kalimat berpola inversi, predikat diletakkan pada awal kalimat. Pada kalimat tertentu, memungkinkan subjeknya dihilangkan untuk menghemat kata, sehingga predikat berada di awal kalimat.
3. Kata modal adalah kata berwarna. Kata modal bisa menegaskan suatu hal, tetapi juga bisa membuatnya menjadi mengambang, samar, tidak jelas, abu-abu. Contoh kata-kata modal: *mungkin, boleh jadi, boleh saja, bisa saja, barangkali, tampaknya, jangan-jangan, memang, harus, tentu, sesungguhnya, sebetulnya, sebenarnya, sering, jarang, ragu-ragu.*
4. Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran/ucapan diberi tanda petik (“...”).
5. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan hasil kutipan dalam bentuk kalimat berita, yang menyatakan peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan redaksi yang berbeda.
6. Kalimat aktif adalah kalimat yang fungtor S-nya melakukan sesuatu yang tersebut pada P (Sumandi, 2009:177).
7. Kalimat pasif adalah kalimat yang fungtor S-nya terkena sesuatu yang tersebut pada P (Sumandi, 2009:178).

9.2 Indikator Klasifikasi Penggunaan Kata Negasi sebagai Bentuk Variasi Kalimat dalam Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

Kalimat negatif atau penyangkalan adalah kalimat yang mengandung kata negasi, yakni kata tak, tidak, belum, dan bukan (Sumandiria, 2006:56)

9.3 Indikator Klasifikasi Kalimat yang Sebaiknya Digabung dengan Kalimat Sebelumnya akibat Penggunaan Konjungsi di Awal Kalimat yang Kurang Tepat.

Kalimat tunggal tidak boleh diawali dengan sebuah konjungsi. Apabila kalimat itu punya hubungan dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat itu tidak perlu berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, melainkan harus menjadi bagian (klausa) dari klausa sebelumnya sebagai sebuah kalimat majemuk (Chaer, 2010:75-76). Penggabungan kedua kalimat ini dapat dilakukan dengan mengubah tanda titik (.) sebagai pemisah antara dua kalimat dengan tanda koma (,).

Lampiran 10: Klasifikasi dan Interpretasi Data Penggunaan Variasi Kalimat pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

10.1 Tabel Klasifikasi Penggunaan Variasi Pola Kalimat (Subjek, Predikat, Kata Modal, dan Kata Keterangan di Awal Kalimat), Kalimat Langsung dan Tidak Langsung, serta Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif

No.	Kalimat	Subjek di Awal Kalimat	Predikat di Awal Kalimat	Kata Modal di Awal	Keterangan di Awal	Kalimat Langsung	Kalimat Tidak Langsung	Kalimat Aktif	Kalimat Pasif
1.	Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan meski banyak diunggulkan, sosok Joko Widodo masih perlu diuji. (T. 1, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
2.	"Jokowi dapat rating tinggi, populer iya, tapi dia harus diuji. (T. 1, P. 2, K.1).	✓				✓		✓	✓
3.	"Betul nggak dia sudah sesuai dengan konsumsi sebagai presiden," kata Effendi dalam diskusi di Universitas Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/6). (T. 1, P. 2, K. 2).		✓			✓		✓	
4.	Karena, lanjut Effendi, pemilihan presiden berbeda dengan pilkada. (T. 1, P.3, K. 1)						✓	✓	
5.	Ekspektasi masyarakat terhadap presiden pun berbeda dibanding harapan bagi gubernur. (T. 1, P.3, K. 2).	✓					✓	✓	
6.	Walaupun elektabilitasnya tinggi, Jokowi juga harus menguji dirinya sendiri. (T. 1, P. 3, K. 3).				✓		✓		
7.	Apakah memang mampu mengemban tanggung jawab memimpin negara. (T. 1, P. 3, K. 4).			✓			✓	✓	
8.	Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengungkapkan, dorongan untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi memang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (T. 1, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
9.	Tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg. (T. 1, P.4, K.2).						✓	✓	
10.	Megawati, menurutnya masih meminta semua kader untuk berkonsentrasi memenangkan pemilu legislatif 2014. (T. 1, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
11.	"Tapi wacana tokoh muda itu memang terus berkembang. Bu Mega juga mendengar," ujar dia. (T. 1, P. 6, K. 1)					✓		✓	
12.	<i>Board of Advisor</i> pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, optimistis pada 2014 Indonesia akan dipimpin presiden baru dari generasi baru. (T. 2, P. 1, K.1).	✓					✓	✓	
13.	"Akhirnya semakin nyata dan tampak jelas bahwa 2014 yang akan datang, satu tahun lagi, kita anak bangsa negeri ini akan memiliki Presiden baru, dari generasi baru," ujar Jeffrie, Ahad (6/2). (T. 2, P. 2, K.1).					✓		✓	
14.	Menurut dia, selain melalui konvensi capres Partai Demokrat, capres dari generasi baru juga akan hadir dari lingkungan PDI Perjuangan. (T. 2, P. 3, K. 1).		✓				✓	✓	
15.	Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengatakan bahwa Megawati menginginkan capres muda untuk 2014. (T. 2, P.3, K.	✓					✓		✓

	1).								
16.	"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali dan Mahfud MD. (T. 2, P. 4, K.1).	✓				✓		✓	
17.	Sedangkan dari lingkungan PDI Perjuangan beredar nama-nama seperti Jokowi, Puan Maharani dan yang baru saja memenangkan pemilu Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo," tutur Jeffrie. (T. 2, P. 4, K. 2).					✓		✓	
18.	Jeffrie menambahkan keenam nama tokoh muda itulah yang berpeluang menjadi Presiden RI berikutnya. (T. 2, P. 5, K. 1).	✓						✓	✓
19.	Ia menilai jagoan dari partai lain akan semakin meredup karena partai-partai lain menampilkan tokoh-tokoh dari generasi lama yang tidak dikehendaki oleh mayoritas masyarakat di negeri ini. (T. 2, P. 6, K. 1).	✓						✓	✓
20.	"Keresahan kita semua kalau Pilpres 2014 akan diisi oleh muka-muka lama saja telah berakhir." (T. 2, P. 7, K. 1).	✓				✓			✓
21.	"Untuk itu sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Megawati dan SBY." (T. 2, P. 7, K.2).					✓		✓	
22.	Menurut Jeffrie, kedua negarawan itu layak mendapat apresiasi karena telah mengiklaskan partainya melahirkan generasi baru untuk suksesi 2014 yang akan datang. (T. 2, P. 8, K.1).		✓					✓	✓
23.	Peneliti pada Maarif Institute, Endang Tirtana menambahkan, selain berbicara kepemimpinan Presiden dan wakilnya di 2014, pemilihan legislatif dan DPD juga harus menjadi perhatian penting. (T. 2, P. 9, K. 1).	✓						✓	✓
24.	"Keberadaan dua institusi ini adalah konsekuensi dari sistem bikameral yang kita anut, yang berperan dalam menghasilkan produk kebijakan." (T. 2, P. 10, K. 1).	✓				✓		✓	
25.	"Untuk itu perlu mendorong partisipasi aktif generasi muda baik sebagai pemilih, maupun sebagai kandidat," ungkap Endang. (T. 2, P. 10, K. 2).		✓			✓		✓	
26.	Ia mengaku sangat optimis anak-anak muda dapat mengambil peran dan kesempatan itu. (T. 2, P. 11, K. 1).	✓						✓	✓
27.	Menurut dia, hal itu sudah terlihat dari kepemimpinan di beberapa daerah yang dipimpin oleh anak-anak muda, baik itu di badan eksekutif, maupun legislatif. (T. 2, P. 11, K. 2)		✓					✓	✓
28.	"Namun, untuk kepemimpinan nasional, masih keliatan ada keengganan memberikan estafet kepemimpinan kepada yang muda, yang berkualitas, dan punya integritas." (T. 2, P. 12, K. 1).					✓		✓	
29.	"Ini semacam ada 'generasi yang hilang', dulu Republik ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang mampu memerdekakan bangsa dan menjadi duta-duta yang tangguh di mata internasional." (T. 1, P. 12, K. 2).	✓				✓			✓
30.	DPP Partai Hanura melakukan rotasi fraksi di DPR. (T. 3, P. 1, K. 1).	✓						✓	✓
31.	Ketua Fraksi Hanura Sunardi Ayub digantikan posisinya oleh Syarifuddin Sudding. (T. 3, P. 1, K. 2).	✓						✓	✓
32.	"Saat ini Ketua Fraksi Hanura di DPR di jabat oleh Syarifudin Sudding," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin melalui pesan singkat ke wartawan, Senin (3/6). (T. 3, P. 2, K. 1).					✓	✓		✓
33.	Saleh menyatakan rotasi fraksi merupakan arahan Ketua Umum Hanura, Wiranto. (T. 3, P. 3, K. 1).	✓						✓	✓

34.	Arahan itu disampaikan Ahad lalu dan resmi berlaku hari ini. (T. 3, P. 3, K. 2).	✓					✓		✓
35.	Saleh menyatakan rotasi fraksi dilakukan dalam rangka melakukan penyegaran. (T. 3, p. 3, k. 3).	✓					✓	✓	
36.	"Penyegaran dan rotasi pimpinan fraksi di DPR," ujar Saleh. (T. 3, P. 3, K. 4).	✓				✓		✓	
37.	Tak cuma di struktur fraksi, rotasi kepemimpinan juga dilakukan Hanura di lingkungan fraksi MPR dan jabatan alat kelengkapan DPR. (T. 3, P. 4, K. 1).				✓		✓	✓	
38.	Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh perihal rotasi di MPR. (T. 3, P. 4, K. 2).	✓					✓	✓	
39.	"Untuk susunan personalia fraksi Hanura di MPR biar Pak Erik Wardana yang menjelaskan," katanya. (T. 3, P. 4, K. 3).				✓	✓		✓	
40.	Saleh menyatakan Hanura berharap rotasi jabatan yang mereka lakukan bisa membuat kerja politik Hanura lebih dinamis. (T. 3, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
41.	Terlebih tahun ini merupakan tahun politik menuju 2014. (T. 3, P. 6, K. 1).						✓	✓	
42.	"Kita harapkan fraksi akan lebih bergerak dinamis dalam menyikapi situasi politik ke depan dan bekerja lebih taktis lagi," ujarnya. (T. 3, P. 7, K. 2).	✓				✓		✓	
43.	Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarak menilai konvensi yang akan dilakukan partainya merupakan kebutuhan nyata. (T. 4, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
44.	Sebab, saat ini sulit mencari bakal calon presiden di Pemilu 2014. (T. 4, P. 1, K. 2).						✓	✓	
45.	"Semua capres dari partai politik yang ada diragukan dan tidak ada satu pun yang diunggulkan. (T. 4, P. 2, K. 1).	✓				✓			✓
46.	"Namun saya tidak yakin bangsa sebesar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mumpuni," kata Ahmad Mubarak di Jakarta, Selasa (4/6). (T. 4, P. 2, K. 1).					✓		✓	
47.	Mubarak mengatakan, tidak ada tokoh besar dari internal Demokrat dan eksternal karena semuanya dipertanyakan. (T. 4, P. 3, K. 1).	✓				✓		✓	
48.	Misalnya ada tokoh yang semakin lama memasang iklan, maka semakin dipertanyakan publik. (T. 4, P. 3, K. 2).						✓		✓
49.	Konvensi itu, kata Mubarak, merupakan 'pintu' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun tidak memiliki partai dan tidak memiliki peluang. (T. 4, P. 3, K. 3).	✓					✓		✓
50.	"Konvensi ini sungguh karena realitasnya tidak ada orang yang layak dicalonkan menjadi presiden. (T. 4, P. 4, K. 1).	✓				✓		✓	
51.	"Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki kendaraan serta tidak ada peluang." (T. 4, P. 4, K. 2).		✓			✓		✓	
52.	"Maka kami membuka peluang tersebut," ujarnya menjelaskan. (T. 4, P. 4, K. 3).	✓				✓		✓	
53.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tertarik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden tahun 2014. (T. 5, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
54.	"Di PKB kita terapkan musyawarah, konvensi itu tidak punya sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu. (T. 5, P. 2, K. 1).				✓	✓		✓	

55.	Menurut Imam, saat ini PKB belum tertarik berbicara mengenai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. (T. 5, P. 3, K. 1).		✓				✓	✓	
56.	Namun, mengenai mekanisme penjangkaran sudah ada kesepakatan. (T. 5, P. 3, K. 2).						✓	✓	
57.	"Kita belum berpikir soal pilpres karena PKB hari ini fokus pada bagaimana memperoleh kursi di parlemen, dan target kami adalah 100 kursi, baru setelah itu bicara pencapresan," katanya. (T. 5, P. 4, K. 1).	✓				✓		✓	
58.	Meski demikian, Imam Nahrawi mengakui ada sejumlah figur yang memiliki kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang bagus, sehingga layak menjadi calon presiden. "Ada Mahfud MD, Rhoma Irama, dan sebagainya, kita lihat saja nanti bagaimana," katanya. (T. 5, P. 5, K. 1).						✓	✓	
59.	Yang jelas, kata Imam, persoalan kepada figur yang mana nanti dukungan PKB akan diarahkan, baru diputuskan setelah pemilihan anggota legislatif. (T. 5, P. 6, K. 1).	✓					✓	✓	
60.	Muhammadiyah melarang kader dan warganya untuk tidak memilih atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2013. (T. 6, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
61.	"Kami mendorong agar warga Muhammadiyah melaksanakan hak pilihnya pada Pilkada Jatim, serta Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di sela kunjungannya di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Kamis (6/6). (T. 6, P. 2, K. 1).	✓				✓		✓	
62.	Menurut dia, dengan memilih salah satu kandidat bisa disebut sebagai pendidikan politik yang baik di Indonesia. (T. 6, P. 3, K. 1).				✓		✓	✓	
63.	Namun, pihaknya tidak memaksa siapa-siapa tokoh yang akan dipilih di dalam tempat pemungutan suara nantinya. (T. 6, P. 3, K. 2).	✓					✓	✓	
64.	Ia menegaskan, Muhammadiyah sebagai ormas yang tidak memasuki area dukung-mendukung pasangan calon gubernur manapun. (T. 6, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
65.	Hal ini sesuai khittah, bahwa Muhammadiyah netral dan membebaskan warganya memilih sesuai hati nurani. (T. 6, P. 4, K. 2).	✓					✓	✓	
66.	"Dari awal, khittah Muhammadiyah sudah jelas dan tidak mau terjebak dalam kekuasaan politik tertentu." (T. 6, P. 4, K. 3).				✓	✓		✓	
67.	"Kami akan tegas memilih, namun tidak ada paksaan apapun," kata tokoh agama kelahiran Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958 tersebut. (T. 6, P. 4, K. 4).	✓				✓		✓	
68.	Jawa Timur, kata dia, merupakan provinsi terpenting di Tanah Air. (T. 6, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
69.	Pihaknya berharap proses demokrasi lima tahunan memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2014-2019 berjalan aman, lancar, tertib dan terpilih tokoh yang mampu membawa kedamaian, kemajuan serta kesejahteraan rakyatnya. (T. 6, P. 5, K. 2).	✓					✓	✓	
70.	"Kami yakin, pilihan masyarakat nantinya adalah yang terbaik dan benar-benar menjalankan amanat rakyat." (T. 6, p. 6, k. 1).	✓				✓		✓	
71.	"Apalagi, Jatim adalah provinsi terpenting dan memiliki pengaruh luar biasa di tingkat nasional," kata Din. (T. 6, P. 6, K. 2).					✓		✓	

72.	Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, berpendapat, kisruh antara partai politik koalisi, seperti Partai Demokrat dan PKS, karena perbedaan mereka dalam menafsirkan klausul koalisi. (T. 7, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
73.	PKS, kata Firman, menilai komitmen yang dibangun mereka bersama Setgab hanya mengacu pada hal-hal khusus. (T. 7, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
74.	Sementara, Demokrat menganggap koalisi yang dibentuk mencakup secara umum atau keseluruhannya. (T. 7, P. 2, K. 2).	✓					✓	✓	
75.	Karenanya, Firman mengusulkan dalam pemilihan presiden nantinya, koalisi dibentuk sebelum pilpres. (T. 7, P. 3, K. 1).	✓					✓	✓	
76.	Ia menyebut harus ada perjanjian yang lebih <i>rigid</i> (keras), di samping aturan main untuk membentuk kesepakatan, sehingga perselisihan pun bisa dihindari. (T. 7, P. 3, K. 2).	✓					✓	✓	
77.	Secara teoretis, masih kata Firman, tidak masalah bila kedua parpol itu bergulat di luar parlemen. (T. 7, P. 4, K. 1).				✓		✓	✓	
78.	"Selama 'perang' itu argumentatif, ya sah-sah saja." (T. 7, P. 4, K. 2).				✓	✓		✓	
79.	"Terlepas itu membawa manfaat atau tidak," tuturnya mengakhiri. (T. 7, P. 4, K. 3).	✓				✓		✓	
80.	Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan partainya sedang berjuang untuk menjadi partai papan atas. (T. 8, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
81.	"Karena itu perjuangan Hanura untuk menjadi bagian dari proses perubahan bangsa akan bisa kami lakukan kalau kami punya kekuatan, dan itu harus diperjuangkan melalui Pemilu (pemilihan umum 2014)," katanya di Bantul, Sabtu (8/6). (T. 8, P. 1, K. 2).					✓		✓	
82.	Usai peresmian memorial HM Soeharto di Kemusuk, Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiranto mengatakan Partai Hanura tidak akan main-main menghadapi Pemilu 2014. (T. 8, P. 2, K. 1).				✓		✓	✓	
83.	"Ini merupakan suatu momentum yang baik bagi Hanura untuk bisa menorehkan sejarah, bahwa partai Hanura benar-benar ingin melakukan suatu perubahan besar di negeri ini," katanya. (T. 8, P. 2, K. 2).	✓				✓		✓	
84.	Menanggapi pertanyaan seputar kasus korupsi yang menjerat kader partai-partai besar, Wiranto mengatakan menyerahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memproses hukum. (T. 8, P. 3, K. 1).		✓				✓	✓	
85.	"Itu biar saja dan agar 'dibersihkan', makanya justru itu, Hanura bersyukur sampai saat ini masih bisa untuk mencegah kader-kader partai terjebak masalah itu," ujarnya. (T.8, P. 3, K. 2).	✓				✓			✓
86.	Meski demikian, kata Wiranto untuk mencegah jeratan kasus korupsi tidak mudah, namun pihaknya berupaya tetap bisa mempertahankan predikat partai yang masih 'bersih. (T. 8, P. 4, K. 1).						✓	✓	
87.	Sementara itu, terkait pencalonan presiden (capres) dari Hanura yang menyebutkan dirinya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu tidak berkomentar panjang. (T. 8, P. 4, K. 2).				✓		✓	✓	
88.	"Itu jalan terus," katanya. (T. 8, P. 4, K. 3).	✓				✓		✓	
89.	Musisi dan Raja Dangdut Rhoma Irama tetap yakin dirinya akan maju sebagai calon presiden 2014 mendatang. (t. 9, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
90.	Ia mengungkapkan alasan utama mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 karena panggilan jiwa untuk ikut membangun bangsa ini. (t. 9, P. 1, K. 2).	✓					✓	✓	

91.	"Sebetulnya kelompok ulama maupun politikus pernah meminta saya untuk maju tahun 2004, sejak pertama kali bangsa ini memilih presiden secara langsung," katanya, Ahad (9/6). (T. 9, P. 1, K. 3).			✓		✓		✓	
92.	Kemudian di tahun 2009, dia mengaku juga dilamar menjadi calon wapres oleh seorang capres, tetapi saat itu dirinya sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun. (T. 9, P. 2, K. 1).					✓		✓	
93.	Ia mengatakan hal tersebut sebelum menjadi pembicara pada tabligh akbar peringatan Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW di Lapangan Krasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. (T. 9, P. 3, K. 1).	✓						✓	✓
94.	"Kali ini saya merasa terpanggil untuk membenahi bangsa ini karena saya melihat bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila," katanya. (T. 9, P. 3, K. 2).					✓	✓		✓
95.	Ia mengatakan, sebagai konsekuensi logis ketika dirinya dan Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai komitmen untuk 2014 tentu akan terus mempersiapkan diri. (T. 9, P. 4, K. 1).					✓		✓	✓
96.	Menyinggung dukungan terhadap dirinya maju capres, dia mengatakan, sebetulnya sudah 40 tahun dirinya keliling Indonesia dalam rangka memberikan pencerahan kepada bangsa melalui musik dan tabligh. (T. 9, P. 5, K. 1).		✓					✓	✓
97.	"Tabligh dan musik itu sudah merupakan pekerjaan saya, profesi saya sampai saat ini." (T. 9, P. 5, K. 2).	✓					✓		✓
98.	"Kebetulan ada pencapresan itu, jadi profesi yang selama ini saya geluti otomatis sebagai sosialisasi," katanya. (T. 9, P. 5, K. 3).		✓				✓		✓
99.	Ia berharap, dengan pencalonan tersebut suara PKB juga akan naik pada pemilihan legislatif 2014. (T. 9, P. 6, K. 1).	✓						✓	✓
100.	"Sebagai partai pengusung minimal harus memiliki kursi 20 persen di DPR." (T. 9, P. 6, K. 2).					✓	✓		✓
101.	"Jadi ada suatu kewajiban juga bagi saya untuk memperjuangkan PKB," katanya. (T. 9, P. 6, K. 3).		✓				✓		✓
102.	Ia menuturkan, konsep utama yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pencalonan, yakni memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendasar buat seluruh bangsa adalah masalah perut. (T. 9, P. 7, K. 1).	✓						✓	✓
103.	"Jadi siapa pun pemimpin bangsa ini harus memprioritaskan bagaimana ekonomi itu jauh lebih baik dan secara simultan baru membenahi akhlak bangsa ini yang saya lihat dalam dekadensi moral yang sangat parah," katanya. (T. 9, P. 7, K. 2).	✓					✓		✓
104.	Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem sebagus apapun dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan. (T. 9, P. 8, K. 1).		✓					✓	✓
105.	Menyinggung selain PKB apa ada partai lain yang telah mendekatinya, dia mengatakan, dalam konteks pilpres tidak perlu banyak partai, cukup satu partai. (T. 9, P. 8, K. 2).		✓					✓	✓
106.	Kalau tidak mencapai "electoral threshold" mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8, K. 3).		✓					✓	✓
107.	Ditanya tentang pasangan calon, dia juga belum mau menjawabnya. (T. 9, P. 9, K. 1).		✓					✓	✓
108.	"Sampai saat ini tidak ada pendekatan ke partai lain dan belum saatnya untuk bicara soal pasangan," katanya. (T. 9, P. 9, K. 2).					✓	✓		✓

109.	Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, berpendapat Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan akan sulit menjadi bakal calon presiden untuk pemilu 2014 karena semua partai politik sudah memiliki kandidat internal. (T. 10, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
110.	"Mereka (Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan) agak sulit karena tidak mempunyai 'kendaraan' untuk maju sebagai bakal capres," kata Iberamsjah kepada Antara di Jakarta, Senin (10/6). (T. 10, P. 2, K. 1).	✓				✓		✓	
111.	Menurut dia, pencitraan dan kinerja positif kedua orang tersebut di dalam pemerintahan hanya diperoleh dari hasil survei di masyarakat. (T. 10, P. 3, K. 1).	✓					✓		✓
112.	Namun, menurut dia, partai-partai politik akan sangat kuat untuk mendukung bakal capres dari internalnya, sedangkan konvensi pun tidak akan benar-benar mencari kandidat yang diinginkan masyarakat. (T. 10, P. 3, K. 2).	✓					✓	✓	
113.	"Misalnya Partai Demokrat hendak mengadakan konvensi, itu hanya bohongan saja." (T. 10, P. 4, K. 1).	✓				✓		✓	
114.	"Artinya mereka (Dahlan dan Gita) tidak memiliki 'kendaraan', sementara jalur independen (untuk kepresidenan-red) pun belum diatur dalam konstitusi Indonesia," ujarnya. (T. 10, P. 4, K. 2).	✓				✓		✓	
115.	Iberamsjah menjelaskan semua partai sudah memiliki kandidat bakal capres seperti Partai Golkar mengusung Aburizal Bakrie, PAN mengusung Hatta Rajasa, Partai Gerindra mengajukan Prabowo Subianto, dan Partai Hanura menjagokan Wiranto. (T. 10, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
116.	Partai politik dianggap masih main-main dalam menyiapkan syarat pencalonan untuk pemilu legislatif. (T. 11, P. 1, K. 1).	✓					✓		✓
117.	Terbukti dengan gugurnya empat partai di tujuh daerah pemilihan. (T.11, P. 1, K. 1).		✓				✓	✓	
118.	"Mereka gugur karena syarat keterwakilan perempuan." (T. 11, P. 2, K. 1).	✓				✓		✓	
119.	"Ironisnya karena persyaratan administrasi calon tersebut dan kesalahan penempatan nomor urut," kata Deputy Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz di Jakarta, Selasa (11/6). (T. 11, P. 2, K. 2).		✓			✓		✓	
120.	Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai. (T. 11, P. 3, K. 1).	✓					✓	✓	
121.	Karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan. (T. 11, P. 3, K. 2).	✓					✓		✓
122.	Begitu pula dengan penempatan nomor urut. (T. 11, P. 4, K. 1).		✓				✓	✓	
123.	KPU, menurutnya sudah melakukan sosialisasi cukup intensif kepada partai. (T. 11, P. 4, K. 21).	✓					✓	✓	
124.	Partai, lanjut Masykurudin, juga telah menyediakan petugas penghubung dengan KPU. (T. 11, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
125.	Harusnya, penghubung itu bisa memaksimalkan komunikasi dengan KPU. (T. 11, P. 5, K. 2).			✓			✓	✓	
126.	Memang, sambungnya, jumlah caleg yang gugur secara nasional tidak terlalu banyak. (T. 11, P. 6, K. 1).			✓			✓	✓	
127.	Tetapi gugurnya beberapa caleg tetap menandakan kurang tertibnya partai dalam menyiapkan kelengkapan administratif. (T. 11, P. 6, K. 2).		✓				✓	✓	
128.	"Parpol masih menganggap ada hal-hal yang bisa dikompromikan dengan KPU," ujarnya. (T. 11, P. 6, K. 3).	✓				✓		✓	

129.	KPU, tambahnya, harus tetap tegas dan tidak melunak. (T. 11, P. 7, K. 1).	✓					✓	✓	
130.	Karena yang diwajibkan kepada partai sudah tertera dalam UU Pemilu yang diturunkan dalam peraturan KPU. (T. 11, P. 7, K. 2).						✓		✓
131.	Artinya, prosedur yang ditempuh KPU sudah sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilu. (T. 11, P. 7, K. 3).						✓	✓	
132.	Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula. (T. 12, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
133.	"Kampanye itu (tatap muka) tidak semua publik tahu." (T. 12, P. 2, K. 1).	✓				✓		✓	
134.	"Karena itu peran media (televisi) bisa menyampaikan kandidat secara jujur mengenai calon tersebut," kata Ade Armando usai diskusi The Indonesian Institute bertajuk "Kiprah Media Massa Jelang 2014" di Jakarta, Rabu (12/6). (T. 12, P. 2, K. 2).					✓		✓	
135.	Ade mengatakan penggunaan media itu harus disesuaikan dengan psikologi kalangan muda yaitu pengetahuan mengenai pemilu. (T. 12, K. 1, P. 3).	✓					✓		✓
136.	Menurut dia, apabila hal itu bisa dilakukan maka tingkat partisipasi pemilih akan tinggi dalam pemilu. (T. 12, P. 3, K. 2).		✓				✓		✓
137.	"Bagaimana cara agar pemilih pemula mendapatkan informasi lebih dalam tidak hanya sekedar di permukaan saja." (T. 12, , P. 4 K. 1).		✓			✓		✓	
138.	"Karena itu diskusi penting dilakukan dalam kaitan ini," ujar Ade. (T. 12, P. 4, K. 2).	✓				✓			✓
139.	Menurutnya, kandidat yang sudah menyatakan diri maju dalam bursa bakal calon presiden (capres) maka orang tersebut harus sudah sosialisasi sejak saat ini. (T. 12, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
140.	Strategi itu dikatakan Ade terkait dengan bagaimana menjangkau pemilih pemula, perempuan, petani sehingga tidak perlu dilakukan secara diam-diam. (T. 12, P. 5, K. 2).	✓					✓		✓
141.	"Kampanye saja secara terbuka, beritahu mengenai konsepnya kepada publik." (T. 12, P. 6, K. 1).	✓				✓		✓	
142.	"Selain itu kandidat bisa mulai beriklan, diskusi, dan masuk ke kampus dan sekolah-sekolah karena itu adil dan publik akan menilainya," kata Ade. (T. 12, P. 6, K. 2).					✓		✓	
143.	Ia menilai karakter komunikasi politik yang bisa diterima pemilih pemula adalah konsep mengenai masa depan mereka yang bisa dijamin oleh kandidat. (T. 12, P. 7, K. 1).	✓					✓	✓	
144.	Menurut dia, kaum muda tidak hanya berorientasi pada hiburan saja tetapi mereka memikirkan masa depan mereka dan itu adalah aspirasi yang harus didengar kandidat. (T. 12, P. 7, K. 2).	✓					✓	✓	
145.	"Pemilih pemula memiliki agenda persoalan, seperti mau tidak mau mereka menghadapi dunia yang berubah ketika pasar bebas dibuka dan harus bersaing dengan orang lain." (T. 12, P. 8, K. 1).	✓				✓		✓	
146.	"Mereka butuh pekerjaan dan sekolah yang baik," ujarnya. (T. 12, P. 8, K. 2).	✓				✓		✓	
147.	Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, Dr Kadri. (T. 13, P. 1, K. 1).	✓					✓		✓
148.	Menurutnya, kemungkinan permainan politik uang pada Pemilu 2014 mendatang tak bisa dihindari, terutama karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. (T. 13, P. 2, K. 1).	✓					✓		✓

149.	Karenanya, Kadri mengimbau, sebaiknya partai politik yang harus mencegah politik uang untuk memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. (T. 13, P. 3, K. 1).						✓	✓	
150.	Praktik politik uang, kata Kadri, memang sulit dihilangkan. (T. 13, P. 3, K. 2).	✓					✓		✓
151.	Kadri berkata, seharusnya parpol menawarkan program, bukan membeli suara. (T. 13, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
152.	Sebab, hal itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. (T. 13, P. 4, K. 2).						✓	✓	
153.	KPU Provinsi NTB mengumumkan bakal caleg yang masuk DCS mulai Kamis (13/6) untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menilai mereka yang selanjutnya akan ditetapkan dalam daftar calon tetap (DPT). (T. 13, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
154.	Jumlah bakal caleg tingkat Provinsi NTB sebanyak 761 orang yang berasal dari 12 parpol. (T. 13, P. 6, K. 1).	✓					✓	✓	
155.	Setiap parpol menyerahkan 65 orang caleg ke KPU NTB. (T. 13, P. 6, K. 2).	✓						✓	
156.	Ada parpol yang menyerahkan bakal caleg yang jumlahnya kurang dari 65 orang. (T. 13, P. 6, K. 3).		✓					✓	
157.	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang. (T. 14, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
158.	"Karena ini merupakan pekerjaan manual, bukan kerja mesin, jadi sangat mungkin saja itu ada faktor 'human error' kurang cermatan dan kealpaan," ujar Ida Budhiati di Jakarta, Jumat (14/6). (T. 14, P. 2, K. 1).				✓	✓		✓	
159.	Ida mengatakan apabila terjadi kesalahan terhadap hasil DCS yang dilakukan penyelenggara pemilu, KPU akan memperbaikinya dan mengoordinasikan dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (T. 14, P. 2, K. 2).	✓					✓	✓	
160.	"Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu, seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga kordinasi dengan Bawaslu," kata Ida. (T. 14, P. 3, K. 1).				✓	✓		✓	
161.	Menurut Ida, pencermatan terhadap hasil DCS dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau masyarakat dan internal yaitu pihak penyelenggara pemilu sendiri. (T. 14, P. 3, K. 2).		✓				✓		✓
162.	Partai Hanura menambah daftar parpol yang kehilangan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu legislatif DPR karena terganjal sistem "zipper" atau penempatan perempuan di setiap tiga calon. (T. 14, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
163.	Dari 10 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di dapil Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Partai Hanura menempatkan perempuan di nomor urut 3, 6, 10. (T. 14, P. 4, K. 2).				✓		✓	✓	
164.	Penempatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan "zipper system" yang menuntut parpol menempatkan bacaleg perempuan di nomor urut kecil, misalnya 1, 2, 4, 5, 7, atau 8. (T. 14, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
165.	Kabar tentang tercoretnya satu dapil Hanura tersebut baru diketahui setelah pleno berita acara DCS dengan parpol dan KPU melansir hasil DCS ke situs resminya. (T. 15, P. 5, K. 2).	✓					✓		✓

166.	Politik dua kaki yang dimainkan PKS saat ini, dinilai pakar komunikasi politik, Heri Budianto menguntungkan partai tarbiyah tersebut. (T. 15, P. 1, K. 1).	✓					✓		✓
167.	Di satu sisi, PKS menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat. (T. 15, P. 2, K. 1).				✓		✓	✓	
168.	Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2, K. 2).				✓		✓	✓	
169.	Menurut Heri, secara ekonomis, menteri-menteri tersebut dipandang akan menguntungkan partai. (T. 15, P. 3, K. 1).	✓					✓		✓
170.	"Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi pendidikan politik tidak baik." (T. 15, P. 3, K. 2).					✓		✓	
171.	"Dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3, K. 3).					✓			✓
172.	Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. (T. 15, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
173.	Sikap itu memang akan sangat dilematis, tetapi bila PKS betul-betul berpihak pada rakyat maka keluar dari koalisi disebut Heri sebagai langkah paling baik. (T. 15, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
174.	Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gunung Heryanto mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah memainkan politik dua muka dalam isu kenaikan harga BBM bersubsidi. (T. 16, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
175.	Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM. (T. 16, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
176.	"Padahal tidak ada BLSM tanpa kenaikan BBM," kata Gunung ketika dihubungi Republika, Ahad (16/6). (T. 16, P. 2, K. 1).		✓			✓		✓	
177.	Politik dua muka PKS juga terlihat dari perbedaan pandangan di antara elite PKS yang di DPR dan yang di pemerintahan. (T. 16, p. 3, K. 1).	✓					✓	✓	
178.	Gunung menyatakan, perbedaan itu tidak berarti mencerminkan perpecahan di internal PKS. (T. 16, P. 3, K. 2).	✓					✓	✓	
179.	Menurutnya, perbedaan itu hanya sebatas peran yang mesti dijalankan masing-masing kelompok (elite). (T. 16, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
180.	"Kelompok yang antagonis dan verbal agresif menolak kenaikan harga BBM, sedangkan kelompok yang protagonis bersikap akomodatif terhadap kenaikan BBM," ujarnya. (T. 16, P. 4, K. 2).	✓				✓		✓	
181.	Gunung tidak heran dengan politik dua muka PKS. (T. 16, p. 5, k. 1).	✓					✓	✓	
182.	Sejak lama dia sudah membaca gambar-gembar PKS menolak kenaikan harga BBM hanya strategi pencitraan publik. (T. 16, P. 5, K. 2).				✓		✓	✓	
183.	Menurutnya, spanduk-spanduk menolak kenaikan harga BBM yang dipasang PKS tidak lebih dari ekspresi publisitas bukan substansi penolakan radikal. (T. 16, P. 6, K. 1).	✓			✓		✓	✓	
184.	"Dari awal apa yang beredar di berbagai ruang publik lebih merupakan ekspresi publisitas politik PKS," katanya. (T. 16, P. 6, K. 2).				✓	✓		✓	
185.	PKS hanya berpura-pura menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. (T. 16, P. 7, K. 1).	✓					✓	✓	
186.	Gunung percaya pada akhirnya PKS bakal menyetujui opsi kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah. (T. 16, P. 7, K. 2).	✓					✓	✓	

187.	Bahkan PKS juga akan ikut ambil bagian dalam program kompensasi BLSM. (T. 16, P. 8, K. 1).	✓					✓	✓	
188.	"Seolah-olah menolak tapi dalam praktik lanjutannya PKS akan saling mengakomodasi," katanya. (T. 16, P. 8, K. 2).		✓			✓		✓	
189.	PKS harus segera meninggalkan politik dua muka. (T. 16, P. 9, K. 1).	✓					✓	✓	
190.	Pasalnya, rakyat sudah semakin cerdas menilai sepak terjang partai dan politisi di jagad politik. (T. 16, P. 9, K. 2).						✓	✓	
191.	"Kalau terus seperti ini PKS akan ditinggalkan masyarakat," ujarnya. (T. 16, P. 9, K. 3).				✓	✓			✓
192.	Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan PKS tidak akan lolos "parliamentary threshold" (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2014 karena perolehan suaranya di bawah 3,5 persen. (T. 17, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
193.	"Pemilih PKS adalah orang yang terdidik dan menjunjung tinggi unsur-unsur moral. (T. 17, P. 2, K. 1).	✓				✓		✓	
194.	Apabila banyak elit PKS yang melakukan korupsi dan tindakan tidak bermoral maka konstituennya akan pergi ke partai yang relatif bersih," kata Toto Sugiarto kepada Antara di Jakarta, Senin. (T. 17, P. 2, K. 2).				✓	✓		✓	
195.	Toto mengatakan menurunnya suara PKS disebabkan pencitraan negatif terkait kasus yang menjerat mantan presidennya yaitu Luthfi Hasan Ishaq. (T. 17, P. 3, K. 1).	✓					✓		✓
196.	Hal itu, menurut dia, menyebabkan beralihnya suara konstituen partai tersebut ke partai lain yang masih dianggap bersih dari kasus hukum. (T. 17, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
197.	"Suara konstituen PKS akan menyeberang ke Partai Hanura dan PDI Perjuangan atau partai berbasis massa Islam namun persentasenya kecil. (T. 17, P. 5, K. 1).	✓				✓		✓	
198.	Politik itu berkaitan dengan pencitraan bagaimana dipersepsikan oleh masyarakat," ujarnya. (T. 17, P. 5, K. 2).	✓				✓		✓	
199.	Selain itu, menurut dia, suara Partai Demokrat juga diperkirakan akan menurun drastis di Pemilu 2014 hingga 12 persen dibandingkan Pemilu 2009. (T. 17, P. 6, K. 1).						✓		✓
200.	"Di Pemilu 2009 Demokrat meraih 20 persen maka di 2014 kemungkinan akan menurun hingga 12 persen sehingga diperkirakan hanya meraih 8 persen suara," (T. 17, P. 7, K. 1).				✓	✓		✓	
201.	Toto memperkirakan suara konstituen Demokrat akan pindah ke partai yang demokrat-nasionalis seperti Gerindra, Hanura, Golkar dan Nasional Demokrat. (T. 17, P. 8, K. 1).	✓					✓	✓	
202.	Sebelumnya survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2 persen dan PDI Perjuangan 12,7 persen. (T. 17, P. 9, K. 1).						✓	✓	
203.	Di bawah dua parpol itu, berurutan Partai Gerindra 7,3 persen, Partai Demokrat 7,1 persen, Partai Amanat Nasional 4 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 3,5 persen. (T. 17, P. 9, K. 2).				✓		✓	✓	
204.	Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 2,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan 2,2 persen, Partai Hanura 2,2 persen, Partai Nasdem 1,3 persen, Partai Bulan Bintang 0,4 persen, dan di urutan terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,2 persen. (T. 17, P. 10, K. 1).	✓					✓	✓	
205.	Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. (T. 17, P. 11, K. 1).	✓					✓		✓

206.	Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrat menguasai pemilu 2009 dengan perolehan suara sebesar 20,81 persen dari total perolehan suara. (T. 17, P. 12, K. 1).				✓		✓	✓	
207.	Pemilu 2009, PKS memperoleh suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,9 persen dan mendapat 57 kursi di DPR (10 persen). (T. 17, P. 12, K. 2).				✓		✓	✓	
208.	Ketua PP Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) Muhammad Pradana Indraputra menyerukan agar mahasiswa tidak menjadi golongan putih alias golput dalam berbagai pemilu di Indonesia termasuk pilpres. (T. 18, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
209.	"Sangat berbahaya jika para mahasiswa bersikap apatis dalam pemilu sebab masa depan bangsa ditentukan oleh pemilu," katanya di Jakarta, Selasa, (18/6). (T. 18, P. 2, K. 1).		✓			✓		✓	
210.	Menurutnya, saat ini mahasiswa sudah banyak yang tidak peduli dengan politik. Ini merupakan cerminan awal kerusakan generasi baru di Tanah Air. (T. 18, P. 3, K. 1).		✓				✓	✓	
211.	"Siapa yang akan memimpin bangsa jika mahasiswa sudah tidak peduli dengan politik dan pemerintahan," ujar Dana. (T. 18, P. 4, K. 1).	✓				✓		✓	
212.	Dana mengatakan memang benar bahwa saat ini banyak politisi yang busuk dan korupsi, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif. (T. 18, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
213.	Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membersihkan korupsi dari dalam dengan ikut pemilu dan tidak bersikap apatis. (T. 18, P. 5, K. 2).	✓					✓	✓	
214.	"Kalau apatis, bahayanya malah yang terburuk terpilih di antara yang buruk, ini mengerikan," kata Dana. (T. 18, P. 6, K. 1).				✓	✓		✓	
215.	Kesadaran berpolitik dan bernegara di kalangan mahasiswa harus digalakkan. (T. 18, P. 7, K. 1).	✓					✓		✓
216.	Misalnya, kampus-kampus melakukan kajian politik dan kebangsaan secara rutin. (T. 18, P. 7, K. 2).	✓					✓	✓	
217.	Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partai yang dipimpinnnya bakal menjadi oposisi apabila dalam Pemilu 2014 gagal masuk dua besar dalam perolehan suara. (T. 19, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
218.	"Menjadi oposisi memang tidak enak." (T. 19, P. 2, K. 1).		✓			✓		✓	
219.	"Nasdem akan jadi oposisi bila tidak masuk dua besar (dalam Pemilu 2014)," katanya pada acara orientasi calon legislatif Partai Nasdem Jawa Tengah di Solo, Rabu (19/6). (T. 19, P. 2, K. 2).	✓				✓		✓	
220.	Bagi Nasdem, kata dia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sangat menentukan perolehan suara dalam Pemilu 2014. (T. 19, P. 3, K. 1).				✓		✓	✓	
221.	Ia mengatakan untuk di Jawa Tengah ini tercatat sebanyak 1.747 calon legislatif baik untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (T. 19, P. 3, K. 2).	✓					✓	✓	
222.	"Untuk itu kami minta semua calon tersebut bisa bekerja keras agar bisa membawa perubahan bagi bangsa ini," katanya. (T. 19, P. 4, K. 1).					✓		✓	
223.	Dikatakannya, Partai Nasdem didirikan bukan sekadar untuk ikut Pemilu 2014, melainkan mempunyai tujuan mulia, yaitu membawa perubahan demi bangsa dan negara ini. (T. 19, P. 5, K. 1).	✓					✓		✓
224.	"Sekarang ini memang ada pandangan yang sinis dan bahkan tidak percaya partai politik di negara ini." (T. 19, P. 6, K. 1).				✓	✓		✓	
225.	"Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, keberadaan demokrasi di Tanah Air akan terancam." (T. 19, P. 6, K. 2).				✓	✓			✓

226.	"Padahal keberadaan partai politik sangat strategis." (T. 19, P. 6, K. 3).	✓				✓		✓	
227.	"Tampilnya Partai Nasdem ini akan membawa pembaruan," katanya. (T. 19, P. 6, K. 4).	✓				✓		✓	
228.	"Apabila partai politik itu kuat dan sehat, akan timbul partisipasi yang kuat dari rakyat." (T. 19, P. 7, K. 1).	✓				✓		✓	
229.	"Akan tetapi, kalau partai politik udah kehilangan arah artinya demokrasi terancam." (t. 19, P. 7, K. 2).				✓	✓		✓	
230.	"Hal ini tugas kader-kader Partai Nasdem untuk melakukan perubahan," kata bos Metro TV tersebut. (T. 19, P. 7, K. 3).	✓				✓		✓	
231.	Ia mengatakan Nasdem merupakan satu-satunya partai baru yang ikut Pemilu 2014, sehingga harus bisa memperbaiki keadaan yang ada sekarang ini agar menjadi lebih baik lagi. (T. 19, P. 8, K. 1).	✓					✓	✓	
232.	Untuk mencapai perubahan ini, katanya, moral politik harus dikedepankan. (T. 19, P. 9, K. 1).				✓		✓	✓	
233.	"Masyarakat sekarang ini sudah cerdas, apabila dalam berpolitik itu mengedepankan moral yang baik pasti akan mendapau dukungan dari rakyat," ujar Surya Paloh. (T. 19, P. 9, K. 2).	✓				✓		✓	
234.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah menerima 20 laporan masyarakat tentang daftar caleg sementara (DCS). (T. 20, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
235.	Saat ini, laporan tersebut tengah dipilah dan dipastikan bukan hanya surat kaleng untuk merugikan calon tertentu. (T. 20, P. 1, K. 2).				✓		✓		✓
236.	Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, selanjutnya laporan itu akan diklarifikasi kepada partai politik. (T. 20, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
237.	Sesuai PKPU 6/2013, partai akan dimintai klarifikasi atas masukan yang diberikan masyarakat dari 28 Juni hingga 7 Juli 2013. (T. 20, P. 2, K. 2).				✓		✓		✓
238.	Jika DCS diganti, pemberitahuannya dilakukan pada 5 sampai dengan 18 Juli 2013. (T. 20, P. 2, K. 3).				✓		✓		✓
239.	KPU, jelas Ferry, telah memaksimalkan sosialisasi DCS sesuai dengan aturan yang ada. (T. 20, P. 3, K. 1).	✓					✓	✓	
240.	Selain mengumumkan DCS lewat kanal KPU, DCS juga dipublikasikan melalui surat kabar nasional dan media penyiaran. (T. 20, P. 3, K. 2).		✓				✓	✓	
241.	"Dalam kanal KPU, masyarakat juga bisa mengakses profil masing-masing caleg," katanya, Kamis (20/6). (T. 20, P. 3, K. 3).				✓	✓		✓	
242.	Sejumlah warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon presiden 2014-2019 pada Pemilu 2014. (T. 21, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
243.	Beberapa warga yang ditemui Antara di Jakarta, Jumat menyatakan alasannya, karena mantan wali kota Solo itu terus turun ke bawah untuk menemui warganya untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka. (T. 21, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
244.	"Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. (T. 21, P. 3, K. 1).	✓				✓		✓	
245.	Menurut dia, jasa Jokowi sudah diakui dari tingkat wilayah hingga Asia, bahkan dunia. (T. 21, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	

246.	Saat menjabat sebagai wali kota Surakarta, Jokowi terpilih menjadi wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012 yang di selenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan walikota sedunia di Inggris. (T. 21, P. 4, K. 1).				✓		✓	✓	
247.	Setelah tujuh tahun memimpin Surakarta, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012. (T. 21, P. 5, K. 1).				✓		✓	✓	
248.	Menurut survei yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi menjadi kandidat presiden yang paling diminati oleh responden. (T. 21, P. 6, K. 1).				✓		✓	✓	
249.	Dari 1.635 responden di 31 provinsi, Jokowi mendapatkan 28.6 persen. (T. 21, P. 7, K. 1).				✓		✓	✓	
250.	Angka tersebut melampaui dukungan untuk Prabowo Subianto (15.6 persen) dan Megawati Soekarnoputri (5.4 persen). (T. 21, P. 7, K. 2).	✓					✓	✓	
251.	Seorang karyawan, Inda (29), menyatakan menyetujui Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden karena gubernur DKI Jakarta tersebut mau turun langsung membantu warga menengah kebawah. (T. 21, K. 1, P. 8).	✓					✓	✓	
252.	"Saya senang gubernurnya Jokowi, untuk menengah ke bawah dia itu mau (merangkul)." (T. 21, P. 9, K. 1).	✓					✓	✓	
253.	"Kalau (gubernur) yang sebelumnya kan beda, dia menengah ke atas. Saya setuju Jokowi jadi presiden," kata Inda. (T. 21, P. 8, K. 2).	✓					✓	✓	
254.	Walaupun Jokowi mendapat respon positif dari warga tentang capres 2014, Jokowi sendiri menegaskan ia belum berminat menjadi capres dan lebih tertarik membenahi persoalan kota Jakarta. (T. 21, P. 9, K. 1).				✓		✓	✓	
255.	"Ngurusin KJS sama rusun saja saya sudah loncat-loncat begini," kata Jokowi. (T. 21, P. 10, K. 1).		✓				✓	✓	
256.	Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengingatkan persaingan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang akan sangat ketat. (T. 22, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
257.	Karenanya, kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) Golkar, ia berharap terus berjuang memenangkan Golkar. (T. 22, P. 2, K. 1).				✓		✓	✓	
258.	"Saya yakin calon legislatif di seluruh tigtakan dari kabupaten dan kota, provinsi serta pusat pasti ingin memenangkan pemilu legislatif tersebut." (T. 22, P. 3, K. 1).	✓					✓	✓	
259.	"Gunakan strategi yang tepat untuk menarik simpati masyarakat," kata pria yang akrab disapa Ical itu di Nusa Dua, Bali, Jumat (21/6) petang. (T. 22, P. 3, K. 2).		✓				✓	✓	
260.	Saat membuka pembekalan caleg se-Indonesia dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ical mengatakan, tanpa kerja keras mustahil akan lolos dalam pemilu legislatif mendatang. (T. 22, P. 4, K. 1).				✓		✓	✓	
261.	"Tapi saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya. (T. 22, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	

262.	Dalam acara yang dihadiri ribuan kader Partai Golkar, Ical berharap para kader yang menjadi caleg untuk sungguh-sungguh, sehingga bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. (T. 22, P. 6, K. 1).				✓		✓	✓	
263.	Golkar, sebut Ical, adalah partai milik rakyat. (T. 22, P. 6, K. 2).	✓					✓	✓	
264.	Karenanya Ical berharap rakyat memberikan kepercayaannya kepada Golkar, sehingga partai berlambang pohon beringin itu bisa memperjuangkan kehendak rakyat. (T. 22, P. 6, K. 3).	✓					✓	✓	
265.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada keputusannya untuk menggugurkan semua bakal calon legislatif (caleg) di beberapa daerah pemilihan (dapil). (T. 23, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
266.	KPU melakukan pencoretan karena ada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. (T. 23, K. 2, P. 1).	✓					✓	✓	
267.	Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya hanya melaksanakan aturan yang ada. (T. 23, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
268.	KPU juga sudah menyusun Daftar Calon Sementara (DCS). Hadar justru mempertanyakan parpol yang baru mempertanyakannya. (T. 23, P. 2, K. 2).	✓					✓	✓	
269.	"Semua partai sudah mengikutinya." (T. 23, P. 3, K. 1).	✓				✓		✓	
270.	"Agak membingungkan kalau begitu kena, baru dipermasalahkan," kata Hadar saat dihubungi <i>Republika</i> di Jakarta, Ahad (23/6). (T. 23, P. 3, K. 2).		✓		✓	✓		✓	
271.	KPU sebelumnya mencoret caleg dari lima partai politik yang kedatangan tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. (T. 23, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
272.	Partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), Partai Amanat Nasional (Dapil Sumatera Barat I), dan Gerindra (Dapil Jawa Barat IX). (T. 23, P. 4, K. 2).	✓					✓	✓	
273.	Partai lainnya yang terkena pencoretan ini adalah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I), serta Hanura (Dapil Jawa Barat II). (T. 23, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
274.	Beberapa parpol mengadukan pencoretan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (T. 23, P. 6, K. 1).	✓					✓	✓	
275.	Hadar mempersilahkan parpol untuk mengadu. (T. 23, P. 6, K. 2).	✓					✓	✓	
276.	Ia mengatakan, KPU akan mengikuti ketentuan yang berlaku. (T. 23, P. 6, K. 3).	✓					✓	✓	
277.	"Ajukan saja, kami akan mengikutinya," kata dia. (T. 23, P. 6, K. 4).		✓			✓		✓	
278.	Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika tak menggandeng Demokrat dan Gerindra. (T. 24, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
279.	"Namun tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. (T. 24, P. 2, K. 1).			✓			✓	✓	
280.	Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 2, K. 2).	✓				✓		✓	

281.	Saat ditanya siapa tokoh Golkar yang berpeluang untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, Jeffrie menjawab tokoh Golkar agar memiliki dasar untuk mengambil-alih Golkar pada munas 2015. (T. 24, P. 3, K. 1).				✓		✓	✓	
282.	"Kemudian Golkar pascamunas tersebut akan berkoalisi dengan PDIP," ungkapinya. (T. 24, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
283.	Menurut Jeffrie, Jokowi sebagai capres dari generasi baru tentu harus mencari cawapres yang punya senioritas dalam politik Indonesia, seperti halnya Obama dengan Joe Biden. (T. 24, P. 5, K. 1).		✓				✓	✓	
284.	"Tokoh Golkar senior tersebut juga sebaiknya mempunyai kemampuan diplomasi luar negeri yang baik, mengingat Jokowi akan fokus mengurus dalam negeri," papar Jeffrie. (T. 24, P. 6, K. 1).	✓					✓	✓	
285.	Cawapres yang ideal mendampingi Jokowi, kata dia, harus memiliki latar belakang militer. (T. 24, P. 7, K. 1).	✓					✓	✓	
286.	"Kalau sipil, ya sipil yang tegas dan berani." (T. 24, P. 7, K. 2).				✓	✓		✓	
287.	Lebih baik lagi, tutur Jeffrie, cawapresnya berbeda sukunya dengan Jokowi. (T. 24, P. 8, K. 1).				✓		✓	✓	
288.	Semakin sempurna kalau juga memiliki basis dukungan dari masyarakat yang sudah terbukti. (T. 24, P. 8, K. 2).				✓		✓	✓	
289.	"Kalau itu terjadi maka partai penguasa pasca2014 adalah PDIP didukung Golkar dengan partai penyeimbang pemerintahan yang dipimpin Demokrat. (T. 24, P. 9, K. 1).				✓	✓		✓	
290.	Kita lihat saja tidak lama lagi, satu tahun lagi," ungkap Jeffrie. (T. 24, P. 9, K. 2).	✓					✓	✓	
291.	Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, menambahkan, pada era kepemimpinan SBY, koalisi yang terbangun adalah model multi-partai, yang terdiri dari banyak partai. (T. 24, P. 10, K. 1).	✓					✓	✓	
292.	"Sehingga kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama." (T. 24, P. 11, K. 1).		✓				✓	✓	
293.	"Koalisi sekarang yang tergabung dalam setgab, kental dengan kepentingan-kepentingan politis sehingga membuat keputusan-keputusan yang memerlukan tindakan cepat sulit dilakukan," ujar Endang. (T. 24, P. 11, K. 2).	✓					✓	✓	
294.	Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya satu partai penguasa dan satu partai oposisi, kata Endang, Indonesia dengan multipartai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. (T. 24, P. 12, K. 1).		✓		✓		✓	✓	
295.	"Dan dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan "strong leadership" kepemimpinan yang kuat dan tegas." (T. 24, P. 13, K. 1).				✓	✓			✓
296.	"Jika tidak, sulit rasanya untuk melakukan gebrakan dalam pembangunan," papar Endang. (T. 24, P. 13, K. 1).				✓	✓		✓	
297.	Kedepannya, kata dia, ada baiknya koalisi yang dibentuk dengan lebih sedikit partai, sehingga memudahkan dalam melakukan kebijakan dan kontrol. (T. 24, P. 14, K. 1).				✓		✓		✓
298.	Namun, menurut Endang, pemilihan partai koalisi harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pileg. (T. 24, P. 15, K. 1).						✓	✓	

299.	Karena jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. (T. 24, P. 15, K. 2).				✓		✓	✓	
300.	"Namun sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa." (T. 24, P. 15, K. 1).						✓	✓	
301.	"Koalisi akan mulai terbaca pasca Pileg tentunya." (T. 24, P. 15, K. 2).	✓					✓	✓	
302.	Namun, menurut Endang, pemilihan partai koalisi harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pileg. (T. 24, P. 15, K. 1).				✓	✓		✓	
303.	Komisiner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, jika memang kemudian diketahui melakukan kesalahan, maka bisa saja terjadi perubahan. (T. 25, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
304.	Tetapi Ferry cukup yakin proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap bacaleg telah dilakukan sesuai prosedur. (T. 25, P. 2, K. 2).						✓		✓
305.	Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, KPU memang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan parpol terkait pencoretan dapil. (T. 25, P. 3, K. 1).	✓					✓	✓	
306.	"Calon yang tidak memenuhi syarat itu taruhannya besar." (T. 25, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
307.	"Masak mengorbankan dapil, tak berkeadilan," ujarnya, Selasa (25/6). (T. 25, P. 14, K. 2).		✓				✓	✓	
308.	Sebelumnya, Bawaslu optimis sengketa pemilu terkait pencoretan dapil bisa diselesaikan dengan mediasi saja. (T. 25, P. 5, K. 1).						✓		✓
309.	Dikatakan, partai politik yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat di beberapa dapil, bisa mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu. (T. 25, P. 5, K. 2).		✓				✓	✓	
310.	Saat ini, ada empat partai, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKPI, yang masih dalam tahap melengkapi gugatan. (T. 25, P. 5, K. 3).				✓		✓	✓	
311.	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, p. 1, k. 1).	✓					✓	✓	
312.	Pasalnya, belum ada kejelasan waktu dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. (T. 16, P. 2, K. 1).						✓	✓	
313.	"Apa yang dilakukan Demokrat belum jelas juga, dulu katanya Juni, lalu mundur Agustus, mundur lagi September," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (26/6). (T. 26, P. 2, K. 2).	✓					✓	✓	
314.	Sebenarnya, lanjut Mahfud, gagasan sistem <i>primary election</i> yang digagas Demokrat sangat brilian. (T. 26, P. 3, K. 1).			✓			✓	✓	
315.	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konsttusi. (T. 26, P. 3, K. 2).	✓					✓	✓	
316.	Karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi. (T. 26, P. 3, K. 3).	✓					✓	✓	
317.	Tetapi, ide konvensi yang diusung Demokrat menurutnya perlu diperjelas. (T. 26, P. 4, K. 1).	✓					✓	✓	
318.	Jangan sampai sistem konvensi itu hanya sebagai kamufase. (T. 26, P. 4, K. 2).	✓					✓	✓	
319.	Padahal, tuturnya, Demokrat sudah menyiapkan calon tertentu yang sudah disiapkan untuk menang. (T. 26, P. 4, K. 3).		✓				✓	✓	

320.	Apa lagi, Partai Demokrat juga harus bergelut dengan persoalan kader dan non kader. (T. 26, P. 5, K. 1).	✓					✓	✓	
321.	Lalu belum ditegaskan apakah peserta konvensi harus menjadi anggota partai terlebih dahulu atau tidak. (T. 26, P. 5, K. 2).	✓					✓		✓
322.	"Jadi belum (akan ikut), karena itu tadi, kapan dibuka, kalau dibuka mau daftar kemana, aturan belum ada." (T. 26, P. 6, K. 1).		✓			✓		✓	
323.	"Misalnya ikut, hak dan kewajibannya belum jelas," ungkap Mahfud. (T. 26, P. 6, K. 2).		✓			✓		✓	
324.	Meski begitu, Mahfud mengaku akan tetap mengikuti perkembangan persiapan konvensi dari Partai Demokrat. (T. 26, P. 7, K. 1).	✓					✓	✓	
325.	Termasuk mengamati orang-orang yang mungkin diajak atau dimasukkan Demokrat dalam konvensi capres tersebut. (T. 26, P. 7, K. 2).		✓				✓	✓	
326.	Hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan calon presiden dengan elektabilitas tertinggi masih ditempati Joko Widodo. (T. 27, P. 1, K. 1).	✓					✓	✓	
327.	Tingkat keterpilihan gubernur DKI itu mengalahkan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri. (T. 27, P. 2, K. 1).	✓					✓	✓	
328.	Berikut elektabilitas tokoh-tokoh yang dipilih responden bila pemilihan presiden dilakukan, berdasarkan kajian P2P LIPI yang dipaparkan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6), 1. Joko Widodo 22.6 persen 2. Prabowo Subianto 14.2 persen 3. Aburizal Bakrie 9.4 persen 4. Megawati Soekarnoputri 9.3 persen 5. Jusuf Kalla 4.2 persen 6. Rhoma Irama 3.5 persen 7. Wiranto 3.4 persen 8. Mahfud MD 1.9 persen 9. Hatta Rajasa 1.2 persen 10. Sri Sultan HB X 1.2 11. Surya Paloh 1.2 persen 12. Lainnya 4.4 persen (T. 27, p. 2, k. 2).	✓					✓	✓	
329.	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. (T. 28, p. 1, k. 1).	✓					✓	✓	
330.	"Hasil survei itu berbeda-beda dari lembaga satu ke lembaga lain." (T. 28, p. 2, k. 1).	✓				✓			
331.	"Sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (T. 28, p. 2, k. 2).		✓			✓			✓
332.	Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Jumat (28/6). (T. 28, p. 3, k. 1).				✓		✓	✓	
333.	Dalam survei mengenai partisipasi politik dan perilaku memilih pra Pemilu 2014, partai bernomor urut 10 tersebut juga berada di nomor yang sama atau urutan tiga dari bawah dibandingkan partai politik lainnya. (T. 28, p. 4, k. 1).				✓		✓	✓	
334.	Menurutnya, survei tersebut masih bersifat subjektif, karena		✓				✓	✓	

	berbeda hasilnya dengan survei lain. (T. 28, p. 4, k. 2).								
335.	"Coba melihat survei dari lembaga lainnya." (T. 28, p. 5, k. 1).		✓			✓		✓	
336.	"Bahkan ada lembaga yang merilis hasil Partai Hanura berada di urutan ke-4," kata mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut. (T. 28, p. 5, k. 2).		✓			✓		✓	
337.	Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah jika mantan KSAD, Jenderal (purn) TNI, Pramono Edhie Wibowo disiapkan untuk menjadi capres pada konvensi Demokrat. (T. 29, p. 1, k. 1).	✓					✓	✓	
338.	Syarief Hasan mengatakan, semakin banyak orang yang bergabung dengan PD akan semakin bagus. (T. 29, p. 2, k. 1).	✓					✓	✓	
339.	"Gak disiapkan untuk itu (konvensi capres Demokrat)," kata Syarief Hasan, Sabtu (29/6). (T. 29, p. 2, k. 2).		✓			✓			✓
340.	"Kita <i>kan</i> siapapun yang mau gabung, kita sangat berterima kasih. Apalagi mantan KSAD ini <i>kan</i> luar biasa." (T. 29, p. 3, k. 1).	✓				✓		✓	
341.	"Darah segar bagi PD." (T. 29, p. 3, k. 2).	✓				✓		✓	
342.	Syarif juga menilai wajar jika Pramono ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pembina Demokrat. (T. 29, p. 4, k. 1).	✓					✓	✓	
343.	Sebab, ia cukup senior dan memiliki kemampuan yang bagus. (T. 29, p. 4, k. 2).	✓					✓	✓	
344.	"Sangat pantas jadi anggota dewan Pembina," katanya mengakhiri. (T. 29, p. 4, k. 3).		✓			✓		✓	
345.	Bergabungnya Pramono Edhie Wibowo ke Partai Demokrat diprediksi bakal meningkatkan suhu persaingan calon presiden (capres) di internal Demokrat. (T. 30, p. 1, k. 1).	✓					✓		✓
346.	Pramono bakal menjadi ancaman serius bagi Marzuki Alie di bursa konvensi capres. (T. 30, p. 1, k. 2).	✓					✓	✓	
347.	"Pak Pramono akan menjadi pesaing ketat Pak Marzuki," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Minggu (30/6). (T. 30, p. 2, k. 1).	✓				✓		✓	
348.	Peluang Marzuki mendapat restu SBY di konvensi capres Demokrat tidaklah sebesar Pramono. (T. 30, p. 3, k. 1).	✓					✓	✓	
349.	Indikasinya menurut Siti terlihat dari sikap politik SBY yang tidak merestui Marzuki menjadi ketua umum Demokrat saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu. (T. 30, p. 3, k. 2).						✓	✓	
350.	Bergabungnya Pramono menjadi sinyal kuat bakal kemana arah restu SBY untuk capres mendatang. (T. 30, p. 3, k. 3).	✓					✓	✓	
351.	"Kehendak SBY menjadi Pramono sebagai capres sudah tak terbendung," ujarnya. (T. 30, p. 3, k. 4).	✓				✓		✓	
352.	Dukungan SBY terhadap Pramono belum tentu berdampak positif bagi Demokrat. (T. 30, p. 4, k. 1).	✓					✓	✓	
353.	Pasalnya publik bisa menganggap konvensi capres Demokrat hanya sekadar akal-akalan belaka. (T. 30, p. 4, k. 2).	✓					✓	✓	
354.	Konvensi tidak diadakan untuk mencari figur pemimpin terbaik melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga. (T. 30, p. 4, k. 3).	✓					✓		✓
355.	"Publik bisa menganggap konvensi hanya topeng demokrasi," katanya. (T. 30, p. 4, k. 4).	✓				✓		✓	
356.	Siti mengatakan dukungan SBY merupakan kunci penentu siapa capres Partai Demokrat di 2014. (T. 30, p. 5, k. 1).	✓					✓	✓	

357.	Hal ini karena menurutnya SBY memiliki otoritas yang besar baik sebagai ketua umum maupun ketua majelis tinggi. (T. 30, p. 5, k. 2).	✓					✓	✓	
358.	Terlebih, imbuhi Siti, saat ini nyaris tidak ada satu faksipun yang bisa menandingi faksi Cikeas di Demokrat. (T. 30, p. 5, k. 3).				✓		✓	✓	
359.	“SBY bukan sekadar ketua umum tapi juga presiden,” ujarnya. (T. 30, p. 5, k. 4).	✓				✓			
Jumlah		210	48	6	64	126	231	309	48

10.2 Tabel Interpretasi Temuan Penggunaan Variasi Pola Kalimat (Subjek, Predikat, Kata Modal, dan Kata Keterangan di Awal Kalimat), Kalimat Langsung dan Tidak Langsung, serta Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif

No.	Variasi-variasi kalimat yang diteliti dan ditemukan pada Tekaporol	Jumlah Temuan kalimat	Ket.
1	Subjek di awal kalimat	210	Penempatan subjek di awal kalimat mendominasi penggunaan variasi pola kalimat dari segi penempatan kata di awal kalimat. predikat, kata modal, dan keterangan juga terlihat mewarnai penggunaan variasi kalimat pada tekaporol, terlihat dari jumlah penggunaannya.
2	Predikat di awal kalimat	48	
3	Kata modal di awal kalimat	6	
4	Kata keterangan di awal kalimat	64	
5	Kalimat langsung	126	Pemakaian kalimat langsung yang kurang lebih separuh dari jumlah penggunaan kalimat tidak langsung memperlihatkan bahwa variasi kalimat pada tekaporol yang berbeda dengan teks-teks pada media cetak. Pada media cetak, kalimat langsung yang berisi tuturan langsung narasumber tidak ditemui sebanyak itu dalam suatu teks berita.
6	Kalimat tidak langsung	231	
	Kalimat aktif	309	Kalimat aktif pada tekaporol lebih dominan digunakan daripada kalimat pasif. Meski demikian, kalimat pasif juga turut memberikan warna dalam tekaporol. hal ini terlihat pada pemakaiannya yang berjumlah 48 kalimat.
	Kalimat pasif	48	

10.3 Tabel Klasifikasi Penggunaan Kata Negasi sebagai Bentuk Variasi Kalimat dalam Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

No.	Kata Negasi yang Digunakan	Kalimat
1.	tidak	Namun dia <i>tidak menjelaskan</i> lebih jauh perihal rotasi di MPR. (T. 1, P. 4, K. 2).
2.	tidak	Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki kendaraan serta <i>tidak ada</i> peluang.” (T. 4, P. 4, K. 2).
3.	tidak	“Namun saya <i>tidak yakin</i> bangsa sebesar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mumpuni,” kata Ahmad Mubarak di Jakarta, Selasa (4/6). (T. 4, P. 2, K. 1).
4.	tidak	Mubarak mengatakan, <i>tidak ada</i> tokoh besar dari internal Demokrat dan eksternal karena semuanya dipertanyakan. (T. 4, P. 3, K. 1).

5.	tidak	Konvensi itu, kata Mubarak, merupakan 'pintu' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun <i>tidak memiliki</i> partai dan <i>tidak memiliki</i> peluang. (T. 4, P. 3, K. 3).
6.	tidak	"Konvensi ini sungguh karena realitasnya <i>tidak ada</i> orang yang layak dicalonkan menjadi presiden. (T. 4, P. 4, K. 1).
7.	tidak	"Semua capres dari partai politik yang ada diragukan dan <i>tidak ada</i> satu pun yang diunggulkan. (T. 4, P. 2, K. 1).
8.	tidak	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) <i>tidak tertarik</i> menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden tahun 2014. (T. 5, P. 1, K. 1).
9.	tidak	"Di PKB kita terapkan musyawarah, konvensi itu <i>tidak punya</i> sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu. (T. 5, P. 2, K. 1).
10.	tidak	"Kami akan tegas memilih, namun <i>tidak ada paksaan</i> apapun," kata tokoh agama kelahiran Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958 tersebut. (k. 4, p. 4).
11.	tidak	Namun, pihaknya <i>tidak memaksa</i> siapa-siapa tokoh yang akan dipilih di dalam tempat pemungutan suara nantinya. (T. 6, P. 3, K. 2).
12.	tidak	"Dari awal, khittah Muhammadiyah sudah jelas dan <i>tidak mau terjebak</i> dalam kekuasaan politik tertentu." (T. 6, P. 4, K. 3).
13.	tidak	Ia menegaskan, Muhammadiyah sebagai ormas yang <i>tidak memasuki</i> area dukung-mendukung pasangan calon gubernur manapun. (T. 6, P. 4, K. 1).
14.	tidak	Muhammadiyah melarang kader dan warganya untuk <i>tidak memilih</i> atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2013. (T. 6, P. 1, K. 1).
15.	tidak	Secara teoretis, masih kata Firman, <i>tidak masalah</i> bila kedua parpol itu bergulat di luar parlemen. (T. 7, P. 4, K. 1).
16.	tidak	Sementara itu, terkait pencalonan presiden (capres) dari Hanura yang menyebutkan dirinya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu <i>tidak berkomentar</i> panjang. (T. 7, P. 4, K. 2).
17.	tidak	Meski demikian, kata Wiranto untuk mencegah jeratan kasus korupsi <i>tidak mudah</i> , namun pihaknya berupaya tetap bisa mempertahankan predikat partai yang masih 'bersih. (T. 7, P. 4, K. 1).
18.	tidak	"Sampai saat ini <i>tidak ada pendekatan</i> ke partai lain dan belum saatnya untuk bicara soal pasangan," katanya. (T. 9, P. 9, K. 2).
19.	tidak	Menyinggung selain PKB apa ada partai lain yang telah mendekatinya, dia mengatakan, dalam konteks pilpres <i>tidak perlu banyak partai</i> , cukup satu partai. (T. 9, P. 8, K. 2).
20.	tidak	Kalau <i>tidak mencapai "electoral threshold"</i> mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8, K. 3).
21.	tidak	Kemudian di tahun 2009, dia mengaku juga dilamar menjadi calon wapres oleh seorang capres, tetapi saat itu dirinya sama sekali <i>tidak punya keinginan</i> sedikit pun. (T. 9, P. 2, K. 1).
22.	tidak	"Mereka (Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan) agak sulit karena <i>tidak mempunyai 'kendaraan'</i> untuk maju sebagai bakal capres," kata Iberamsjah kepada Antara di Jakarta, Senin (10/6). (T. 10, P. 2, K. 1).
23.	tidak	Namun, menurut dia, partai-partai politik akan sangat kuat untuk mendukung bakal capres dari internalnya, sedangkan konvensi pun <i>tidak akan benar-benar mencari kandidat</i> yang diinginkan masyarakat. (T. 10, P. 3, K. 2).
24.	tidak	Padahal, syarat administratif harusnya <i>tidak lagi</i> menjadi ganjalan bagi partai. (T. 11, P. 3, K. 1).
25.	tidak	Memang, sambungnya, jumlah caleg yang gugur secara nasional <i>tidak terlalu banyak</i> . (T. 11, P. 6, K. 1).

26.	tidak	KPU, tambahannya, harus tetap tegas dan <i>tidak melunak</i> . (T. 11, P. 7, K. 1).
27.	tidak	"Bagaimana cara agar pemilih pemula mendapatkan informasi lebih dalam <i>tidak hanya sekedar di permukaan saja</i> ." (T. 12, P. 4, K. 1).
28.	tidak	Strategi itu dikatakan Ade terkait dengan bagaimana menjangkau pemilih pemula, perempuan, petani sehingga <i>tidak perlu dilakukan</i> secara diam-diam. (T. 12, P. 5, K. 2).
29.	tidak	"Pemilih pemula memiliki agenda persoalan, seperti <i>mau tidak mau mereka menghadapi dunia yang berubah</i> ketika pasar bebas dibuka dan harus bersaing dengan orang lain." (T. 12, P. 8, K. 1).
30.	tidak	Menurut dia, kaum muda <i>tidak hanya berorientasi pada hiburan saja</i> tetapi mereka memikirkan masa depan mereka dan itu adalah aspirasi yang harus didengar kandidat. (T. 12, P. 7, K. 2).
31.	tidak	Penempatan tersebut <i>tidak sesuai</i> dengan peraturan "zipper system" yang menuntut parpol menempatkan bacaleg perempuan di nomor urut kecil, misalnya 1, 2, 4, 5, 7, atau 8. (T. 14, P. 5, K. 1).
32.	tidak	"Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi pendidikan politik <i>tidak baik</i> ." (T. 15, P. 3, K. 2).
33.		"Dan <i>tidak etis</i> dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3, K. 3).
34.	tidak	Gungun <i>tidak heran</i> dengan <i>politik dua muka PKS</i> . (T. 16, P. 5, K. 1).
35.	tidak	Menurutnya, spanduk-spanduk menolak kenaikan harga BBM yang dipasang PKS <i>tidak lebih dari ekspresi publisitas bukan substansi penolakan radikal</i> . (T. 16, P. 6, K. 1).
36.	tidak	Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan PKS <i>tidak akan lolos "parliamentary threshold"</i> (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2014 karena perolehan suaranya di bawah 3,5 persen. (T. 17, P. 1, K. 1).
37.	tidak	Ketua PP Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) Muhammad Pradana Indraputra menyerukan agar mahasiswa <i>tidak menjadi golongan putih</i> alias golput dalam berbagai pemilu di Indonesia termasuk pilpres. (T. 18, P. 1, K. 1).
38.	tidak	Menurutnya, saat ini mahasiswa sudah banyak yang <i>tidak peduli dengan politik</i> . Ini merupakan cerminan awal kerusakan generasi baru di Tanah Air. (T. 18, P. 3, K. 1).
39.	tidak	"Siapa yang akan memimpin bangsa jika mahasiswa sudah <i>tidak peduli dengan politik dan pemerintahan</i> ," ujar Dana. (T. 18, P. 4, K. 1).
40.	tidak	Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membersihkan korupsi dari dalam dengan ikut pemilu dan <i>tidak bersikap apatis</i> . (T. 18, K. 2, P. 5).
41.	tidak	"Menjadi oposisi memang <i>tidak enak</i> ." (T. 19, P. 2, K. 1).
42.	tidak	"Nasdem akan jadi oposisi bila <i>tidak masuk dua besar</i> (dalam Pemilu 2014)," katanya pada acara orientasi calon legislatif Partai Nasdem Jawa Tengah di Solo, Rabu (19/6). (T. 19, K. 2, P. 2).
43.	tidak	KPU melakukan pencoretan karena ada partai politik yang <i>tidak memenuhi kuota</i> 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. (T. 23, P. 1, K. 2).
44.	tidak	KPU sebelumnya mencoret caleg dari lima partai politik yang kedapatan <i>tidak memenuhi kuota 30 persen</i> keterwakilan perempuan di dapil. (T. 23, P. 4, K. 1).
45.	tidak	Kita lihat saja <i>tidak lama</i> lagi, satu tahun lagi," ungkap Jeffrie. (T. 24, K. 2, P. 9).
46.	tidak	"Calon yang <i>tidak memenuhi syarat</i> itu taruhannya besar." (T. 25, P. 4, K. 1).
47.	tidak	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang <i>tidak memiliki partai</i> , tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konstitusi. (T. 26, K. 2, P. 3).
48.	tidak	"Sehingga tidak perlu diributkan dan kami <i>tidak akan terpengaruh</i> ," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (T. 28, P. 2, K. 2).

49.	tidak	Terlebih, imbuh Siti, saat ini nyaris <i>tidak ada satu faksipun</i> yang bisa menandingi faksi Cikeas di Demokrat. (T. 30, P. 5, K. 3).
50.	tidak	Konvensi <i>tidak diadakan</i> untuk mencari figur pemimpin terbaik melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga. (T. 30, P. 4, K. 3).
51.	tak	<i>Tak cuma di struktur fraksi</i> , rotasi kepemimpinan juga dilakukan Hanura di lingkungan fraksi MPR dan jabatan alat kelengkapan DPR. (T. 1, P. 4, K. 1).
52.	tak	Menurutnya, kemungkinan permainan politik uang pada Pemilu 2014 mendatang <i>tak bisa dihindari</i> , terutama karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. (T. 13, P. 2, K. 1).
53.	tak	Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika <i>tak menggandeng Demokrat dan Gerindra</i> . (T. 24, P. 1, K. 1).
54.	tak	"Masak mengorbankan dapil, <i>tak berkeadilan</i> ," ujarnya, Selasa (25/6). (T. 25, P. 14, K. 2).
55.	tak	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku <i>tak terpengaruh</i> dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. (T. 28, P. 1, K. 1).
56.	tak	"Kehendak SBY menjadi Pramono sebagai capres sudah <i>tak terbendung</i> ," ujarnya. (T. 30, P. 3, K. 4).
57.	tidaklah	Peluang Marzuki mendapat restu SBY di konvensi capres Demokrat <i>tidaklah</i> sebesar Pramono. (K. 30, P. 3, K. 1).
58.	bukan	Kadri berkata, seharusnya parpol menawarkan program, <i>bukan</i> membeli suara. (T. 13, P. 4, K. 1).
59.	bukan	"Karena ini merupakan pekerjaan manual, <i>bukan</i> kerja mesin, jadi sangat mungkin saja itu ada faktor 'human error' kurang cermatan dan kealpaan," ujar Ida Budhiati di Jakarta, Jumat (14/6). (T. 14, P. 2, K. 1).
60.	belum	"Kita <i>belum berpikir soal pilpres</i> karena PKB hari ini fokus pada bagaimana memperoleh kursi di parlemen, dan target kami adalah 100 kursi, baru setelah itu bicara pencapresan," katanya. (T. 5, P. 4, K. 1).
61.	belum	Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, <i>belum ada</i> gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke- 486. (T. 21, P. 3, K. 1).
62.	belum	Walaupun Jokowi mendapat respon positif dari warga tentang capres 2014, Jokowi sendiri menegaskan ia <i>belum berminat</i> menjadi capres dan lebih tertarik membenahi persoalan kota Jakarta. (T. 21, P. 9, K. 1).
63.	belum	Pasalnya, <i>belum ada kejelasan waktu</i> dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. (T. 26, P. 2, K. 1).
64.	belum	"Misalnya ikut, hak dan kewajibannya <i>belum jelas</i> ," ungkap Mahfud. (T. 26, p. 6, k. 2).
65.	belum	"Jadi <i>belum (akan ikut)</i> , karena itu tadi, kapan dibuka, kalau dibuka mau daftar kemana, aturan belum ada." (T. 26, P. 6, K. 1).
66.	belum	Lalu <i>belum ditegaskan</i> apakah peserta konvensi harus menjadi anggota partai terlebih dahulu atau tidak. (T. 26, P. 5, K. 2).
67.	belum	Dukungan SBY terhadap Pramono <i>belum tentu berdampak positif</i> bagi Demokrat. (T. 30, P. 4, K. 1).

10.4 Tabel Interpretasi Temuan Penggunaan Kata Negasi sebagai Bentuk Variasi Kalimat dalam Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

No.	Data	Temuan	Ket.
1	Dapat dilihat pada Tahap	Penggunaan kata negasi <i>tidak</i> sebagai pembentuk kalimat negasi, ditemukan	Kalimat negatif atau penyangkalan adalah kalimat yang mengandung

	Klasifikasi di Lamp. 10, Tabel 10.3, no. 1-49	sebanyak 49 kalimat. kata negasi <i>tidak</i> lebih dominan digunakan pada tekaporol dibandingkan kata negasi lainnya.	kata negasi, yakni kata tak, tidak, belum, dan bukan (Sumandiria, 2006:56)
2	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 10, Tabel 10.3, no. 50-55	Penggunaan kata negasi <i>tak</i> sebagai pembentuk kalimat negasi, ditemukan sebanyak 6 kalimat.	Kalimat negatif atau penyangkalan adalah kalimat yang mengandung kata negasi, yakni kata tak, tidak, belum, dan bukan (Sumandiria, 2006:56)
3	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 10, Tabel 10.3, no. 56	Penggunaan kata negasi <i>tidaklah</i> sebagai pembentuk kalimat negasi, ditemukan sebanyak 1 kalimat.	Kalimat negatif atau penyangkalan adalah kalimat yang mengandung kata negasi, yakni kata tak, tidak, belum, dan bukan (Sumandiria, 2006:56)
4	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 10, Tabel 10.3, no. 57-58	Penggunaan kata negasi <i>bukan</i> sebagai pembentuk kalimat negasi, ditemukan sebanyak 2 kalimat.	Kalimat negatif atau penyangkalan adalah kalimat yang mengandung kata negasi, yakni kata tak, tidak, belum, dan bukan (Sumandiria, 2006:56)
5	Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 10, Tabel 10.3, no. 59-66	Penggunaan kata negasi <i>bukan</i> sebagai pembentuk kalimat negasi, ditemukan sebanyak 7 kalimat.	Kalimat negatif atau penyangkalan adalah kalimat yang mengandung kata negasi, yakni kata tak, tidak, belum, dan bukan (Sumandiria, 2006:56)

10.5 Tabel Klasifikasi Kalimat yang Sebaiknya Digabung dengan Kalimat Sebelumnya akibat Penggunaan Konjungsi di Awal Kalimat yang Kurang Tepat.

No.	Kalimat dengan Konjungsi di Depannya	Penggabungan dengan Kalimat Sebelumnya
1.	Tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg. (T. 1, P.4, K.2).	Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengungkapkan, dorongan untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi memang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg.
2.	Sedangkan dari lingkungan PDI Perjuangan beredar nama-nama seperti Jokowi, Puan Maharani dan yang baru saja memenangkan pemilukada Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo," tutur Jeffrie. (T. 2, P. 4, K. 2).	"Produk dari capres muda versi Partai Demokrat yang paling menonjol saat ini adalah Gita Wiryawan, Marzuki Ali dan Mahfud MD, sedangkan dari lingkungan PDI Perjuangan beredar nama-nama seperti Jokowi, Puan Maharani dan yang baru saja memenangkan pemilukada Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo," tutur Jeffrie.
3.	Karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan. (T. 11, P. 3, K. 2).	Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai, karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan.
4.	Tetapi gugurnya beberapa caleg tetap menandakan kurang tertibnya partai dalam menyiapkan kelengkapan administratif. (T. 11, P. 6, K. 2).	Memang, sambungnya, jumlah caleg yang gugur secara nasional tidak terlalu banyak, tetapi gugurnya beberapa caleg tetap menandakan kurang tertibnya partai dalam menyiapkan kelengkapan administratif.
5.	Karena yang diwajibkan kepada partai sudah tertera dalam UU Pemilu yang diturunkan dalam peraturan KPU. (T. 11, P. 7, K. 2).	KPU, tambahnya, harus tetap tegas dan tidak melunak. (T. 11, P. 7, K. 1), karena yang diwajibkan kepada partai sudah tertera dalam UU Pemilu yang diturunkan dalam peraturan KPU.
6.	Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2,	Di satu sisi, PKS menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat, tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY.

	K. 2).	
7.	“Dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3, K. 3).	“Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi pendidikan politik tidak baik dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). "
8.	Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 2, K. 2).	"Namun, tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6).
9.	Karena jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. (T. 24, P. 15, K. 2).	Namun, menurut Endang, pemilihan partai koalisi harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pileg, karena jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat.
10.	Tetapi Ferry cukup yakin proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap bacaleg telah dilakukan sesuai prosedur. (T. 25, P. 2, K. 2).	Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, jika memang kemudian diketahui melakukan kesalahan, maka bisa saja terjadi perubahan, tetapi Ferry cukup yakin proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap bacaleg telah dilakukan sesuai prosedur.
11.	Karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi. (T. 26, P. 3, K. 3).	Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konstitusi, karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi.
12.	“Sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (T. 28, p. 2, k. 2).	"Hasil survei itu berbeda-beda dari lembaga satu ke lembaga lain, sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

10.6 Tabel Interpretasi Temuan Kalimat yang Sebaiknya Digabung dengan Kalimat Sebelumnya akibat Penggunaan Konjungsi di Awal Kalimat yang Kurang Tepat.

Data	Penggabungan dengan Kalimat Sebelumnya	Ket.
Dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 10, Tabel 10.5	Kata <i>tetapi</i> , <i>sedangkan</i> , <i>karena</i> , dan <i>dan</i> yang merupakan konjungsi antar kalusa menjadi kata konjungsi antar kalimat	Kata <i>tetapi</i> , <i>sedangkan</i> , <i>karena</i> , dan <i>dan</i> menandakan bahwa kalimat tersebut sebenarnya berntuk klausa yang merupakan bagian dari kalimat sebelumnya. Kalimat-kalimat seperti ini dapat digabung dengan kalimat sebelumnya.

Lampiran 11: Indikator Klasifikasi Penggunaan Paragraf pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

11.1 Paragraf-Paragraf dengan Berbagai Metode Pengembangan yang Ditemukan pada Tekaporol

1. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama yang di dalamnya terdapat ide pokok, kemudian disusul dengan kalimat-kalimat penjelas.
2. Paragraf induktif adalah paragraf yang yang dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas dan adanya kalimat utama di akhir paragraf.
3. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Suatu paragraf juga dapat dikatakan sebagai paragraf campuran bila ide pokoknya bukan terletak pada kalimat utama, melainkan berada secara implisit pada isi paragraf secara keseluruhan.
4. Paragraf klimaks adalah paragraf dengan gagasan utama yang mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, berangsur-angsur dengan gagasan-gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya atau kepentingannya.
5. Antiklimaks adalah paragraf yang dimulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun melalui gagasan-gagasan yang lebih rendah hingga yang paling rendah.
6. Pertentangan adalah paragraf yang menunjukkan perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu (Keraf, 1994:88).
7. Sebab-akibat adalah paragraf yang disusun berdasarkan urutan logis (Sumandiria, 2006). Terdapat kalimat utama yang berisi sebab, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat yang menyatakan akibat, atau sebaliknya.
8. Contoh adalah paragraf yang disusun dengan menunjukkan banyak contoh pada kalimat utama, kalimat pengembang, dan kalimat penjelas.
9. Definisi adalah paragraf yang menunjukkan suatu istilah atau konsep pada kalimat utama, dan istilah atau konsep itu masih memerlukan uraian serta penjelasan perinci pada kalimat-kalimat berikutnya.
10. Klasifikasi adalah paragraf yang berisi proses untuk mengelompokkan hal-hal yang mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu (Keraf, 1994:96-97).

11.2 Indikator Klasifikasi Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat yang dapat Digabung dengan Paragraf Sebelumnya atau Setelahnya

Paragraf dibangun oleh dua kalimat atau lebih yang saling berkaitan, dan memiliki sebuah gagasan. Di dalamnya ada kalimat utama yang berisi gagasan utama; dan ada sejumlah kalimat lain yang yang berisi keterangan tambahan terhadap gagasan utama itu (Chaer, 2010:34-35).

Lampiran 12: Klasifikasi dan Interpretasi Data Penggunaan Jenis Paragraf Berdasarkan Metode Pengembangannya dalam Teks Berita Kanal Politik Rol pada Tanggal 1-30 Juni 2013

12.1 Klasifikasi Paragraf-Paragraf dengan Berbagai Metode Pengembangan yang Ditemukan pada Tekaporol

a. Paragraf Deduktif

1. Karena, lanjut Effendi, pemilihan presiden berbeda dengan pilkada. Ekspektasi masyarakat terhadap presiden pun berbeda dibanding harapan bagi gubernur. Walaupun elektabilitasnya tinggi, Jokowi juga harus menguji dirinya sendiri. Apakah memang mampu mengemban tanggung jawab memimpin negara. (T. 1, P.3).
2. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengungkapkan, dorongan untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi memang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Tetapi tatarannya masih dalam lingkup pilkada dan pileg. (T. 1, P. 4).
3. Menurut dia, selain melalui konvensi capres Partai Demokrat, capres dari generasi baru juga akan hadir dari lingkungan PDI Perjuangan. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani yang mengatakan bahwa Megawati menginginkan capres muda untuk 2014. (T. 2, P. 3).
4. Ia mengaku sangat optimis anak-anak muda dapat mengambil peran dan kesempatan itu. Menurut dia, hal itu sudah terlihat dari kepemimpinan di beberapa daerah yang dipimpin oleh anak-anak muda, baik itu di badan eksekutif, maupun legislatif. (T. 2, P. 11).
5. "Namun, untuk kepemimpinan nasional, masih keliatan ada keengganan memberikan estafet kepemimpinan kepada yang muda, yang berkualitas, dan punya integritas. Ini semacam ada 'generasi yang hilang', dulu Republik ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang mampu memerdekakan bangsa dan menjadi duta-duta yang tangguh di mata internasional." (T. 2, P. 12).
6. Saleh menyatakan rotasi fraksi merupakan arahan Ketua Umum Hanura, Wiranto. Arahan itu disampaikan Ahad lalu dan resmi berlaku hari ini. Saleh menyatakan rotasi fraksi dilakukan dalam rangka melakukan penyegaran. "Penyegaran dan rotasi pimpinan fraksi di DPR," ujar Saleh. (T. 3, P. 3).
7. Tak cuma di struktur fraksi, rotasi kepemimpinan juga dilakukan Hanura di lingkungan fraksi MPR dan jabatan alat kelengkapan DPR. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh perihal rotasi di MPR. "Untuk susunan personalia fraksi Hanura di MPR biar Pak Erik Wardana yang menjelaskan," katanya. (T. 3, P. 4).
8. Terlebih tahun ini merupakan tahun politik menuju 2014. "Kita harapkan fraksi akan lebih bergerak dinamis dalam menyikapi situasi politik ke depan dan bekerja lebih taktis lagi," ujarnya. (T. 3, P. 6).
9. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarak menilai konvensi yang akan dilakukan partainya merupakan kebutuhan nyata. Sebab, saat ini sulit mencari bakal calon presiden di Pemilu 2014. (T. 4, P. 1).
10. Mubarak mengatakan, tidak ada tokoh besar dari internal Demokrat dan eksternal karena semuanya dipertanyakan. Misalnya ada tokoh yang semakin lama memasang iklan, maka semakin dipertanyakan publik. Konvensi itu, kata Mubarak, merupakan 'pintu' yang diberikan partainya kepada kandidat yang berpotensi, namun tidak memiliki partai dan tidak memiliki peluang. (T. 4, P. 3).
11. "Konvensi ini sungguh karena realitasnya tidak ada orang yang layak dicalonkan menjadi presiden. Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan, namun masih bersembunyi dan tidak memiliki kendaraan serta tidak ada peluang. Maka kami membuka peluang tersebut," ujarnya menjelaskan. (T. 4, P. 4).

12. Menurut Imam, saat ini PKB belum tertarik berbicara mengenai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Namun, mengenai mekanisme penjangkaran sudah ada kesepakatan. (T. 5, P. 3).
13. Meski demikian, Imam Nahrawi mengakui ada sejumlah figur yang memiliki kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang bagus, sehingga layak menjadi calon presiden. "Ada Mahfud MD, Rhoma Irama, dan sebagainya, kita lihat saja nanti bagaimana," katanya. (T. 5, P. 5).
14. "Kami mendorong agar warga Muhammadiyah melaksanakan hak pilihnya pada Pilkada Jatim, serta Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di sela kunjungannya di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Kamis (6/6). (T. 6, P. 2).
15. Menurut dia, dengan memilih salah satu kandidat bisa disebut sebagai pendidikan politik yang baik di Indonesia. Namun, pihaknya tidak memaksa siapa-siapa tokoh yang akan dipilih di dalam tempat pemungutan suara nantinya. (T. 6, P. 3).
16. Ia menegaskan, Muhammadiyah sebagai ormas yang tidak memasuki area dukung-mendukung pasangan calon gubernur manapun. Hal ini sesuai khittah, bahwa Muhammadiyah netral dan membebaskan warganya memilih sesuai hati nurani. "Dari awal, khittah Muhammadiyah sudah jelas dan tidak mau terjebak dalam kekuasaan politik tertentu. Kami akan tegas memilih, namun tidak ada paksaan apapun," kata tokoh agama kelahiran Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958 tersebut. (T. 6, P. 4).
17. Jawa Timur, kata dia, merupakan provinsi terpenting di Tanah Air. Pihaknya berharap proses demokrasi lima tahunan memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2014-2019 berjalan aman, lancar, tertib dan terpilih tokoh yang mampu membawa kedamaian, kemajuan serta kesejahteraan rakyatnya. (T. 6, P. 5).
18. "Kami yakin, pilihan masyarakat nantinya adalah yang terbaik dan benar-benar menjalankan amanat rakyat. Apalagi, Jatim adalah provinsi terpenting dan memiliki pengaruh luar biasa di tingkat nasional," kata Din. (T. 6, P. 6).
19. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, berpendapat, kisruh antara partai politik koalisi, seperti Partai Demokrat dan PKS, karena perbedaan mereka dalam menafsirkan klausul koalisi. (T. 7, P. 1).
20. Karenanya, Firman mengusulkan dalam pemilihan presiden nantinya, koalisi dibentuk sebelum pilpres. Ia menyebut harus ada perjanjian yang lebih *rigid* (keras), di samping aturan main untuk membentuk kesepakatan, sehingga perselisihan pun bisa dihindari. (T. 7, P. 3).
21. Secara teoretis, masih kata Firman, tidak masalah bila kedua parpol itu bergulat di luar parlemen. "Selama 'perang' itu argumentatif, ya sah-sah saja. Terlepas itu membawa manfaat atau tidak," tuturnya mengakhiri. (T. 7, P. 4).
22. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan partainya sedang berjuang untuk menjadi partai papan atas. "Karena itu perjuangan Hanura untuk menjadi bagian dari proses perubahan bangsa akan bisa kami lakukan kalau kami punya kekuatan, dan itu harus diperjuangkan melalui Pemilu (pemilihan umum 2014)," katanya di Bantul, Sabtu (8/6). (T. 8, P. 1).
23. Usai peresmian memorial HM Soeharto di Kemusuk, Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiranto mengatakan Partai Hanura tidak akan main-main menghadapi Pemilu 2014. "Ini merupakan suatu momentum yang baik bagi Hanura untuk bisa menorehkan sejarah, bahwa partai Hanura benar-benar ingin melakukan suatu perubahan besar di negeri ini," katanya. (T. 8, P. 2)
24. Menanggapi pertanyaan seputar kasus korupsi yang menjerat kader partai-partai besar, Wiranto mengatakan menyerahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memproses hukum. "Itu biar saja dan agar 'dibersihkan', makanya justru itu, Hanura bersyukur sampai saat ini masih bisa untuk mencegah kader-kader partai terjebak masalah itu," ujarnya. (T. 8, P. 3).

25. Musisi dan Raja Dangdut Rhoma Irama tetap yakin dirinya akan maju sebagai calon presiden 2014 mendatang. Ia mengungkapkan alasan utama mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 karena panggilan jiwa untuk ikut membangun bangsa ini. "Sebetulnya kelompok ulama maupun politikus pernah meminta saya untuk maju tahun 2004, sejak pertama kali bangsa ini memilih presiden secara langsung," katanya, Ahad (9/6). (T. 9, P. 1)
26. Ia mengatakan hal tersebut sebelum menjadi pembicara pada tabligh akbar peringatan Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW di Lapangan Krasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. "Kali ini saya merasa terpanggil untuk membenahi bangsa ini karena saya melihat bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila," katanya. (T. 9, P. 3)
27. Menyinggung dukungan terhadap dirinya maju capres, dia mengatakan, sebetulnya sudah 40 tahun dirinya keliling Indonesia dalam rangka memberikan pencerahan kepada bangsa melalui musik dan tabligh. "Tabligh dan musik itu sudah merupakan pekerjaan saya, profesi saya sampai saat ini. Kebetulan ada pencapresan itu, jadi profesi yang selama ini saya geluti otomatis sebagai sosialisasi," katanya. (T. 9, P. 5).
28. Ia berharap, dengan pencalonan tersebut suara PKB juga akan naik pada pemilihan legislatif 2014. "Sebagai partai pengusung minimal harus memiliki kursi 20 persen di DPR. Jadi ada suatu kewajiban juga bagi saya untuk memperjuangkan PKB," katanya. (T. 9, P. 6).
29. Ditanya tentang pasangan calon, dia juga belum mau menjawabnya. "Sampai saat ini tidak ada pendekatan ke partai lain dan belum saatnya untuk bicara soal pasangan," katanya. (T. 9, P. 9).
30. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, berpendapat Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan akan sulit menjadi bakal calon presiden untuk pemilu 2014 karena semua partai politik sudah memiliki kandidat internal. (T. 10, P. 1).
31. "Misalnya Partai Demokrat hendak mengadakan konvensi, itu hanya bohongan saja. Artinya mereka (Dahlan dan Gita) tidak memiliki 'kendaraan', sementara jalur independen (untuk kepresidenan-red) pun belum diatur dalam konstitusi Indonesia," ujarnya. (T. 10, P. 4).
32. Iberamsjah menjelaskan semua partai sudah memiliki kandidat bakal capres seperti Partai Golkar mengusung Aburizal Bakrie, PAN mengusung Hatta Rajasa, Partai Gerindra mengajukan Prabowo Subianto, dan Partai Hanura menjagokan Wiranto. (T. 10, P. 5).
33. Partai politik dianggap masih main-main dalam menyiapkan syarat pencalonan untuk pemilu legislatif. Terbukti dengan gugurnya empat partai di tujuh daerah pemilihan. (T. 10, P. 1).
34. "Mereka gugur karena syarat keterwakilan perempuan. Ironisnya karena persyaratan administrasi calon tersebut dan kesalahan penempatan nomor urut," kata Deputy Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz di Jakarta, Selasa (11/6). (T. 10, P. 2).
35. Padahal, syarat administratif harusnya tidak lagi menjadi ganjalan bagi partai. Karena mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan. (T. 10, P. 3).
36. Begitu pula dengan penempatan nomor urut. KPU, menurutnya sudah melakukan sosialisasi cukup intensif kepada partai. (T. 10, P. 4).
37. KPU, tambahnya, harus tetap tegas dan tidak melunak. Karena yang diwajibkan kepada partai sudah tertera dalam UU Pemilu yang diturunkan dalam peraturan KPU. Artinya, prosedur yang ditempuh KPU sudah sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilu. (T. 10, P. 7).
38. Memang, sambungnya, jumlah caleg yang gugur secara nasional tidak terlalu banyak. Tetapi gugurnya beberapa caleg tetap menandakan kurang tertibnya partai dalam menyiapkan kelengkapan administratif. "Parpol masih menganggap ada hal-hal yang bisa dikompromikan dengan KPU," ujarnya. (T. 11, P. 6)

39. Ade mengatakan penggunaan media itu harus disesuaikan dengan psikologi kalangan muda yaitu pengetahuan mengenai pemilu. Menurut dia, apabila hal itu bisa dilakukan maka tingkat partisipasi pemilih akan tinggi dalam pemilu. (T. 12, P. 3).
40. Menurutnya, kandidat yang sudah menyatakan diri maju dalam bursa bakal calon presiden (capres) maka orang tersebut harus sudah sosialisasi sejak saat ini. Strategi itu dikatakan Ade terkait dengan bagaimana menjangkau pemilih pemula, perempuan, petani sehingga tidak perlu dilakukan secara diam-diam. (T. 12, P. 5).
41. "Kampanye saja secara terbuka, beritahu mengenai konsepnya kepada publik. Selain itu kandidat bisa mulai beriklan, diskusi, dan masuk ke kampus dan sekolah-sekolah karena itu adil dan publik akan menilainya," kata Ade. (T. 12, P. 6).
42. Ia menilai karakter komunikasi politik yang bisa diterima pemilih pemula adalah konsep mengenai masa depan mereka yang bisa dijamin oleh kandidat. Menurut dia, kaum muda tidak hanya berorientasi pada hiburan saja tetapi mereka memikirkan masa depan mereka dan itu adalah aspirasi yang harus didengar kandidat. (T. 12, P. 7).
43. "Pemilih pemula memiliki agenda persoalan, seperti mau tidak mau mereka menghadapi dunia yang berubah ketika pasar bebas dibuka dan harus bersaing dengan orang lain. Mereka butuh pekerjaan dan sekolah yang baik," ujarnya. (T. 12, P. 8).
44. Karenanya, Kadri mengimbau, sebaiknya partai politik yang harus mencegah politik uang untuk memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Praktik politik uang, kata Kadri, memang sulit dihilangkan. (T. 13, P. 3).
45. Kadri berkata, seharusnya parpol menawarkan program, bukan membeli suara. Sebab, hal itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. (T. 13, P. 4).
46. Jumlah bakal caleg tingkat Provinsi NTB sebanyak 761 orang yang berasal dari 12 parpol. Setiap parpol menyerahkan 65 orang caleg ke KPU NTB. Ada parpol yang menyerahkan bakal caleg yang jumlahnya kurang dari 65 orang. (T. 13, P. 6).
47. Partai Hanura menambah daftar parpol yang kehilangan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu legislatif DPR karena terganjal sistem "zipper" atau penempatan perempuan di setiap tiga calon. Dari 10 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di dapil Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Partai Hanura menempatkan perempuan di nomor urut 3, 6, 10. (T. 14, P. 4).
48. Penempatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan "zipper system" yang menuntut parpol menempatkan bacaleg perempuan di nomor urut kecil, misalnya 1, 2, 4, 5, 7, atau 8. Kabar tentang tercoretnya satu dapil Hanura tersebut baru diketahui setelah pleno berita acara DCS dengan parpol dan KPU melansir hasil DCS ke situs resminya. (T. 14, P. 5).
49. Menurut Heri, secara ekonomis, menteri-menteri tersebut dipandang akan menguntungkan partai. "Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi pendidikan politik tidak baik. Dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3).
50. Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM. "Padahal tidak ada BLSM tanpa kenaikan BBM," kata Gungun ketika dihubungi Republika, Ahad (16/6). (T. 16, P. 2).
51. Politik dua muka PKS juga terlihat dari perbedaan pandangan di antara elite PKS yang di DPR dan yang di pemerintahan. Gungun menyatakan, perbedaan itu tidak berarti mencerminkan perpecahan di internal PKS. (T. 16, P. 3).
52. Menurutnya, perbedaan itu hanya sebatas peran yang mesti dijalankan masing-masing kelompok (elite). "Kelompok yang antagonis dan verbal agresif menolak kenaikan harga BBM, sedangkan kelompok yang protagonis bersikap akomodatif terhadap kenaikan BBM," ujarnya. (T. 16, P. 4).

53. Gungun tidak heran dengan politik dua muka PKS. Sejak lama dia sudah membaca gambar-gambar PKS menolak kenaikan harga BBM hanya strategi pencitraan publik. (T. 16, P. 5).
54. Menurutnya, spanduk-spanduk menolak kenaikan harga BBM yang dipasang PKS tidak lebih dari ekspresi publisitas bukan substansi penolakan radikal. "Dari awal apa yang beredar di berbagai ruang publik lebih merupakan ekspresi publisitas politik PKS," katanya. (T. 16, P. 6).
55. PKS hanya berpura-pura menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Gungun percaya pada akhirnya PKS bakal menyetujui opsi kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah. (T. 16, P. 7).
56. Bahkan PKS juga akan ikut ambil bagian dalam program kompensasi BLSM. "Seolah-olah menolak tapi dalam praktik lanjutannya PKS akan saling mengakomodasi," katanya. (T. 16, P. 8).
57. PKS harus segera meninggalkan politik dua muka. Pasalnya, rakyat sudah semakin cerdas menilai sepak terjang partai dan politisi di jagad politik. "Kalau terus seperti ini PKS akan ditinggalkan masyarakat," ujarnya. (T. 16, P. 9).
58. Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan PKS tidak akan lolos "parliamentary threshold" (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2014 karena perolehan suaranya di bawah 3,5 persen. (T. 17, P. 1).
59. "Pemilih PKS adalah orang yang terdidik dan menjunjung tinggi unsur-unsur moral. Apabila banyak elit PKS yang melakukan korupsi dan tindakan tidak bermoral maka konstituennya akan pergi ke partai yang relatif bersih," kata Toto Sugiarto kepada Antara di Jakarta, Senin. (T. 17, P. 2).
60. "Suara konstituen PKS akan menyeberang ke Partai Hanura dan PDI Perjuangan atau partai berbasis massa Islam namun persentasenya kecil. Politik itu berkaitan dengan pencitraan bagaimana dipersepsikan oleh masyarakat," ujarnya. (T. 17, P. 5).
61. Bagi Nasdem, kata dia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sangat menentukan perolehan suara dalam Pemilu 2014. Ia mengatakan untuk di Jawa Tengah ini tercatat sebanyak 1.747 calon legislatif baik untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (T. 19, P. 3).
62. Untuk mencapai perubahan ini, katanya, moral politik harus dikedepankan. "Masyarakat sekarang ini sudah cerdas, apabila dalam berpolitik itu mengedepankan moral yang baik pasti akan mendapat dukungan dari rakyat," ujar Surya Paloh. (T. 19, P. 9).
63. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah menerima 20 laporan masyarakat tentang daftar caleg sementara (DCS). Saat ini, laporan tersebut tengah dipilah dan dipastikan bukan hanya surat kaleng untuk merugikan calon tertentu. (T. 20, P. 1).
64. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, selanjutnya laporan itu akan diklarifikasi kepada partai politik. Sesuai PKPU 6/2013, partai akan dimintai klarifikasi atas masukan yang diberikan masyarakat dari 28 Juni hingga 7 Juli 2013. Jika DCS diganti, pemberituannya dilakukan pada 5 sampai dengan 18 Juli 2013. (T. 20, P. 2).
65. KPU, jelas Ferry, telah memaksimalkan sosialisasi DCS sesuai dengan aturan yang ada. Selain mengumumkan DCS lewat kanal KPU, DCS juga dipublikasikan melalui surat kabar nasional dan media penyiaran. "Dalam kanal KPU, masyarakat juga bisa mengakses profil masing-masing caleg," katanya, Kamis (20/6). (T. 20, P. 3).
66. Menurut dia, jasa Jokowi sudah diakui dari tingkat wilayah hingga Asia, bahkan dunia. Saat menjabat sebagai wali kota Surakarta, Jokowi terpilih menjadi wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012 yang diselenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan walikota sedunia di Inggris. (T. 21, P. 4).
67. Dari 1.635 responden di 31 provinsi, Jokowi mendapatkan 28,6 persen. Angka tersebut melampaui dukungan untuk Prabowo Subianto (15,6 persen) dan Megawati Soekarnoputri (5,4 persen). (T. 21, P. 7).

68. Seorang karyawan, Inda (29), menyatakan menyetujui Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden karena gubernur DKI Jakarta tersebut mau turun langsung membantu warga menengah kebawah. (T. 21, P. 8).
69. "Saya senang gubernurnya Jokowi, untuk menengah ke bawah dia itu mau (merangkul). Kalau (gubernur) yang sebelumnya kan beda, dia menengah ke atas. Saya setuju Jokowi jadi presiden," kata Inda. (T. 21, P. 9).
70. Dalam acara yang dihadiri ribuan kader Partai Golkar, Ical berharap para kader yang menjadi caleg untuk sungguh-sungguh, sehingga bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Golkar, sebut Ical, adalah partai milik rakyat. Karenanya Ical berharap rakyat memberikan kepercayaannya kepada Golkar, sehingga partai berlambang pohon beringin itu bisa memperjuangkan kehendak rakyat. (T. 22, P. 6).
71. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada keputusannya untuk menggugurkan semua bakal calon legislatif (caleg) di beberapa daerah pemilihan (dapil). KPU melakukan pencoretan karena ada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. (T. 23, P. 1).
72. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya hanya melaksanakan aturan yang ada. KPU juga sudah menyusun Daftar Calon Sementara (DCS). Hadar justru mempertanyakan parpol yang baru mempertanyakannya. (T. 23, P. 2).
73. "Semua partai sudah mengikutinya. Agak membingungkan kalau begitu kena, baru dipermasalahkan," kata Hadar saat dihubungi *Republika* di Jakarta, Ahad (23/6). (T. 23, P. 3).
74. KPU sebelumnya mencoret caleg dari lima partai politik yang kedapatan tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), Partai Amanat Nasional (Dapil Sumatera Barat I), dan Gerindra (Dapil Jawa Barat IX). (T. 23, P. 4).
75. Beberapa parpol mengadukan pencoretan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hadar mempersilahkan parpol untuk mengadu. Ia mengatakan, KPU akan mengikuti ketentuan yang berlaku. "Ajukan saja, kami akan mengikutinya," kata dia. (T. 23, P. 6).
76. Saat ditanya siapa tokoh Golkar yang berpeluang untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi? Jeffrie menjawab tokoh Golkar agar memiliki dasar untuk mengambil-alih Golkar pada munas 2015. (T. 24, P. 3).
77. Cawapres yang ideal mendampingi Jokowi, kata dia, harus memiliki latar belakang militer. "Kalau sipil, ya sipil yang tegas dan berani." (T. 24, P. 7).
78. Lebih baik lagi, tutur Jeffrie, cawapresnya berbeda sukunya dengan Jokowi. Semakin sempurna kalau juga memiliki basis dukungan dari masyarakat yang sudah terbukti. (T. 24, P. 8).
79. "Kalau itu terjadi maka partai penguasa pasca2014 adalah PDIP didukung Golkar dengan partai penyeimbang pemerintahan yang dipimpin Demokrat. Kita lihat saja tidak lama lagi, satu tahun lagi," ungkap Jeffrie. (T. 24, P. 9).
80. "Sehingga kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama. Koalisi sekarang yang tergabung dalam setgab, kental dengan kepentingan-kepentingan politis sehingga membuat keputusan-keputusan yang memerlukan tindakan cepat sulit dilakukan," ujar Endang. (T. 24, P. 11).
81. Namun, menurut Endang, pemilihan partai koalisi harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pileg. Karena jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. (T. 24, P. 14).

82. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, bersedia mengikuti semua mekanisme hukum yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU juga siap mengeluarkan data dan penjelasan mengenai alasan mencoret partai di sebuah dapil. (T. 25, P. 1).
83. "Calon yang tidak memenuhi syarat itu taruhannya besar. Masak mengorbankan dapil, tak berkeadilan," ujarnya, Selasa (25/6). (T. 25, P. 4).
84. Sebelumnya, Bawaslu optimis sengketa pemilu terkait pencoretan dapil bisa diselesaikan dengan mediasi saja. Dikatakan, partai politik yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat di beberapa dapil, bisa mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu. Saat ini, ada empat partai, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKPI, yang masih dalam tahap melengkapi gugatan. (T. 25, P. 5).
85. Pasalnya, belum ada kejelasan waktu dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. "Apa yang dilakukan Demokrat belum jelas juga, dulu katanya Juni, lalu mundur Agustus, mundur lagi September," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (26/6). (T. 26, P. 2).
86. Sebenarnya, lanjut Mahfud, gagasan sistem *primary election* yang digagas Demokrat sangat brilian. Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konstitusi. Karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi. (T. 26, P. 3).
87. Tetapi, ide konvensi yang diusung Demokrat menurutnya perlu diperjelas. Jangan sampai sistem konvensi itu hanya sebagai kamuflase. Padahal, tuturnya, Demokrat sudah menyiapkan calon tertentu yang sudah disiapkan untuk menang. (T. 26, P. 4).
88. "Jadi belum (akan ikut), karena itu tadi, kapan dibuka, kalau dibuka mau daftar kemana, aturan belum ada. Misalnya ikut, hak dan kewajibannya belum jelas," ungkap Mahfud. (T. 26, P. 6).
89. Meski begitu, Mahfud mengaku akan tetap mengikuti perkembangan persiapan konvensi dari Partai Demokrat. Termasuk mengamati orang-orang yang mungkin diajak atau dimasukkan Demokrat dalam konvensi capres tersebut. (T. 26, P. 7).
90. Tingkat keterpilihan gubernur DKI itu mengalahkan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri. Berikut elektabilitas tokoh-tokoh yang dipilih responden bila pemilihan presiden dilakukan, berdasarkan kajian P2P LIPI yang dipaparkan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6),
1. Joko Widodo 22.6 persen
 2. Prabowo Subianto 14.2 persen
 3. Aburizal Bakrie 9.4 persen
 4. Megawati Soekarnoputri 9.3 persen
 5. Jusuf Kalla 4.2 persen
 6. Rhoma Irama 3.5 persen
 7. Wiranto 3.4 persen
 8. Mahfud MD 1.9 persen
 9. Hatta Rajasa 1.2 persen
 10. Sri Sultan HB X 1.2
 11. Surya Paloh 1.2 persen
 12. Lainnya 4.4 persen (T. 27, P. 2).
91. Syarief Hasan mengatakan, semakin banyak orang yang bergabung dengan PD akan semakin bagus. "Gak disiapkan untuk itu (konvensi capres Demokrat)," kata Syarief Hasan, Sabtu (29/6). (T. 29, P. 2).
92. Syarif juga menilai wajar jika Pramono ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pembina Demokrat. Sebab, ia cukup senior dan memiliki kemampuan yang bagus. "Sangat pantas jadi anggota dewan Pembina," katanya mengakhiri. (T. 29, P. 3).
93. Bergabungnya Pramono Edhie Wibowo ke Partai Demokrat diprediksi bakal meningkatkan suhu persaingan calon presiden (capres) di internal Demokrat. Pramono bakal menjadi ancaman serius bagi Marzuki Alie di bursa konvensi capres. (T. 30, P. 1).

94. Peluang Marzuki mendapat restu SBY di konvensi capres Demokrat tidaklah sebesar Pramono. Indikasinya menurut Siti terlihat dari sikap politik SBY yang tidak merestui Marzuki menjadi ketua umum Demokrat saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu. Bergabungnya Pramono menjadi sinyal kuat bakal kemana arah restu SBY untuk capres mendatang. "Kehendak SBY menjadi Pramono sebagai capres sudah tak terbendung," ujarnya. (T. 30, P. 3).
95. Dukungan SBY terhadap Pramono belum tentu berdampak positif bagi Demokrat. Pasalnya publik bisa menganggap konvensi capres Demokrat hanya sekedar akal-akalan belaka. Konvensi tidak diadakan untuk mencari figur pemimpin terbaik melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga. "Publik bisa menganggap konvensi hanya topeng demokrasi," katanya. (T. 30, P. 4).
96. Siti mengatakan dukungan SBY merupakan kunci penentu siapa capres Partai Demokrat di 2014. Hal ini karena menurutnya SBY memiliki otoritas yang besar baik sebagai ketua umum maupun ketua majelis tinggi. Terlebih, imbuh Siti, saat ini nyaris tidak ada satu faksipun yang bisa menandingi faksi Cikeas di Demokrat. "SBY bukan sekedar ketua umum tapi juga presiden," ujarnya. (T. 30, P. 5).

b. Paragraf Induktif

97. "Jokowi dapat rating tinggi, populer iya, tapi dia harus diuji. Betul nggak dia sudah sesuai dengan konsumsi sebagai presiden," kata Effendi dalam diskusi di Universitas Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/6). (T. 1, P. 2).
98. "Keresahan kita semua kalau Pilpres 2014 akan diisi oleh muka-muka lama saja telah berakhir. Untuk itu sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Megawati dan SBY." (T. 2, P. 7).
99. "Keberadaan dua institusi ini adalah konsekuensi dari sistem bikameral yang kita anut, yang berperan dalam menghasilkan produk kebijakan. Untuk itu perlu mendorong partisipasi aktif generasi muda baik sebagai pemilih, maupun sebagai kandidat," ungkap Endang. (T. 2, P. 10).
100. "Semua capres dari partai politik yang ada diragukan dan tidak ada satu pun yang diunggulkan. Namun saya tidak yakin bangsa sebesar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mumpuni," kata Ahmad Mubarak di Jakarta, Selasa (4/6). (T. 4, P. 2).
101. Partai, lanjut Masykurudin, juga telah menyediakan petugas penghubung dengan KPU. Harusnya, penghubung itu bisa memaksimalkan komunikasi dengan KPU. (T. 11, P. 5).
102. "Kampanye itu (tatap muka) tidak semua publik tahu. Karena itu peran media (televisi) bisa menyampaikan kandidat secara jujur mengenai calon tersebut," kata Ade Armando usai diskusi The Indonesian Institute bertajuk "Kiprah Media Massa Jelang 2014" di Jakarta, Rabu (12/6). (T. 12, P. 2).
103. "Bagaimana cara agar pemilih pemula mendapatkan informasi lebih dalam tidak hanya sekedar di permukaan saja. Karena itu diskusi penting dilakukan dalam kaitan ini," ujar Ade. (T. 12, P. 4)
104. "Kalau terdapat kontribusi kami dalam melakukan kekeliruan, kami akan mengoreksi kemudian kami kordinasikan dengan Bawaslu, seperti kasus yang terjadi pada Hanura, kami juga kordinasi dengan Bawaslu," kata Ida. Menurut Ida, pencermatan terhadap hasil DCS dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau masyarakat dan internal yaitu pihak penyelenggara pemilu sendiri. (T. 14, P. 3).
105. Menurutnya, saat ini mahasiswa sudah banyak yang tidak peduli dengan politik. Ini merupakan cerminan awal kerusakan generasi baru di Tanah Air. (T. 18, P. 3).
106. Dana mengatakan memang benar bahwa saat ini banyak politisi yang busuk dan korupsi, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membersihkan korupsi dari dalam dengan ikut pemilu dan tidak bersikap apatis. (T. 18, P. 5).

107. "Menjadi oposisi memang tidak enak. Nasdem akan jadi oposisi bila tidak masuk dua besar (dalam Pemilu 2014)," katanya pada acara orientasi calon legislatif Partai Nasdem Jawa Tengah di Solo, Rabu (19/6). (T. 19, P. 2).
108. "Sekarang ini memang ada pandangan yang sinis dan bahkan tidak percaya partai politik di negara ini. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, keberadaan demokrasi di Tanah Air akan terancam. Padahal keberadaan partai politik sangat strategis. Tampilnya Partai Nasdem ini akan membawa pembaruan," katanya. (T. 19, P. 6).
109. "Saya yakin calon legislatif di seluruh tigtakan dari kabupaten dan kota, provinsi serta pusat pasti ingin memenangkan pemilu legislatif tersebut. Gunakan strategi yang tepat untuk menarik simpati masyarakat," kata pria yang akrab disapa Ical itu di Nusa Dua, Bali, Jumat (21/6) petang. (T. 22, P. 3).
110. "Dan dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan "strong leadership" kepemimpinan yang kuat dan tegas. Jika tidak, sulit rasanya untuk melakukan gebrakan dalam pembangunan," papar Endang. (T. 24, P. 13).
111. "Namun sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa. Koalisi akan mulai terbaca pasca Pileg tentunya. Namun, sejauh ini PDIP punya peluang besar menjadi partai pemenang," tutur Endang. (T. 24, P. 16).
112. "Hasil survei itu berbeda-beda dari lembaga satu ke lembaga lain. Sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarinya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (T. 28, P. 2).
113. Dalam survei mengenai partisipasi politik dan perilaku memilih pra Pemilu 2014, partai bernomor urut 10 tersebut juga berada di nomor yang sama atau urutan tiga dari bawah dibandingkan partai politik lainnya. Menurutnya, survei tersebut masih bersifat subjektif, karena berbeda hasilnya dengan survei lain. (T. 28, P. 4).
114. "Coba melihat survei dari lembaga lainnya. Bahkan ada lembaga yang merilis hasil Partai Hanura berada di urutan ke-4," kata mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut. (T. 28, P. 5).
115. "Kita *kan* siapapun yang mau gabung, kita sangat berterima kasih. Apalagi mantan KSAD ini *kan* luar biasa. Darah segar bagi PD." (T. 29, P. 3)

c. Paragraf Campuran

116. PKS, kata Firman, menilai komitmen yang dibangun mereka bersama Setgab hanya mengacu pada hal-hal khusus. Sementara, Demokrat menganggap koalisi yang dibentuk mencakup secara umum atau keseluruhannya. (T. 7, P. 2).
117. Meski demikian, kata Wiranto untuk mencegah jeratan kasus korupsi tidak mudah, namun pihaknya berupaya tetap bisa mempertahankan predikat partai yang masih 'bersih. Sementara itu, terkait pencalonan presiden (capres) dari Hanura yang menyebutkan dirinya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu tidak berkomentar panjang. "Itu jalan terus," katanya. (T. 8, P. 4).
118. Menurut dia, dengan kondisi akhlak seperti ini sistem sebagus apapun dan undang-undang sebaik apapun sulit untuk diimplementasikan. Menyinggung selain PKB apa ada partai lain yang telah mendekatinya, dia mengatakan, dalam konteks pilpres tidak perlu banyak partai, cukup satu partai. Kalau tidak mencapai "electoral threshold" mungkin nanti baru muncul koalisi. (T. 9, P. 8).
119. Di satu sisi, PKS menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat. Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2).

120. Sebelumnya survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2 persen dan PDI Perjuangan 12,7 persen. Di bawah dua parpol itu, berurutan Partai Gerindra 7,3 persen, Partai Demokrat 7,1 persen, Partai Amanat Nasional 4 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 3,5 persen. (T. 17, P. 9).
121. Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 2,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan 2,2 persen, Partai Hanura 2,2 persen, Partai Nasdem 1,3 persen, Partai Bulan Bintang 0,4 persen, dan di urutan terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,2 persen. (T. 17, P. 10).
122. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrat menguasai pemilu 2009 dengan perolehan suara sebesar 20,81 persen dari total perolehan suara. Pemilu 2009, PKS memperoleh suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,9 persen dan mendapat 57 kursi di DPR (10 persen). (T. 17, P. 12).
123. Apa lagi, Partai Demokrat juga harus bergelut dengan persoalan kader dan non kader. Lalu belum ditegaskan apakah peserta konvensi harus menjadi anggota partai terlebih dahulu atau tidak. (T. 26, P. 17).

d. Paragraf Klimaks

124. "Mereka gugur karena syarat keterwakilan perempuan. Ironisnya karena persyaratan administrasi calon tersebut dan kesalahan penempatan nomor urut," kata Deputy Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz di Jakarta, Selasa (11/6). (T. 11, P. 2).
125. "Coba melihat survei dari lembaga lainnya. Bahkan ada lembaga yang merilis hasil Partai Hanura berada di urutan ke-4," kata mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut. (T. 28, P. 5).

e. Paragraf Antiklimaks

126. PKS hanya berpura-pura menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Gungun percaya pada akhirnya PKS bakal menyetujui opsi kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah. (T. 16, P. 7).
127. Bahkan PKS juga akan ikut ambil bagian dalam program kompensasi BLSM. "Seolah-olah menolak tapi dalam praktik lanjutannya PKS akan saling mengakomodasi," katanya. (T. 16, P. 8).

f. Paragraf Pertentangan

128. Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan meski banyak diunggulkan, sosok Joko Widodo masih perlu diuji. (T. 1, P. 1).
129. "Jokowi dapat rating tinggi, populer iya, tapi dia harus diuji. Betul nggak dia sudah sesuai dengan konsumsi sebagai presiden," kata Effendi dalam diskusi di Universitas Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/6). (T. 1, P. 2).
130. PKS, kata Firman, menilai komitmen yang dibangun mereka bersama Setgab hanya mengacu pada hal-hal khusus. Sementara, Demokrat menganggap koalisi yang dibentuk mencakup secara umum atau keseluruhannya. (T. 1, P. 2).
131. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang. (T. 14, P. 1).

132. Di satu sisi, PKS menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat. Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2).
133. Menurut Heri, secara ekonomis, menteri-menteri tersebut dipandang akan menguntungkan partai. "Tapi politik dua kaki ini sangat jelek, bagi pendidikan politik tidak baik. Dan tidak etis dilihat rakyat," ujar Heri di Jakarta, Sabtu (15/6). (T. 15, P. 3).
134. Sikap itu memang akan sangat dilematis, tetapi bila PKS betul-betul berpihak pada rakyat maka keluar dari koalisi disebut Heri sebagai langkah paling baik. (T. 15, P. 5).
135. "Saya senang gubernurnya Jokowi, untuk menengah ke bawah dia itu mau (merangkul). Kalau (gubernur) yang sebelumnya kan beda, dia menengah ke atas. Saya setuju Jokowi jadi presiden," kata Inda. (T. 21, P. 9).
136. Walaupun Jokowi mendapat respon positif dari warga tentang capres 2014, Jokowi sendiri menegaskan ia belum berminat menjadi capres dan lebih tertarik membenahi persoalan kota Jakarta. (T. 21, P. 10).
137. Namun, menurut Endang, pemilihan partai koalisi harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pileg. Karena jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. (T. 24, P. 15).
138. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, jika memang kemudian diketahui melakukan kesalahan, maka bisa saja terjadi perubahan. Tetapi Ferry cukup yakin proses verifikasi yang dilakukan KPU terhadap bacaleg telah dilakukan sesuai prosedur. (T. 25, P. 2).
139. Sebenarnya, lanjut Mahfud, gagasan sistem *primary election* yang digagas Demokrat sangat brilian. Itu membuka pintu bagi orang-orang yang tidak memiliki partai, tapi bisa berkompetisi tanpa melanggar konstitusi. Karena Mahfud menilai pencapresan lewat jalur independen melanggar konstitusi. (T. 26, P. 3).
140. Tetapi, ide konvensi yang diusung Demokrat menurutnya perlu diperjelas. Jangan sampai sistem konvensi itu hanya sebagai kamuflase. Padahal, tuturnya, Demokrat sudah menyiapkan calon tertentu yang sudah disiapkan untuk menang. (T. 26, P. 4).
141. Apa lagi, Partai Demokrat juga harus bergelut dengan persoalan kader dan non kader. Lalu belum ditegaskan apakah peserta konvensi harus menjadi anggota partai terlebih dahulu atau tidak. (T. 26, P. 5).

g. Paragraf Sebab-Akibat

142. Karena, lanjut Effendi, pemilihan presiden berbeda dengan pilkada. Ekspektasi masyarakat terhadap presiden pun berbeda dibanding harapan bagi gubernur. Walaupun elektabilitasnya tinggi, Jokowi juga harus menguji dirinya sendiri. Apakah memang mampu mengemban tanggung jawab memimpin negara. (T. 1, P. 3).
143. Menurut Jeffrie, kedua negarawan itu layak mendapat apresiasi karena telah mengiklaskan partainya melahirkan generasi baru untuk suksesi 2014 yang akan datang. (T. 2, P. 8).
144. "Keberadaan dua institusi ini adalah konsekuensi dari sistem bikameral yang kita anut, yang berperan dalam menghasilkan produk kebijakan. Untuk itu perlu mendorong partisipasi aktif generasi muda baik sebagai pemilih, maupun sebagai kandidat," ungkap Endang. (T. 2, P. 10).
145. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarak menilai konvensi yang akan dilakukan partainya merupakan kebutuhan nyata. Sebab, saat ini sulit mencari bakal calon presiden di Pemilu 2014. (T. 4, P. 1).

146. Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. (T. 4, P. 4).
147. Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, memperkirakan PKS tidak akan lolos "parliamentary threshold" (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2014 karena perolehan suaranya di bawah 3,5 persen. (T. 17, P. 1).
148. "Pemilih PKS adalah orang yang terdidik dan menjunjung tinggi unsur-unsur moral. Apabila banyak elit PKS yang melakukan korupsi dan tindakan tidak bermoral maka konstituennya akan pergi ke partai yang relatif bersih," kata Toto Sugiarto kepada Antara di Jakarta, Senin. (T. 17, P. 2).
149. Toto mengatakan menurunnya suara PKS disebabkan pencitraan negatif terkait kasus yang menjerat mantan presidennya yaitu Luthfi Hasan Ishaq. (T. 17, P. 3).
150. Hal itu, menurut dia, menyebabkan beralihnya suara konstituen partai tersebut ke partai lain yang masih dianggap bersih dari kasus hukum. (T. 17, P. 4).
151. Dana mengatakan memang benar bahwa saat ini banyak politisi yang busuk dan korupsi, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membersihkan korupsi dari dalam dengan ikut pemilu dan tidak bersikap apatis. (T. 17, P. 5).
152. Bagi Nasdem, kata dia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sangat menentukan perolehan suara dalam Pemilu 2014. Ia mengatakan untuk di Jawa Tengah ini tercatat sebanyak 1.747 calon legislatif baik untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (T. 17, P. 3).
153. "Untuk itu kami minta semua calon tersebut bisa bekerja keras agar bisa membawa perubahan bagi bangsa ini," katanya. (T. 17, P. 4).
154. Seorang karyawan, Inda (29), menyatakan menyetujui Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden karena gubernur DKI Jakarta tersebut mau turun langsung membantu warga menengah kebawah. (T. 21, P. 8).
155. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengingatkan persaingan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang akan sangat ketat. (T. 22, P. 1).
156. Karenanya, kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) Golkar, ia berharap terus berjuang memenangkan Golkar. (T. 22, P. 2).
157. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada keputusannya untuk menggugurkan semua bakal calon legislatif (caleg) di beberapa daerah pemilihan (dapil). KPU melakukan pencoretan karena ada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. (T. 23, P. 1).
158. "Semua partai sudah mengikutinya. Agak membingungkan kalau begitu kena, baru dipermasalahkan," kata Hadar saat dihubungi *Republika* di Jakarta, Ahad (23/6). (T. 23, P. 3).
159. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, P. 1).
160. Pasalnya, belum ada kejelasan waktu dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. "Apa yang dilakukan Demokrat belum jelas juga, dulu katanya Juni, lalu mundur Agustus, mundur lagi September," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (26/6). (T. 26, P. 2).
161. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. (T. 28, P. 1).
162. Syarif juga menilai wajar jika Pramono ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pembina Demokrat. Sebab, ia cukup senior dan memiliki kemampuan yang bagus. "Sangat pantas jadi anggota dewan Pembina," katanya mengakhiri. (T. 29, P. 4).

163. Peluang Marzuki mendapat restu SBY di konvensi capres Demokrat tidaklah sebesar Pramono. Indikasinya menurut Siti terlihat dari sikap politik SBY yang tidak merestui Marzuki menjadi ketua umum Demokrat saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu. Bergabungnya Pramono menjadi sinyal kuat bakal kemana arah restu SBY untuk capres mendatang. "Kehendak SBY menjadi Pramono sebagai capres sudah tak terbandung," ujarnya. (T. 30, P. 3).
164. Dukungan SBY terhadap Pramono belum tentu berdampak positif bagi Demokrat. Pasalnya publik bisa menganggap konvensi capres Demokrat hanya sekadar akal-akalan belaka. Konvensi tidak diadakan untuk mencari figur pemimpin terbaik melainkan hanya alat legitimasi meloloskan kerabat keluarga. "Publik bisa menganggap konvensi hanya topeng demokrasi," katanya. (T. 30, P. 4).
165. Siti mengatakan dukungan SBY merupakan kunci penentu siapa capres Partai Demokrat di 2014. Hal ini karena menurutnya SBY memiliki otoritas yang besar baik sebagai ketua umum maupun ketua majelis tinggi. Terlebih, imbuh Siti, saat ini nyaris tidak ada satu faksipun yang bisa menandingi faksi Cikeas di Demokrat. "SBY bukan sekadar ketua umum tapi juga presiden," ujarnya. (T. 30, P. 5).

h. Paragraf Contoh

166. Kesadaran berpolitik dan bernegara di kalangan mahasiswa harus digalakkan. Misalnya, kampus-kampus melakukan kajian politik dan kebangsaan secara rutin. (T. 18, P. 7).
167. Menurut Jeffrie, Jokowi sebagai capres dari generasi baru tentu harus mencari cawapres yang punya senioritas dalam politik Indonesia, seperti halnya Obama dengan Joe Biden. (T. 18, P. 5).
168. "Jadi belum (akan ikut), karena itu tadi, kapan dibuka, kalau dibuka mau daftar kemana, aturan belum ada. Misalnya ikut, hak dan kewajibannya belum jelas," ungkap Mahfud. (T. 26, P. 6).

i. Paragraf Definisi

169. Di satu sisi, PKS menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat. Tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (T. 15, P. 2).
170. Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM. "Padahal tidak ada BLSM tanpa kenaikan BBM," kata Gungun ketika dihubungi Republika, Ahad (16/6). (T. 15, P. 2).

j. Paragraf Klasifikasi

171. KPU sebelumnya mencoret caleg dari lima partai politik yang kedapatan tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), Partai Amanat Nasional (Dapil Sumatera Barat I), dan Gerindra (Dapil Jawa Barat IX). (T. 23, P. 4).
172. Partai lainnya yang terkena pencoretan ini adalah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I), serta Hanura (Dapil Jawa Barat II). (T. 23, P. 5).

12.2 Klasifikasi Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

No.	Jenis Paragraf	Temuan Jumlah Kalimat yang menggunakan	Ket.
1	Paragraf deduktif	96	Paragraf deduktif mendominasi penggunaan variasi
2	Paragraf induktif	19	
3	Paragraf campuran	8	

4	Paragraf klimaks	2	paragraf dalam tekaporol
5	Paragraf antiklimaks	2	
6	Paragraf pertentangan	14	
7	Paragraf Sebab akibat	24	
8	Paragraf contoh	3	
9	Paragraf definisi	2	
10	Paragraf klasifikasi	2	

12.3 Klasifikasi Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

1. Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan meski banyak diunggulkan, sosok Joko Widodo masih perlu diuji. (T.1, P. 1)
2. Megawati, menurutnya masih meminta semua kader untuk berkonsentrasi memenangkan pemilu legislatif 2014. (T. 1, P. 5)
3. *Board of Advisor* pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, optimistis pada 2014 Indonesia akan dipimpin presiden baru dari generasi baru. (T. 2, P. 1)
4. "Akhirnya semakin nyata dan tampak jelas bahwa 2014 yang akan datang, satu tahun lagi, kita anak bangsa negeri ini akan memiliki Presiden baru, dari generasi baru," ujar Jeffrie, Ahad (6/2). (T. 2, P. 2)
5. Peneliti pada Maarif Institute, Endang Tirtana menambahkan, selain berbicara kepemimpinan Presiden dan wakilnya di 2014, pemilihan legislatif dan DPD juga harus menjadi perhatian penting. (T. 2, P. 9)
6. Jeffrie menambahkan keenam nama tokoh muda itulah yang berpeluang menjadi Presiden RI berikutnya. (T. 2, P. 5)
7. Ia menilai jagoan dari partai lain akan semakin meredup karena partai-partai lain menampilkan tokoh-tokoh dari generasi lama yang tidak dikehendaki oleh mayoritas masyarakat di negeri ini. (T. 2, P. 6)
8. DPP Partai Hanura melakukan rotasi fraksi di DPR. Ketua Fraksi Hanura Sunardi Ayub digantikan posisinya oleh Syarifuddin Sudding. (T. 3, P. 1)
9. "Saat ini Ketua Fraksi Hanura di DPR di jabat oleh Syarifudin Sudding," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin melalui pesan singkat ke wartawan, Senin (3/6). (T. 3, P. 2).
10. Saleh menyatakan Hanura berharap rotasi jabatan yang mereka lakukan bisa membuat kerja politik Hanura lebih dinamis. (T. 3, P. 5)
11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tertarik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden tahun 2014. (T. 5, P. 1).
12. "Di PKB kita terapkan musyawarah, konvensi itu tidak punya sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu. (T. 5, P. 2).
13. "Kita belum berpikir soal pilpres karena PKB hari ini fokus pada bagaimana memperoleh kursi di parlemen, dan target kami adalah 100 kursi, baru setelah itu bicara pencapresan," katanya. (T. 5, P. 4)
14. Yang jelas, kata Imam, persoalan kepada figur yang mana nanti dukungan PKB akan diarahkan, baru diputuskan setelah pemilihan anggota legislatif. (T. 5, p. 6).
15. Muhammadiyah melarang kader dan warganya untuk tidak memilih atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2013. (T. 6, P. 1).

16. Kemudian di tahun 2009, dia mengaku juga dilamar menjadi calon wapres oleh seorang capres, tetapi saat itu dirinya sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun. (T. 9, P. 2).
17. Ia mengatakan, sebagai konsekuensi logis ketika dirinya dan Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai komitmen untuk 2014 tentu akan terus mempersiapkan diri. (T. 9, P. 4)
18. Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula. (T. 12, P. 1).
19. Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, Dr Kadri.(T. 13, P. 1).
20. Menurutnya, kemungkinan permainan politik uang pada Pemilu 2014 mendatang tak bisa dihindari, terutama karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. (T. 13, p. 2).
21. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang. (T. 14, P. 1).
22. Politik dua kaki yang dimainkan PKS saat ini, dinilai pakar komunikasi politik, Heri Budianto menguntungkan partai tarbiyah tersebut. (T. 15, P. 1).
23. Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. (T. 15, P. 4).
24. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gungun Heryanto mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah memainkan politik dua muka dalam isu kenaikan harga BBM bersubsidi. (T. 16, P. 1).
25. Toto mengatakan menurunnya suara PKS disebabkan pencitraan negatif terkait kasus yang menjerat mantan presidennya yaitu Luthfi Hasan Ishaq. (T. 17, p. 3).
26. Hal itu, menurut dia, menyebabkan beralihnya suara konstituen partai tersebut ke partai lain yang masih dianggap bersih dari kasus hukum. (T. 17, p. 4).
27. Selain itu, menurut dia, suara Partai Demokrat juga diperkirakan akan menurun drastis di Pemilu 2014 hingga 12 persen dibandingkan Pemilu 2009. (T. 17, P. 6).
28. "Di Pemilu 2009 Demokrat meraih 20 persen maka di 2014 kemungkinan akan menurun hingga 12 persen sehingga diperkirakan hanya meraih 8 persen suara," (T. 17, P. 7).
29. Toto memperkirakan suara konstituen Demokrat akan pindah ke partai yang demokrat-nasionalis seperti Gerindra, Hanura, Golkar dan Nasional Demokrat. (T. 17, P. 8).
30. Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. (T. 17, P. 11).
31. Ketua PP Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) Muhammad Pradana Indraputra menyerukan agar mahasiswa tidak menjadi golongan putih alias golput dalam berbagai pemilu di Indonesia termasuk pilpres. (T. 18, P. 1).
32. "Sangat berbahaya jika para mahasiswa bersikap apatis dalam pemilu sebab masa depan bangsa ditentukan oleh pemilu," katanya di Jakarta, Selasa, (18/6). (T. 18, P. 2).
33. "Siapa yang akan memimpin bangsa jika mahasiswa sudah tidak peduli dengan politik dan pemerintahan," ujar Dana.(T. 18, P. 4).
34. "Kalau apatis, bahayanya malah yang terburuk terpilih di antara yang buruk, ini mengerikan," kata Dana. (T. 18, P. 6).

35. Kesadaran berpolitik dan bernegara di kalangan mahasiswa harus digalakkan. Misalnya, kampus-kampus melakukan kajian politik dan kebangsaan secara rutin. (T. 18, p. 7).
36. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partai yang dipimpinnya bakal menjadi oposisi apabila dalam Pemilu 2014 gagal masuk dua besar dalam perolehan suara. (T. 19, P. 1).
37. "Untuk itu kami minta semua calon tersebut bisa bekerja keras agar bisa membawa perubahan bagi bangsa ini," katanya. (T. 19, p. 4).
38. Dikatakannya, Partai Nasdem didirikan bukan sekadar untuk ikut Pemilu 2014, melainkan mempunyai tujuan mulia, yaitu membawa perubahan demi bangsa dan negara ini. (T. 19, p. 5).
39. Ia mengatakan Nasdem merupakan satu-satunya partai baru yang ikut Pemilu 2014, sehingga harus bisa memperbaiki keadaan yang ada sekarang ini agar menjadi lebih baik lagi. (T. 19, p. 8).
40. Sejumlah warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon presiden 2014-2019 pada Pemilu 2014. (T. 21, P. 1).
41. Beberapa warga yang ditemui Antara di Jakarta, Jumat menyatakan alasannya, karena mantan wali kota Solo itu terus turun ke bawah untuk menemui warganya untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka. (T. 21, p. 2).
42. "Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. (T. 21, p. 3).
43. Setelah tujuh tahun memimpin Surakarta, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012. (T. 21, P. 5).
44. Menurut survei yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi menjadi kandidat presiden yang paling diminati oleh responden. (T. 21, P. 6).
45. Walaupun Jokowi mendapat respon positif dari warga tentang capres 2014, Jokowi sendiri menegaskan ia belum berminat menjadi capres dan lebih tertarik membenahi persoalan kota Jakarta. (T. 21, p. 10).
46. "Ngurusin KJS sama rusun saja saya sudah loncat-loncat begini," kata Jokowi. (T. 21, P. 11).
47. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengingatkan persaingan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang akan sangat ketat. (T. 22, P. 1).
48. Karenanya, kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) Golkar, ia berharap terus berjuang memenangkan Golkar. (T. 22, P. 2).
49. Saat membuka pembekalan caleg se-Indonesia dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ical mengatakan, tanpa kerja keras mustahil akan lolos dalam pemilu legislatif mendatang. (T. 22, P. 4).
50. "Tapi saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya. (T. 22, P. 5).
51. Partai lainnya yang terkena pencoretan ini adalah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I), serta Hanura (Dapil Jawa Barat II). (T. 23, P. 5).
52. Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika tak menggandeng Demokrat dan Gerindra. (T. 24, P. 1).
53. "Namun tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 2).

54. "Kemudian Golkar pascamunas tersebut akan berkoalisi dengan PDIP," ungkapnya. (T. 24, P. 4).
55. Menurut Jeffrie, Jokowi sebagai capres dari generasi baru tentu harus mencari cawapres yang punya senioritas dalam politik Indonesia, seperti halnya Obama dengan Joe Biden. (T. 24, P. 5).
56. Tokoh Golkar senior tersebut juga sebaiknya mempunyai kemampuan diplomasi luar negeri yang baik, mengingat Jokowi akan fokus mengurus dalam negeri," papar Jeffrie. (T. 24, P. 6).
57. Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, menambahkan, pada era kepemimpinan SBY, koalisi yang terbangun adalah model multi-partai, yang terdiri dari banyak partai. (T. 24, P. 10).
58. Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya satu partai penguasa dan satu partai oposisi, kata Endang, Indonesia dengan multipartai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. (T. 24, P. 12).
59. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, KPU memang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan parpol terkait pencoretan dapil. (T. 25, P. 3).
60. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, P. 1).
61. Hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan calon presiden dengan elektabilitas tertinggi masih ditempati Joko Widodo. (T. 27, P. 1).
62. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. (T. 28, P. 1).
63. Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Jumat (28/6). (T. 28, P. 3).
64. Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah jika mantan KSAD, Jenderal (purn) TNI, Pramono Edhie Wibowo disiapkan untuk menjadi capres pada konvensi Demokrat. (T. 29, P. 1).
65. "Pak Pramono akan menjadi pesaing ketat Pak Marzuki," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Minggu (30/6). (T. 30, P. 2).

12.4 Interpretasi Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat pada Tekaporol Tanggal 1-30 Juni 2013

Hasil Klasifikasi	Temuan Jumlah Paragraf yang Terdiri dari 1 Kalimat pada Tekaporol	Ket.
dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 12, 12.3.	65 paragraf	Paragraf dibangun oleh dua kalimat atau lebih yang saling berkaitan, dan memiliki sebuah gagasan. Di dalamnya ada kalimat utama yang berisi gagasan utama; dan ada sejumlah kalimat lain yang berisi keterangan tambahan terhadap gagasan utama itu (Chaer, 2010:34-35). Jadi, penggunaan paragraf yang berisi 1 kalimat pada tekaporol merupakan suatu variasi paragraf yang tidak dapat temukan pada ragam bahasa ilmiah.

12.5 Tabel Klasifikasi Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat yang dapat Digabung dengan Paragraf Sebelumnya atau Setelahnnya

No.	Paragraf Sebelum Digabungkan	Paragraf Setelah Digabungkan
1.	Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan meski banyak diunggulkan, sosok Joko Widodo masih perlu diuji. (T.1, P. 1).	Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan meski banyak diunggulkan, sosok Joko Widodo masih perlu diuji. "Jokowi dapat rating tinggi, populer iya, tapi dia harus diuji. Betul nggak dia sudah sesuai dengan konsumsi sebagai presiden," kata Effendi dalam diskusi di Universitas Nasional, di Jakarta, Sabtu (1/6). (T. 1, p. 1-2).
2.	Megawati, menurutnya masih meminta semua kader untuk berkonsentrasi memenangkan pemilu legislatif 2014. (T. 1, P. 5).	Megawati, menurutnya masih meminta semua kader untuk berkonsentrasi memenangkan pemilu legislatif 2014. " <u>Tapi</u> wacana tokoh muda itu memang terus berkembang. Bu Mega juga mendengar," ujar dia. (T. 1, P. 5-6)
3.	<i>Board of Advisor</i> pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, optimistis pada 2014 Indonesia akan dipimpin presiden baru dari generasi baru. (T. 2, P. 1).	<i>Board of Advisor</i> pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie, optimistis pada 2014 Indonesia akan dipimpin presiden baru dari generasi baru. "Akhirnya semakin nyata dan tampak jelas bahwa 2014 yang akan datang, satu tahun lagi, kita anak bangsa negeri ini akan memiliki Presiden baru, dari generasi baru," ujar Jeffrie, Ahad (6/2). (T. 2, P. 1-2)
	"Akhirnya semakin nyata dan tampak jelas bahwa 2014 yang akan datang, satu tahun lagi, kita anak bangsa negeri ini akan memiliki Presiden baru, dari generasi baru," ujar Jeffrie, Ahad (6/2). (T. 2, P. 2).	
4.	Jeffrie menambahkan keenam nama tokoh muda itulah yang berpeluang menjadi Presiden RI berikutnya. (T. 2, P. 5).	Jeffrie menambahkan keenam nama tokoh muda itulah yang berpeluang menjadi Presiden RI berikutnya. Ia menilai jagoan dari partai lain akan semakin meredup karena partai-partai lain menampilkan tokoh-tokoh dari generasi lama yang tidak dikehendaki oleh mayoritas masyarakat di negeri ini. (T. 2, P. 5-6)
	Ia menilai jagoan dari partai lain akan semakin meredup karena partai-partai lain menampilkan tokoh-tokoh dari generasi lama yang tidak dikehendaki oleh mayoritas masyarakat di negeri ini. (T. 2, P. 6).	
5.	Peneliti pada Maarif Institute, Endang Tirtana menambahkan, selain berbicara kepemimpinan Presiden dan wakilnya di 2014, pemilihan legislatif dan DPD juga harus menjadi perhatian penting. (T. 2, p. 9).	Peneliti pada Maarif Institute, Endang Tirtana menambahkan, selain berbicara kepemimpinan Presiden dan wakilnya di 2014, pemilihan legislatif dan DPD juga harus menjadi perhatian penting. "Keberadaan dua institusi ini adalah konsekuensi dari sistem bikameral yang kita anut, yang berperan dalam menghasilkan produk kebijakan. Untuk itu perlu mendorong partisipasi aktif generasi muda baik sebagai pemilih, maupun sebagai kandidat," ungkap Endang. (k. 2, p. 9-10).
6.	DPP Partai Hanura melakukan rotasi fraksi di DPR. Ketua Fraksi Hanura Sunardi Ayub digantikan posisinya oleh Syarifuddin Sudding. (T. 3, P. 1)	DPP Partai Hanura melakukan rotasi fraksi di DPR. Ketua Fraksi Hanura Sunardi Ayub digantikan posisinya oleh Syarifuddin Sudding. "Saat ini Ketua Fraksi Hanura di DPR dijabat oleh Syarifudin Sudding," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin melalui pesan singkat ke wartawan, Senin (3/6). (T. 3, P. 1-2).
	"Saat ini Ketua Fraksi Hanura di DPR di jabat oleh Syarifudin Sudding," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin melalui pesan singkat ke	

	wartawan, Senin (3/6). (T. 3, P. 2)	
7.	Saleh menyatakan Hanura berharap rotasi jabatan yang mereka lakukan bisa membuat kerja politik Hanura lebih dinamis. (T. 3, P. 5)	Saleh menyatakan Hanura berharap rotasi jabatan yang mereka lakukan bisa membuat kerja politik Hanura lebih dinamis. Terlebih, tahun ini merupakan tahun politik menuju 2014. "Kita harapkan fraksi akan lebih bergerak dinamis dalam menyikapi situasi politik ke depan dan bekerja lebih taktis lagi," ujarnya. (T. 3, P. 5-6).
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tertarik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden tahun 2014. (T. 5, P. 1). "Di PKB kita terapkan musyawarah, konvensi itu tidak punya sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu. (T. 5, P. 2).	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak tertarik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden tahun 2014. "Di PKB kita terapkan musyawarah, konvensi itu tidak punya sosok," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu. (T. 5, P. 1-2).
9.	"Kita belum berpikir soal pilpres karena PKB hari ini fokus pada bagaimana memperoleh kursi di parlemen, dan target kami adalah 100 kursi, baru setelah itu bicara pencapresan," katanya. (T. 5, P. 4)	Menurut Imam, saat ini PKB belum tertarik berbicara mengenai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Namun, mengenai mekanisme penjangkaran sudah ada kesepakatan. "Kita belum berpikir soal pilpres karena PKB hari ini fokus pada bagaimana memperoleh kursi di parlemen, dan target kami adalah 100 kursi, baru setelah itu bicara pencapresan," katanya. (T. 5, P. 3-4).
10.	Yang jelas, kata Imam, persoalan kepada figur yang mana nanti dukungan PKB akan diarahkan, baru diputuskan setelah pemilihan anggota legislatif. (T. 5, p. 6).	Meski demikian, Imam Nahrawi mengakui ada sejumlah figur yang memiliki kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang bagus, sehingga layak menjadi calon presiden. "Ada Mahfud MD, Rhoma Irama, dan sebagainya, kita lihat saja nanti bagaimana," katanya. Yang jelas, kata Imam, persoalan kepada figur yang mana nanti dukungan PKB akan diarahkan, baru diputuskan setelah pemilihan anggota legislatif. (T. 5, p. 5-6).
11.	Muhammadiyah melarang kader dan warganya untuk tidak memilih atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2013. (T. 6, P. 1).	Muhammadiyah melarang kader dan warganya untuk tidak memilih atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2013. "Kami mendorong agar warga Muhammadiyah melaksanakan hak pilihnya pada Pilkada Jatim, serta Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di sela kunjungannya di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Kamis (6/6). (T. 6, P. 1-2).
12.	Kemudian di tahun 2009, dia mengaku juga dilamar menjadi calon wapres oleh seorang capres, tetapi saat itu dirinya sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun. (T. 9, P. 2).	Kemudian di tahun 2009, dia mengaku juga dilamar menjadi calon wapres oleh seorang capres, tetapi saat itu dirinya sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun. Ia mengatakan hal tersebut sebelum menjadi pembicara pada tabligh akbar peringatan Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW di Lapangan Krasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. (T. 9, P. 2-3).

13.	Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula. (T. 12, P. 1).	Pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai media televisi sangat efektif menggaet pemilih pemula. "Kampanye itu (tatap muka) tidak semua publik tahu. Karena itu peran media (televisi) bisa menyampaikan kandidat secara jujur mengenai calon tersebut," kata Ade Armando usai diskusi The Indonesian Institute bertajuk "Kiprah Media Massa Jelang 2014" di Jakarta, Rabu (12/6). (T. 12, P. 1-2).
14.	Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, Dr Kadri.(T. 13, P. 1). Menurutnya, kemungkinan permainan politik uang pada Pemilu 2014 mendatang tak bisa dihindari, terutama karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. (T. 13, p. 2).	Politik uang tidak bisa dihindari, kata pengamat sosial politik IAIN Mataram, Dr Kadri. Menurutnya, kemungkinan permainan politik uang pada Pemilu 2014 mendatang tak bisa dihindari, terutama karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. (T. 13, p. 2).
15.	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang. (T. 14, P. 1).	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan bahwa koreksi internal terhadap hasil Daftar Caleg Sementara masih mungkin terjadi, meskipun sudah melalui pencermatan berulang-ulang. "Karena ini merupakan pekerjaan manual, bukan kerja mesin, jadi sangat mungkin saja itu ada faktor 'human error' kurang cermatan dan kealpaan," ujar Ida Budhiati di Jakarta, Jumat (14/6). Ida mengatakan apabila terjadi kesalahan terhadap hasil DCS yang dilakukan penyelenggara pemilu, KPU akan memperbaikinya dan mengoordinasikan dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (T. 14, P. 1-2).
16.	Politik dua kaki yang dimainkan PKS saat ini, dinilai pakar komunikasi politik, Heri Budianto menguntungkan partai tarbiyah tersebut. (T. 15, P. 1).	Politik dua kaki yang dimainkan PKS saat ini, dinilai pakar komunikasi politik, Heri Budianto menguntungkan partai tarbiyah tersebut. Di satu sisi, PKS menunjukkan mereka parpol yang pro rakyat, tetapi di satu sisi, mereka bertahan dalam koalisi dan tetap mendapatkan berkah dari tiga kadernya yang menjadi menteri dalam kabinet SBY. (k. 2, p. 2) (T. 15, P. 1-2)
17.	Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, sebaiknya PKS keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. (T. 15, P. 4).	Heri mengusulkan, jika benar-benar berniat meningkatkan kembali elektabilitasnya, keluar dari koalisi merupakan salah satu cara yang paling ampuh. Sikap itu memang akan sangat dilematis, tetapi bila PKS betul-betul berpihak pada rakyat maka keluar dari koalisi disebut Heri sebagai langkah paling baik. (T. 15, P. 4-5).
18.	Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gungun Heryanto mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah memainkan politik dua muka dalam isu kenaikan harga BBM bersubsidi. (T. 16, P. 1).	Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gungun Heryanto mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah memainkan politik dua muka dalam isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menolak kenaikan harga BBM namun di sisi lain setuju dengan program kompesasi BLSM. "Padahal tidak ada BLSM tanpa kenaikan BBM," kata Gungun ketika dihubungi Republika, Ahad (16/6). (T. 16, P. 1-2).

19.	Toto mengatakan menurunnya suara PKS disebabkan pencitraan negatif terkait kasus yang menjerat mantan presidennya yaitu Luthfi Hasan Ishaq. (T. 17, p. 3).	Toto mengatakan menurunnya suara PKS disebabkan pencitraan negatif terkait kasus yang menjerat mantan presidennya yaitu Luthfi Hasan Ishaq. Hal itu, menurut dia, menyebabkan beralihnya suara konstituen partai tersebut ke partai lain yang masih dianggap bersih dari kasus hukum. (T. 17, p. 4).
20.	Selain itu, menurut dia, suara Partai Demokrat juga diperkirakan akan menurun drastis di Pemilu 2014 hingga 12 persen dibandingkan Pemilu 2009. (T. 17, P. 6). "Di Pemilu 2009 Demokrat meraih 20 persen maka di 2014 kemungkinan akan menurun hingga 12 persen sehingga diperkirakan hanya meraih 8 persen suara," (T. 17, P. 7).	Selain itu, menurut dia, suara Partai Demokrat juga diperkirakan akan menurun drastis di Pemilu 2014 hingga 12 persen dibandingkan Pemilu 2009. "Di Pemilu 2009 Demokrat meraih 20 persen maka di 2014 kemungkinan akan menurun hingga 12 persen sehingga diperkirakan hanya meraih 8 persen suara," (T. 17, P. 6-7).
21.	Toto memperkirakan suara konstituen Demokrat akan pindah ke partai yang demokrat-nasionalis seperti Gerindra, Hanura, Golkar dan Nasional Demokrat. (T. 17, P. 8).	Toto memperkirakan suara konstituen Demokrat akan pindah ke partai yang demokrat-nasionalis seperti Gerindra, Hanura, Golkar dan Nasional Demokrat. Sebelumnya survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menyebutkan elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2 persen dan PDI Perjuangan 12,7 persen. Di bawah dua parpol itu, berurutan Partai Gerindra 7,3 persen, Partai Demokrat 7,1 persen, Partai Amanat Nasional 4 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 3,5 persen. (T. 17, P. 8-9).
22.	Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. (T. 17, P. 11).	Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 2,7 persen, Partai Persatuan Pembangunan 2,2 persen, Partai Hanura 2,2 persen, Partai Nasdem 1,3 persen, Partai Bulan Bintang 0,4 persen, dan di urutan terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,2 persen. Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. (T. 17, P. 10-11).
23.	Ketua PP Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) Muhammad Pradana Indraputra menyerukan agar mahasiswa tidak menjadi golongan putih alias golput dalam berbagai pemilu di Indonesia termasuk pilpres. (T. 18, P. 1). "Sangat berbahaya jika para mahasiswa bersikap apatis dalam pemilu sebab masa depan bangsa ditentukan oleh pemilu," katanya di Jakarta, Selasa, (18/6). (T. 18, P. 2).	Ketua PP Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) Muhammad Pradana Indraputra menyerukan agar mahasiswa tidak menjadi golongan putih alias golput dalam berbagai pemilu di Indonesia termasuk pilpres. "Sangat berbahaya jika para mahasiswa bersikap apatis dalam pemilu sebab masa depan bangsa ditentukan oleh pemilu," katanya di Jakarta, Selasa, (18/6). (T. 18, P. 1-2).
24.	"Siapa yang akan memimpin bangsa jika mahasiswa sudah tidak peduli dengan politik dan pemerintahan," ujar Dana.(T. 18, P. 4).	Menurutnya, saat ini mahasiswa sudah banyak yang tidak peduli dengan politik. Ini merupakan cerminan awal kerusakan generasi baru di Tanah Air. "Siapa yang akan memimpin bangsa jika mahasiswa sudah tidak peduli dengan politik dan pemerintahan," ujar Dana.(T. 18, P. 3-4).

25.	"Kalau apatis, bahayanya malah yang terburuk terpilih di antara yang buruk, ini mengerikan," kata Dana. (T. 18, P. 6).	Dana mengatakan memang benar bahwa saat ini banyak politisi yang busuk dan korupsi, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, ia mengajak mahasiswa membersihkan korupsi dari dalam dengan ikut pemilu dan tidak bersikap apatis. "Kalau apatis, bahayanya malah yang terburuk terpilih di antara yang buruk, ini mengerikan," kata Dana. (T. 18, P. 5-6).
26.	Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partai yang dipimpinnya bakal menjadi oposisi apabila dalam Pemilu 2014 gagal masuk dua besar dalam perolehan suara. (T. 19, P. 1).	Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partai yang dipimpinnya bakal menjadi oposisi apabila dalam Pemilu 2014 gagal masuk dua besar dalam perolehan suara. "Menjadi oposisi memang tidak enak. Nasdem akan jadi oposisi bila tidak masuk dua besar (dalam Pemilu 2014)," katanya pada acara orientasi calon legislatif Partai Nasdem Jawa Tengah di Solo, Rabu (19/6). (T. 19, P. 1-2).
27.	Sejumlah warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon presiden 2014-2019 pada Pemilu 2014. (T. 21, P. 1). Beberapa warga yang ditemui Antara di Jakarta, Jumat menyatakan alasannya, karena mantan wali kota Solo itu terus turun ke bawah untuk menemui warganya untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka. (T. 21, p. 2).	Sejumlah warga Jakarta mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon presiden 2014-2019 pada Pemilu 2014. (T. 21, P. 1). Beberapa warga yang ditemui Antara di Jakarta, Jumat menyatakan alasannya, karena mantan wali kota Solo itu terus turun ke bawah untuk menemui warganya untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka. (T. 21, p. 2).
28.	"Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. (T. 21, p. 3).	Beberapa warga yang ditemui Antara di Jakarta, Jumat menyatakan alasannya, karena mantan wali kota Solo itu terus turun ke bawah untuk menemui warganya untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka. "Saya setuju sekali Pak Jokowi jadi presiden, setahu saya selama saya hidup di Jakarta, belum ada gubernur yang terjun ke got, berarti dia itu turun ke masyarakat," kata pedagang rujak, Wisnu (75) ketika dimintai komentarnya tentang situasi menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-486. (T. 21, p. 2-3).
29.	Setelah tujuh tahun memimpin Surakarta, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012. (T. 21, P. 5).	Menurut dia, jasa Jokowi sudah diakui dari tingkat wilayah hingga Asia, bahkan dunia. Saat menjabat sebagai wali kota Surakarta, Jokowi terpilih menjadi wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012 yang di selenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan walikota sedunia di Inggris. Setelah tujuh tahun memimpin Surakarta, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak
30.	Menurut survei yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi menjadi kandidat presiden yang paling diminati oleh responden. (T. 21, P. 6).	Menurut survei yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jokowi menjadi kandidat presiden yang paling diminati oleh responden. Dari 1.635 responden di 31 provinsi, Jokowi mendapatkan 28.6 persen. Angka tersebut melampaui dukungan untuk Prabowo Subianto (15.6 persen) dan Megawati Soekarnoputri (5.4 persen). (k. 2, p. 7). (T. 21, P. 6-7).
31.	Walaupun Jokowi mendapat respon positif dari warga tentang capres 2014, Jokowi sendiri menegaskan ia belum berminat menjadi capres dan lebih tertarik membenahi persoalan kota Jakarta. (T. 21, p. 10).	Walaupun Jokowi mendapat respon positif dari warga tentang capres 2014, Jokowi sendiri menegaskan ia belum berminat menjadi capres dan lebih tertarik membenahi persoalan kota Jakarta. "Ngrusin KJS sama rusun saja saya sudah loncat-loncat begini," kata Jokowi. (T. 21, P. 10-11).

	"Ngurusin KJS sama rusun saja saya sudah loncat-loncat begini," kata Jokowi. (T. 21, P. 11).	
32.	Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengingatkan persaingan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang akan sangat ketat. (T. 22 P 1) Karenanya, kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) Golkar, ia berharap terus berjuang memenangkan Golkar. (T. 22, P. 2).	Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengingatkan persaingan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang akan sangat ketat. Karenanya, kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) Golkar, ia berharap terus berjuang memenangkan Golkar. (T. 22, P. 1-2).
33.	Saat membuka pembekalan caleg se-Indonesia dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ical mengatakan, tanpa kerja keras mustahil akan lolos dalam pemilu legislatif mendatang. (T. 22, P. 5). "Tapi saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya. (T. 22, P. 5).	Saat membuka pembekalan caleg se-Indonesia dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ical mengatakan, tanpa kerja keras mustahil akan lolos dalam pemilu legislatif mendatang. "Tapi saya yakin bahwa semua kader Golkar akan berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang," tuturnya. (T. 22, P. 4-5).
34.	Partai lainnya yang terkena pencoretan ini adalah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I), serta Hanura (Dapil Jawa Barat II). (T. 23, P. 5).	KPU sebelumnya mencoret caleg dari lima partai politik yang kepadatan tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dapil. Partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), Partai Amanat Nasional (Dapil Sumatera Barat I), dan Gerindra (Dapil Jawa Barat IX). Partai lainnya yang terkena pencoretan ini adalah Partai Keadilan Persatuan Indonesia (Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I), serta Hanura (Dapil Jawa
35.	Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika tak menggandeng Demokrat dan Gerindra. (T. 24, P. 1). "Namun tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 2).	Board of Advisor CSIS, Jeffrie Geovanie, memprediksi setelah Pemilu 2014 PDI Perjuangan mau tak mau harus berkoalisi dengan Golkar jika tak menggandeng Demokrat dan Gerindra. "Namun tentu bukan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Tapi Golkar pascamunas 2015," ujar Jeffrie, Senin (24/6). (T. 24, P. 1-2).
36.	"Kemudian Golkar pascamunas tersebut akan berkoalisi dengan PDIP," ungkapnya. (T. 24, P. 4).	Saat ditanya siapa tokoh Golkar yang berpeluang untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, Jeffrie menjawab tokoh Golkar agar memiliki dasar untuk mengambil-alih Golkar pada munas 2015. "Kemudian Golkar pascamunas tersebut akan berkoalisi dengan PDIP," ungkapnya. (T. 24, P. 3-4).
37.	Menurut Jeffrie, Jokowi sebagai capres dari generasi baru tentu harus mencari cawapres yang punya senioritas dalam politik Indonesia, seperti halnya Obama dengan Joe Biden. (T. 24, P. 5).	Menurut Jeffrie, Jokowi sebagai capres dari generasi baru tentu harus mencari cawapres yang punya senioritas dalam politik Indonesia, seperti halnya Obama dengan Joe Biden. "Tokoh Golkar senior tersebut juga sebaiknya mempunyai kemampuan diplomasi luar negeri yang baik, mengingat Jokowi

	Tokoh Golkar senior tersebut juga sebaiknya mempunyai kemampuan diplomasi luar negeri yang baik, mengingat Jokowi akan fokus mengurus dalam negeri," papar Jeffrie. (T. 24, P. 6).	akan fokus mengurus dalam negeri," papar Jeffrie. (T. 24, P. 5-6).
38.	Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, menambahkan, pada era kepemimpinan SBY, koalisi yang terbangun adalah model multi-partai, yang terdiri dari banyak partai. (T. 24, P. 10).	Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, menambahkan, pada era kepemimpinan SBY, koalisi yang terbangun adalah model multi-partai, yang terdiri dari banyak partai. "Sehingga kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama. Koalisi sekarang yang tergabung dalam setgab, kental dengan kepentingan-kepentingan politis sehingga membuat keputusan-keputusan yang memerlukan tindakan cepat sulit dilakukan," ujar Endang. (T. 24, P. 10-11).
39.	Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya satu partai penguasa dan satu partai oposisi, kata Endang, Indonesia dengan multipartai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. (T. 24, P. 12).	Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya satu partai penguasa dan satu partai oposisi, kata Endang, Indonesia dengan multipartai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. "Dan dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan "strong leadership" kepemimpinan yang kuat dan tegas. Jika tidak, sulit rasanya untuk melakukan gebrakan dalam pembangunan," papar Endang. (T. 24, P. 12-13).
40.	Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, KPU memang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan parpol terkait pencoretan dapil. (T. 25, P. 3).	Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, KPU memang harus bijaksana dalam menyikapi tuntutan parpol terkait pencoretan dapil. "Calon yang tidak memenuhi syarat itu taruhannya besar. Masak mengorbankan dapil, tak berkeadilan," ujarnya, Selasa (25/6). (T. 25, P. 3-4).
41.	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. (T. 26, P. 1).	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD masih enggan membicarakan kemungkinan keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Pasalnya, belum ada kejelasan waktu dan mekanisme konvensi seperti apa yang dilakukan Demokrat. (T. 26, P. 1).
42.	Hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan calon presiden dengan elektabilitas tertinggi masih ditempati Joko Widodo. (T. 27, P. 1).	Hasil survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan calon presiden dengan elektabilitas tertinggi masih ditempati Joko Widodo. Tingkat keterpilihan gubernur DKI itu mengalahkan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri. Berikut elektabilitas tokoh-tokoh yang dipilih responden bila pemilihan presiden dilakukan, berdasarkan kajian P2P LIPI yang dipaparkan di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (27/6), 1. Joko Widodo 22.6 persen 2. Prabowo Subianto 14.2 persen 3. Aburizal Bakrie 9.4 persen 4. Megawati Soekarnoputri 9.3 persen 5. Jusuf Kalla 4.2 persen 6. Rhoma Irama 3.5 persen 7. Wiranto 3.4 persen 8. Mahfud MD 1.9 persen 9. Hatta Rajasa 1.2 persen 10. Sri Sultan HB X 1.2 11. Surya Paloh 1.2 persen 12. Lainnya 4.4 persen (T. 27, P. 1-2).

43.	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. (T. 28, P. 1).	Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto mengaku tak terpengaruh dengan hasil lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014 karena hasil yang berbeda setiap lembaganya. "Hasil survei itu berbeda-beda dari lembaga satu ke lembaga lain, sehingga tidak perlu diributkan dan kami tidak akan terpengaruh," ujarnya kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi tentang hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (T. 28, P. 1).
44.	Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Jumat (28/6). (T. 28, P. 3).	Dalam survei itu, Hanura berada di urutan bawah di sela menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Jumat (28/6). Dalam survei mengenai partisipasi politik dan perilaku memilih pra Pemilu 2014, partai bernomor urut 10 tersebut juga berada di nomor yang sama atau urutan tiga dari bawah dibandingkan partai politik lainnya. Menurutnya, survei tersebut masih bersifat subjektif, karena berbeda hasilnya dengan survei lain.
45.	Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah jika mantan KSAD, Jenderal (purn) TNI, Pramono Edhie Wibowo disiapkan untuk menjadi capres pada konvensi Demokrat. (T. 29, P. 1).	Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan membantah jika mantan KSAD, Jenderal (purn) TNI, Pramono Edhie Wibowo disiapkan untuk menjadi capres pada konvensi Demokrat. Syarief Hasan mengatakan, semakin banyak orang yang bergabung dengan PD akan semakin bagus. (T. 29, P. 1-2).
46.	"Pak Pramono akan menjadi pesaing ketat Pak Marzuki," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Minggu (30/6). (T. 30, P. 2).	Bergabungnya Pramono Edhie Wibowo ke Partai Demokrat diprediksi bakal meningkatkan suhu persaingan calon presiden (capres) di internal Demokrat. Pramono bakal menjadi ancaman serius bagi Marzuki Alie di bursa konvensi capres. "Pak Pramono akan menjadi pesaing ketat Pak Marzuki," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Minggu (30/6). (T. 30, P. 1-2).

12.6 Tabel Interpretasi Paragraf yang Terdiri dari Satu Kalimat yang dapat Digabung dengan Paragraf Sebelumnya atau Setelahnnya

No.	Hasil Klasifikasi	Temuan	Ket.
1	Data dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 12, Tabel 12.5, no. 1-8, 11-21, 23, 26, 27, 30-33, 35, 37-45	Adanya paragraf-paragraf yang terdiri dari 1 kalimat yang berpotensi untuk digabung dengan kalimat setelahnya	Paragraf yang utuh adalah paragraf yang terdiri lebih dari 1 kalimat dan memiliki kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan pokok dan kalimat-kalimat penjelas (Keraf, 1994)
2	Data dapat dilihat pada Tahap Klasifikasi di Lamp. 12, Tabel 12.5, no. 1, 2, 3, 9, 10, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 36, 46, hlm. 149-156	Adanya paragraf-paragraf yang terdiri dari 1 kalimat yang berpotensi untuk digabung dengan kalimat sebelumnya	Paragraf yang utuh adalah paragraf yang terdiri lebih dari 1 kalimat dan memiliki kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan pokok dan kalimat-kalimat penjelas (Keraf, 1994)